

Paralel session VIB : Industry And Trade  
17 November 2005, Pukul 15.00-16.30  
Hotel Borobudur, Jakarta

## SPECIALISASI DAN KONSENTRASI SPASIAL PADA SEKTOR INDUSTRI MANUFAKTUR DI JAWA TIMUR

Erlangga Agustino Landiyanto

### Abstrak

Konsentrasi dari aktivitas ekonomi secara spasial, terutama pada industri manufaktur, telah menjadi fenomena menarik untuk dianalisis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dimana dan pada subsektor apa industri manufaktur di Jawa Timur terkonsentrasi serta bagaimana keterkaitan dengan spesialisasi industri pada masing-masing wilayah di Jawa Timur. sehingga dapat dianalisis mengenai kebijakan dalam mengembangkan industri manufaktur kota Surabaya. Dengan menggunakan menggunakan Location Quotient, Herfindahl Indeks, Ellison-Glaeser Indeks, indeks spesialisasi regional and indeks spesialisasi bilateral, diketahui Berdasarkan SWP Industri Manufaktur di Provinsi Jawa Timur terkonsentrasi pada tiga SWP yaitu SWP 1 Gerbang Kertausila, SWP 6 Malang – Pasuruan dan SWP 7 Kediri dan sekitarnya. Sedangkan apabila berdasarkan kabupaten kota, industri manufaktur kota Surabaya terkonsentrasi di kota Surabaya, kabupaten Gresik, kabupaten Sidoarjo, kota Kediri kabupaten Pasuruan dan kota Malang. Subsektor andalan provinsi Jawa Timur berdasarkan spesialisasi tingkat provinsi adalah subsektor makanan, minuman dan tembakau (ISIC 3.1), subsektor industri tekstil, pakaian jadi dan kulit (ISIC 3.2) dan subsektor industri barang galian non logam, kecuali minyak bumi dan batu bara (ISIC 3.6). Perkembangan subsektor tersebut didorong oleh terjadinya agglomerasi yang disebabkan oleh natural advantages maupun eksternalitas berupa *knowledge spillover* dan tenaga kerja yang terspesialisasi. Selain itu perkembangan subsektor tersebut juga didorong oleh akses pasar, baik berupa jumlah penduduk maupun sarana transportasi.

Kata Kunci: Konsentrasi spasial, Spesialisasi. Industri Manufaktur

## 1. Pendahuluan

Tujuan pembangunan di Indonesia adalah menciptakan masyarakat adil dan makmur secara merata baik secara moral maupun material. Dalam konteks perekonomian, sebagai bentuk pembangunan secara material, memperlihatkan besarnya peranan sektor pertanian di Indonesia. Sebagai negara agraris, sektor pertanian merupakan tulang punggung pembangunan ekonomi Indonesia dan memberikan kontribusi yang besar, baik dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia maupun dalam menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia.

Menurut Hill (Hill, 2000: 155), dalam perkembangannya, peranan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi di Indonesia mulai tergeser oleh peranan sektor industri manufaktur yang mengalami perkembangan pesat. Adanya pergeseran peranan sektor pertanian oleh sektor industri menyebabkan terjadinya perubahan struktur ekonomi dari perekonomian yang berbasis agraris menjadi perekonomian yang berbasis industri.

Berdasarkan pengamatan empiris pada tahun 2000, dapat dilihat bahwa sektor industri manufaktur memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia dan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari empat sektor penyumbang terbesar terhadap pembentukan PDB di Indonesia yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor industri manufaktur dan sektor perdagangan, hotel, atau restoran, pertumbuhan sektor industri manufaktur paling tinggi yaitu sebesar 13,04% rata-rata pertahun. Pertumbuhan sektor manufaktur tersebut lebih besar daripada pertumbuhan sektor perdagangan, hotel, dan restoran yang berkisar 9,48% rata-rata pertahun, sektor pertambangan dan penggalian sebesar 5,58% per tahun dan sektor pertanian sebesar 4,16% pertahun. Pertumbuhan sektor industri manufaktur sebesar 13,04% lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi (PDB) yang sebesar 7,54% rata-rata pertahun.

Penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia (Bank Indonesia, 2003) menunjukkan bahwa pada tahun 1988-1996 terjadi peningkatan yang cukup tinggi pada sumbangan sektor industri manufaktur terhadap PDB, yaitu dari 19,16% pada tahun 1988 menjadi 24,68% pada tahun 1996 dengan laju pertumbuhan rata-rata 13,08% per tahun. Apabila dibandingkan dengan sektor pertanian dengan sumbangan terbesar pada PDB pada tahun 1988 sebesar 23,29% menjadi 15,81% pada tahun 1996 dengan laju pertumbuhan rata-rata 4,16% pertahun dapat dilihat bahwa terjadi perubahan struktur ekonomi dari perekonomian yang berbasis agraris menjadi struktur ekonomi yang berbasis industri manufaktur.

Pada penelitian tersebut juga memperlihatkan bahwa sumbangan sektor industri manufaktur terhadap ekspor Indonesia juga cukup besar. Pada tahun 1981, *share* ekspor migas sebesar 82,1% dan ekspor non migas sebesar 17,9% dari ekspor Indonesia. Pada tahun 1994, terjadi pergeseran dalam ekspor Indonesia dimana ekspor non migas menyumbang 75,8% dari seluruh ekspor Indonesia. Dari ekspor non migas sebesar 75,8%, sebesar 84,7% disumbang oleh ekspor sektor industri manufaktur (Bank Indonesia, 2003).

Ramelan (Ramelan, R., 1998) menyatakan bahwa dalam persaingan global yang semakin tajam, suatu negara dituntut untuk mampu menghasilkan output secara efisien jika ingin tetap dapat bertahan. Efisiensi dalam produksi nasional dapat tercapai jika sumber daya nasional yang tersedia dapat dialokasikan secara efektif. Oleh karena itu,

dalam mengembangkan sektor industri manufaktur Indonesia, perlu didukung oleh strategi pembangunan industri.

Strategi pembangunan industri di Indonesia (Deperindag, 2001) pada hakekatnya merupakan strategi industrialisasi yang bersifat multi dimensional dan lintas sektoral/regional, dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya pembangunan sektor industri sesuai dengan visi, misi dan sasaran yang ditetapkan. Strategi ini meliputi berbagai aspek, antara lain:

Pertama; persatuan dan kesatuan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Menurut Deperindag (Deperindag, 2001), Strategi ini mengutamakan keserasian peran dalam pembangunan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat luas, sehingga terwujud kekuatan bersama yang saling mendukung. Pembangunan industri menempatkan dunia usaha dan masyarakat sebagai pelaku utamanya sedangkan pemerintah berperan sebagai perumus kebijakan dan fasilitator bagi pertumbuhan dan perkembangan industri. Kebijakan pemerintah mencakup penetapan arah pembangunan dan penciptaan iklim usaha/investasi yang kondusif guna memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk berperan dalam pembangunan industri. Sedangkan fasilitas yang diberikan pemerintah mencakup dukungan bagi dunia usaha dan masyarakat yang relatif kurang mampu bersaing, untuk melindungi kepentingannya baik sebagai produsen, pedagang maupun konsumen. Williamson menambahkan bahwa dalam pelaksanaan strategi berdasarkan integrasi antara pemerintah dan masyarakat, memerlukan adanya peningkatan efisiensi, produktivitas, profesionalisme dan peran serta seluruh pelaku pada industri, yang didorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara sinergis dalam memanfaatkan sumber daya yang ada.

Kedua; peningkatan peran industri kecil dan menengah dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat. Menurut deperindag (Deperindag, 2001), strategi ini mengupayakan penataan struktur industri, mendorong pembangunan industri kecil dan menengah kearah struktur yang lebih seimbang. Dalam kaitan ini, pengembangan kelembagaan dalam pembangunan industri perlu diarahkan menuju makin berdayanya ekonomi rakyat dengan mewujudkan keberpihakan pemerintah kepada perekonomian rakyat. Disamping itu, peranan dunia usaha dan masyarakat, baik sebagai pedagang, produsen maupun konsumen perlu, juga perlu mendapatkan perhatian yang lebih seimbang. North (1990) menambahkan bahwa penataan struktur industri yang mendorong tumbuhnya industri kecil memerlukan terwujudnya mekanisme pasar yang terkelola, dimana persaingan usaha yang sehat dapat dijamin sehingga industri kecil dan menengah serta masyarakat luas dapat lebih diberdayakan.

Strategi yang terakhir dikemukakan oleh Subiyanto (1997) dan Ramelan (1998) yang mengemukakan tentang pentingnya pemanfaatan keunggulan komparatif dan penciptaan keunggulan kompetitif dalam rangka menghadapi persaingan global. Pandangan tersebut didukung oleh Kotler (1997; 2000) dan Porter (1990). Kotler dan kertajaya menyatakan bahwa keunggulan kompetitif industri manufaktur suatu bangsa dapat tercipta dengan adanya peningkatan output yang disertai peningkatan produktifitas dan efisiensi (Kotler,P.Kertajaya,H.2000). Hal ini dapat dikembangkan dengan adanya peran pemerintah ikut campur dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kapabilitas industri nasional (Porter,M,E.1990). Selain itu pemerintah harus berperan dalam meningkatkan daya saing industri nasional terhadap pasar global (Kotler et al 1997)

Menurut Kuncoro (Kuncoro, M. 2004), dengan kehadiran UU No 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang diikuti dengan program pembangunan nasional 2000-2004 tentang peningkatan pembangunan daerah, terjadi perubahan orientasi kebijakan pembangunan dari kebijakan pembangunan sektoral yang menjadi wewenang pemerintah pusat menjadi kebijakan pembangunan yang berorientasi spasial dan regional. Perubahan orientasi pembangunan tersebut disertai meningkatnya wewenang pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerah berdasar aspirasi masyarakat.

Pada pembangunan sektor industri manufaktur, kebijakan yang berorientasi spasial dan regional merupakan salah satu faktor kunci yang dapat mendukung pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan (Kuncoro, M. 2002). Pada tahun 2000, pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian pada perspektif dan pendekatan *kluster* atau pendekatan konsentrasi spasial dalam kebijakan nasional dan regional sektor industri manufaktur untuk mendorong spesialisasi produk dan mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif (Kompas, 19/8/2000).

Menurut JICA (JICA, 2004 a; 2004 b), strategi pembangunan industri berbasis kluster diwujudkan dengan penciptaan nilai tambah, perluasan kesempatan kerja, dan perolehan devisa yang optimal dengan menempatkan keunggulan komparatif sumber daya alam terutama agroindustri dan agrobisnis sebagai *leading sector*, yang didukung oleh industri-industri penunjangnya, serta terus menerus mengembangkan keunggulan kompetitif untuk menghadapi persaingan global. Dengan keterbatasan sumber daya yang ada, maka perlu ditentukan industri-industri penghasil produk-produk unggulan nasional maupun penghasil produk-produk andalan daerah. Suksesnya strategi tersebut memerlukan pendekatan prioritas (*priority approach*) yang diharapkan menciptakan pola keterkaitan antar kegiatan baik di dalam sektor industri sendiri (keterkaitan horizontal) maupun antara sektor industri dengan seluruh jaringan produksi dan distribusi terkait (keterkaitan vertikal).

Tidak bisa dipungkiri bahwa keunggulan kompetitif sangat diperlukan diperlukan dalam menghadapi pasar bebas. Akan tetapi, menjadi suatu pertanyaan yang sulit dijawab tentang kemampuan Indonesia dalam mengembangkan keunggulan kompetitif, terlebih lagi saat ini Indonesia sedang dalam masa pemulihan terhadap krisis ekonomi. Sebelum dapat menjawab pertanyaan itu perlu dikenali terlebih dahulu potensi daerah dalam menciptakan keunggulan kompetitif. Berdasarkan uraian yang telah disebutkan, strategi untuk menciptakan keunggulan kompetitif dapat dicapai dengan kebijakan pembangunan industri manufaktur berbasis *cluster* (konsentrasi spasial). Oleh karena itu dirasa penting untuk menganalisis konsentrasi spasial industri manufaktur untuk mengenali potensi daerah dengan studi kasus Indonesia.

Untuk memfokuskan pembahasan, pengamatan dibatasi pada wilayah Jawa Timur karena Jawa Timur memiliki peranan yang penting dalam sektor industri manufaktur di Indonesia. Selain itu, Jawa Timur merupakan pusat industri kapal laut dan industri kereta api serta lokasi terkonsentrasinya pabrik gula. Hal tersebut didukung oleh peranan kota Surabaya sebagai ibukota provinsi Jawa Timur adalah kota terbesar kedua di Indonesia yang memiliki akses pelabuhan dan bandara internasional. Di Jawa Timur, industri manufaktur terkonsentrasi di Koridor Surabaya\_Malang (kotamadya Surabaya, kotamadya Malang, kabupaten Malang, kotamadya Mojokerto, Gresik, kabupaten Pasuruan & Sidoarjo) serta kabupaten Kediri dan kabupaten Jember dimana koridor

Surabaya-Malang memberikan kontribusi 50% dari output sektor industri manufaktur Jawa Timur.

Dalam konteks nasional, Jawa Timur menyumbang 20% dari nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor industri manufaktur di Indonesia dan 25% tenaga kerja yang bekerja di sektor industri manufaktur Indonesia berada di Jawa Timur (Dick Howard,1993:230-255).

Berdasar uraian tersebut, tujuan penelitian dalam makalah ini adalah mengetahui pada sektor apa industri manufaktur di Jawa Timur terspesialisasi, dan dimanakah industri manufaktur di Jawa Timur terkonsentrasi secara spasial serta bagaimanakah pengaruh kedua hal tersebut terhadap struktur industri pada masing-masing wilayah dan penentuan sektor unggulan di Jawa Timur.

Untuk itu, makalah ini dibagi menjadi lima bagian. Bagian pertama merupakan Pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang permasalahan yang menjadi dasar dalam permasalahan serta tujuan penelitian. Bagian kedua merupakan survey literatur yang membahas mengenai teori-teori, konsep-konsep, argumentasi-argumentasi yang melandasi analisis yang dilakukan dalam penelitian tersebut., disertai bahasan penelitian sebelumnya yang sejenis dan hipotesis yang mendasari penelitian. Bagian ketiga membahas mengenai pendekatan apa yang digunakan dalam penelitian, identifikasi variabel yang digunakan, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data yang digunakan, prosedur pengumpulan data dan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian. Bagian keempat adalah hasil pengamatan yang mendeskripsikan hasil penelitian yang telah dilakukan, analisis model dan pembuktian hipotesis, dan pembahasan serta analisa tentang hasil penelitian secara keseluruhan. Bagian terakhir adalah simpulan dan saran.

## 2. Survey Literatur

### 2.1. Pengertian Konsentrasi Spasial

Konsentrasi aktivitas ekonomi secara spasial menunjukkan bahwa industrialisasi merupakan suatu proses yang selektif dan hanya terjadi pada kasus tertentu bila dipandang dari segi geografis. Sebagai contoh: di Amerika Serikat, mayoritas industri manufaktur telah sekian lama terkonsentrasi pada suatu lokasi yang disebut "sabuk manufaktur" (Krugman,P.1991). Konsentrasi spasial industri (*Industrial clustering*) yang serupa juga ditemukan di kawasan industri *Axial belt* di Inggris (Kuncoro,M.2000). Selain itu, konsentrasi spasial dapat ditemui pada kluster industri teknologi tinggi di Silicon Valley (Ellison dan Glaeser,1997), konsentrasi spasial pada kota tepi air akibat faktor alami (Fujita dan Mori,1996), serta konsentrasi spasial yang terjadi akibat agglomerasi perkotaan (Fujita dan Thiesse, 2002).

Konsentrasi spasial telah menjadi kajian yang menarik yang populer. menariknya, di kebanyakan negara berkembang, distribusi penduduk dan konsentrasi industri terkonsentrasi di kota-kota besar seperti Bangkok, New Delhi, Sao Paulo, dan Jakarta, yang menandai suatu sistem spasial berdasarkan akumulasi modal dan tenaga kerja dalam aglomerasi perkotaan (Kuncoro,M.2002:1). Fenomena serupa juga ditemukan di Jawa Timur, dimana terjadi konsentrasi spasial industri manufaktur di koridor Surabaya-Malang (Dick,H.1993:230-255).

Terdapat berbagai pengertian berbeda tentang konsentrasi spasial. Pengertian yang diterima secara umum dikemukakan oleh Fujita yang menyatakan bahwa konsentrasi

spasial merupakan pengelompokan setiap industri dan aktivitas ekonomi secara spasial, dimana industri tersebut berlokasi pada suatu wilayah tertentu (Fujita et al, 1999: 287). Konsentrasi Spasial menunjukkan share suatu wilayah dan distribusi lokasi dari suatu industri. Apabila suatu distribusi spasial suatu industri tidak merata, dan ada wilayah yang mendominasi berlokasinya industri, maka menunjukkan bahwa industri terkonsentrasi secara spasial di wilayah tersebut (Aiginger dan Hansberg, 2003). Menurut OECD konsentrasi spasial menunjukkan bahwa industri tidak berlokasi secara merata pada seluruh wilayah, akan tetapi mengelompok secara berdekatan pada bagian tertentu pada wilayah tersebut (OECD, 2000).

Definisi yang dikemukakan sebelumnya melengkapi pandangan Krugman yang menyatakan bahwa konsentrasi spasial merupakan aspek yang ditekankan dari aktivitas ekonomi secara geografis dan sangat penting penentuan lokasi industri, Krugman menyatakan bahwa dalam konsentrasi aktivitas ekonomi secara spasial, ada 3 hal yang saling terkait yaitu interaksi antara skala ekonomi, biaya transportasi dan permintaan. Untuk mendapatkan dan meningkatkan kekuatan skala ekonomis, perusahaan-perusahaan cenderung berkonsentrasi secara spasial dan melayani seluruh pasar dari suatu lokasi. Sedangkan untuk meminimalisasi biaya transportasi, perusahaan-perusahaan cenderung berlokasi pada wilayah yang memiliki permintaan lokal yang besar, akan tetapi permintaan lokal yang besar cenderung berlokasi di sekitar terkonsentrasinya aktivitas ekonomi, seperti kawasan industri maupun perkotaan (Krugman, 1991: 14-15).

Terdapat berbagai pengamatan empiris tentang konsentrasi industri dan aktivitas ekonomi secara spasial dimana dalam literatur-literatur sering ditemukan istilah agglomerasi, kluster dan perkotaan. Literatur yang ada tidak secara jelas membedakan istilah-istilah tersebut bahkan pengertiannya sering bertabrakan dengan pengertian konsentrasi spasial itu sendiri.

Pandangan ini didasarkan oleh pandangan yang dinyatakan oleh Fujita dan Thiess (2000: 1) yang menyatakan bahwa pengertian konsentrasi spasial lebih ambigu daripada pengertian agglomerasi yang digunakan untuk menjelaskan fenomena yang berbeda. Menurut Fujita dan Thiess (2002: 20), pemikiran tentang agglomerasi diawali dari teori lokasi yang dikemukakan oleh Weber, dimana studi yang dilakukan oleh Weber berfokus pada lokasi firm dan menjelaskan terbentuknya kluster industri. Untuk lebih jelasnya, pada bagian selanjutnya akan dijelaskan mengenai kluster dan agglomerasi; bagaimana terjadinya konsentrasi spasial serta keterkaitannya dengan spesialisasi.

## **2.2. Kluster industri.**

Menurut Porter, kluster adalah firm-firm yang terkonsentrasi secara spasial dan saling terkait dalam industri. Firm-firm dalam industri yang terkonsentrasi secara spasial tersebut juga terkait dengan institusi-institusi yang dapat mendukung industri secara praktis. Kluster meliputi kumpulan firm dan hal yang terkait dalam industri yang penting dalam kompetisi. Kluster selalu memperluas aliran menuju jalur pemasaran dan konsumen, tidak ketinggalan pula jalur menuju produsen produk komplementer, dan firm dalam industri yang terkait, baik terkait dalam keahlian, teknologi maupun input. Dalam kluster juga tercakup pemerintah dan institusi yang lain (Porter, M, 1990; 1998a; 1998b).

Pandangan tersebut didukung oleh Nadvi dan Schmitz (1994) yang mengidentifikasi kluster sebagai konsentrasi geografis yang terbentuk dari keterkaitan kebelakang, keterkaitan kedepan, keterkaitan vertical dan keterkaitan tenaga kerja. Keterkaitan itu berbasis pada "*market and non market exchanges*" dari barang, jasa,

informasi maupun sumberdaya manusia, dimana institusi pemerintah dan swasta mensupport agen ekonomi dalam kluster tersebut.

Raines (2002) menambahkan bahwa kluster menginterpretasikan jaringan yang terbentuk dan menjadi semakin kokoh dengan sendirinya tidak hanya oleh firm dalam kluster tetapi oleh organisasi yang lain yang terkait sehingga menciptakan kolaborasi dan kompetisi dalam tingkatan yang tinggi sehingga dapat meningkatkan daya saing berdasarkan keunggulan kompetitif.

### 2.2.1. Kluster Dinamis

Konsep Kluster dinamis dikemukakan oleh Michael Porter (1990). Porter menyatakan interaksi dinamis yang terjadi dalam kluster mendorong terciptanya keunggulan kompetitif pada kluster industri. Menurut Porter, keunggulan kompetitif dimanifestasikan sebagai harga yang lebih murah daripada para pesaing atau kemampuan mendefereusiasikan produk dan mencapai keuntungan yang melampaui biaya ekstra dalam mendefereusiasikan produk tersebut. Keunggulan kompetitif dapat tercapai karena adanya efektifitas operasional yang berbeda, tetapi keunggulan yang berkesinambungan datang dari dimilikinya posisi kompetitif yang khusus dan unik (Porter,1990).

Aktivitas dasar yang merupakan landasan dari keunggulan kompetitif meliputi efektifitas operasional dan strategi yang digunakan. Menurut Porter (1998: 166-167), determinan dari keunggulan dan daya saing suatu kluster meliputi:

- a. *Factor conditions*. Posisi dari factor produksi yang tersedia, seperti tenaga kerja yang memiliki keahlian atau infrastruktur yang dapat mendukung industri.
- b. *Demand conditions*. Permintaan lokal terhadap barang dan jasa yang dihasilkan industri.
- c. *Related and supporting industries*. Keterkaitan antar firm dalam industri dan peranan industri tersebut dalam pasar yang lebih luas.
- d. *Firm strategy, structure and rivalry*. Strategi yang digunakan firm dalam industri, baik dalam berkreasi, mengorganisasi dan memmanage serta persaingan dan strktur pasar dalam industri.

Selain 4 determinan yang telah disebutkan, kemampuan kluster untuk bersaing tergantung dari peranan pemerintah dalam melakukan kebijakan yang berkaitan dengan kluster tersebut serta perubahan faktor eksternal (Porter, 1998: 184-195).

### 2.2.2. Klasifikasi kluster

Ada 3 bentuk Kluster berdasarkan perbedaan tipe dari eksternalitas yang membentuk kluster tersebut dan perbedaan tipe dari orientasi dan intervensi kebijakan (Kolehmainen,J.2002). Ketiga bentuk kluster yang dimaksud adalah:

#### 1) *Pure Agglomeration*.

*Pure agglomeration cluster* atau yang biasa disebut dengan *industrial district* adalah sekumpulan dari firm yang terkonsentrasi secara spasial dan membentuk kluster industri yang terspesialisasi pada suatu wilayah. Kluster ini terbentuk karena agglomerasi yang disebabkan oleh *marshallian eksternalities* sehingga sering disebut sebagai *Marshallian industrial district* (Marshal,A.1920). Pandangan Marshal mengenai industrial district masih relevan sampai saat ini dan secara empiris masih dapat dijumpai. Dalam perpektif lebih modern (Krugman,1991;Porter,1990), industrial districs models berbasis pada eksternalitas sbb:

- a. penurunan biaya transaksi (misalnya, biaya komunikasi dan transportasi)

- b. tenaga kerja yang terspesialisasi (misalnya, penurunan biaya rekrutment tenaga kerja yang terspesialisasi dan penurunan biaya untuk pengembangan sumber daya manusia)
- c. Ketersediaan sumber daya, input dan infrastruktur yang spesifik dan terspesialisasi (misalnya pelayanan spesial dan tersedia sesuai dengan kebutuhan lokal)
- d. Ketersediaan ide dan informasi yang maksimal (misalnya mobilitas tenaga kerja, *knowledge spillovers* dan hubungan informal antar perusahaan)

Menurut Gordon dan McCann (2000), *industrial district*, terjadi secara alamiah dan bersifat "*open membership*". Dalam *industrial district* tidak memerlukan investasi dalam membangun *relationship*. hal ini menunjukkan bahwa jenis kluster ini dapat muncul tanpa memerlukan usaha untuk memunculkannya. Selain itu ciri-ciri dari *industrial district* dapat teridentifikasi dalam area metropolitan dan kota-kota lain yang memproduksi jasa dalam skala yang tinggi.

Kautonen dan Kolehmainen (2001) menyatakan bahwa *industrial district* sangat fleksibel tapi pada suatu saat, *fragmentation* akan menjadi permasalahan dalam penentuan kebijakan inovasi. Menurut Kautonen dan Kolehmainen, *Fragmentation* berhubungan dengan situasi dimana perusahaan-perusahaan berada pada kluster yang sama, akan dapat mendapatkan keuntungan secara sinergis jika perusahaan-perusahaan tersebut mampu mengidentifikasi keuntungan-keuntungan tersebut dan terdapat hubungan saling menguntungkan antara mereka atau terjadi aliansi strategis antar perusahaan dalam kluster tersebut.

## 2) *The industrial complex model.*

Model kompleks industri berbasis pada hubungan antar perusahaan yang teridentifikasi dan bersifat stabil yang terwujudkan dalam perilaku spasial dalam suatu wilayah.. Hubungan antar perusahaan sengaja dimunculkan untuk membentuk jaringan perdagangan. Selain itu pola penjualan dan pembelian merupakan hal yang penting dalam menentukan lokasi suatu perusahaan. Model kompleks industri pada dasarnya lebih stabil daripada model distrik industri, karena diperlukannya investasi dalam menjalin hubungan antara perusahaan-perusahaan, dimana hubungan yang terjadi berdasarkan atas pertimbangan yang mantap dalam pengambilan keputusan. Dengan kata lain kluster ini (komplek industri) terjadi karena perusahaan-perusahaan ingin meminimalkan biaya transaksi spasial (biaya transportasi dan komunikasi) dan memiliki tujuan-tujuan tertentu baik secara implisit ataupun eksplisit dengan menempatkan perusahaannya dekat dengan perusahaan-perusahaan lain yang memiliki *value chain* yang mendukung perusahaan tersebut. Dalam beberapa kasus, terjadinya kluster industri didorong oleh adanya suatu perusahaan yang mengeksport produk akhir ke pasar internasional, yang menjadi mesin penggerak bagi perusahaan-perusahaan lain untuk berada pada kluster tersebut. Model kompleks industri merupakan tipe kluster dewasa.

Dilihat dari segi kebijakan inovasi, Kautonen dan Kolehmainen (2001) menyatakan bahwa orientasi kedalam merupakan masalah yang potensial dalam *industrial complex cluster*. Ada beberapa definisi dari orientasi kedalam, tapi pada dasarnya hal tersebut dapat diartikan pada situasi yang menyebabkan adanya penurunan fleksibilitas, kebebasan untuk memilih dan pilihan untuk mengembangkan kompleks industri secara keseluruhan. Komplek industri terbangun secara alami berbasis pada hubungan saling



ketergantungan yang tidak simetris. Keadaan ini dapat menghalangi penyerapan dan perkembangan inovasi dan menempatkan perusahaan pada kedudukan yang rendah dalam menciptakan investasi dalam *Research and Development* serta pemasaran. Dominasi dari perusahaan besar yang menjadi motor dalam kluster tersebut dapat berdampak negatif bagi iklim usaha dan peluang pada kluster secara keseluruhan.

### 3) *The Social Network model*.

Model jaringan sosial menekankan pada aspek sosial pada aktivitas ekonomi dan norma-norma institusi dan jaringan. Model ini berdasarkan pada kepercayaan dan bahkan hubungan informal antar personal. Hubungan interpersonal dapat menggantikan hubungan kontrak pasar atau hubungan hirarki organisasi pada proses internal dalam kluster. Konsentrasi spasial pada wilayah tersebut (*Cluster*) merupakan konteks alami yang terbentuk karena adanya hubungan informal dan modal social yang berupa kepercayaan, karena hal tersebut yang membentuk dan menjaga kluster melalui persamaan sosial dan sejarah yang secara terus menerus melakukan interaksi dan saling berbagi. Perlu diingat bahwa jaringan sosial antar perusahaan tidak perlu dibentuk dalam ruang lingkup regional ataupun lokal, meskipun kedekatan wilayah dan budaya dapat memfasilitasi terbentuknya proses tersebut (Harrison, 1992).

### 2.3. Agglomerasi Industri

Berdasarkan klasifikasi yang dikemukakan oleh Head dan Mayer (2003), agglomerasi mengandung dua pengertian. Pengertian pertama adalah proses yang dilakukan secara bersama-sama dalam melakukan mobilitas secara spasial. Pengertian kedua mendimalkalahkan suatu bentuk lokasional, terutama bagaimana aktivitas ekonomi terkonsentrasi secara spasial. Secara umum, dalam "*New Economic Geography*", pengamatan mengenai agglomerasi diawali dengan observasi mengenai bentuk agglomerasi dan mendiskusikan mengenai proses bagaimana itu terjadi.

Definisi yang telah dikemukakan melengkapi pengertian yang dikemukakan oleh Fujita yang menyatakan bahwa agglomerasi merupakan proses pengelompokan dari aktivitas ekonomi secara spasial, yang terjadi dan terbentuk secara kumulatif oleh beberapa alasan logis (Fujita et al 1999:1). Pandangan tersebut dilengkapi oleh Ellison dan Glaeser (1997) yang menyatakan bahwa agglomerasi tidak selalu terjadi dalam satu industri, agglomerasi dapat terjadi pada beberapa industri yang berbeda dan tidak saling terkait. Agglomerasi bisa berarti sama dengan kluster apabila hanya terjadi dalam suatu industri, akan tetapi agglomerasi industri lebih mengarah kepada penjelasan mengenai terbentuknya atau berkembangnya suatu kluster.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa agglomerasi berkaitan dengan konsentrasi dari beberapa fasilitas pendukung yang melayani industri-industri baik pada kluster maupun kota, dimana keberadaan fasilitas tersebut berpengaruh terhadap terjadinya konsentrasi spasial. Menurut Armstrong dan Taylor (2001:105) fasilitas yang dimaksud antara lain:

- Transportasi dan fasilitas komuter.
- Pasar tenaga kerja yang terorganisasi dan ketersediaan tenaga kerja dengan keahlian yang beraneka ragam.
- Pelayanan dari pemerintah dan sarana publik.
- Pelayanan jasa komersial.
- Aktivitas yang beorientasi pasar.

- Konsentrasi spasial dari organisasi yang konsisten dalam pencarian dan pengembangan produk baru.

Konsep agglomerasi ekonomi bersumber dari fenomena nyata dan diawali oleh teori lokasi yang dikemukakan Weber (Fujita dan Thiesse, 2002: 1-23). Menurut Weber, ada 3 faktor yang menjadi alasan firm dalam menentukan lokasi industri, yaitu:

A) perbedaan biaya transportasi.

Produsen cenderung mencari lokasi yang memberikan keuntungan berupa penghematan biaya transportasi serta dapat mendorong efisiensi dan efektivitas produksi. Dalam perspektif yang lebih luas, Coase (1937) mengemukakan tentang penghematan biaya transaksi (biaya transportasi, biaya transaksi, biaya kontrak, biaya koordinasi dan biaya komunikasi) dalam penentuan lokasi perusahaan.

B) perbedaan biaya upah.

Produsen cenderung mencari lokasi dengan tingkat upah tenaga kerja yang lebih rendah dalam melakukan aktivitas ekonomi sedangkan tenaga kerja cenderung mencari lokasi dengan tingkat upah yang lebih tinggi. Adanya suatu wilayah dengan tingkat upah yang tinggi mendorong tenaga kerja untuk terkonsentrasi pada wilayah tersebut, fenomena ini dapat ditemui pada kota-kota besar dengan keanekaragaman tinggi seperti Jakarta maupun kota yang terspesialisasi seperti Kudus maupun Kediri.

C) Penghematan agglomerasi.

Penghematan agglomerasi adalah penghematan yang terjadi terkonsentrasinya aktivitas ekonomi secara spasial. Penghematan tersebut dapat terjadi dalam industri yang sama atau beberapa industri yang berbeda. Hoover (Fujita dan Thiesse, 2002: 266-267) menyatakan bahwa ada 2 macam penghematan agglomerasi yang berupa penghematan lokalisasi dan penghematan urbanisasi. Penghematan lokalisasi terjadi karena konsentrasi spasial dalam industri yang sama yang meliputi penghematan transfer yang terjadi keseluruhan firm dalam industri saling terkait satu sama lain. Sehingga menyebabkan menurunnya biaya produksi firm pada suatu industri ketika produksi total dari industri tersebut meningkat (*economies of scale*). Penghematan urbanisasi terjadi apabila industri-industri pada suatu wilayah terasosiasi dan terakumulasi dalam berbagai tingkatan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Penghematan urbanisasi mendorong terciptanya pendukung dari aktivitas ekonomi secara keseluruhan dan menciptakan keuntungan secara kumulatif bagi seluruh industri

Berdasarkan Pemikiran Hoover tentang *localization economies* dan *urbanization economies*, Glaeser et al (1992) mendemakalahkan dan mengklasifikasikan tentang dua macam *knowledge spillover*, yaitu *intraindustry spillover* dan *interindustry spillover*. *Intraindustry Spillover* adalah *knowledge Spillover* yang terjadi pada suatu industri yang dikembangkan berdasarkan pemikiran Romer. Sedangkan *Interindustry Spillover*, yang dikembangkan oleh Jacob, merupakan *knowledge spillover* yang terjadi antar industri yang berkaitan dalam suatu lokasi.

Jene Jacob (1969) mengembangkan pemikiran Hoover tentang penghematan urbanisasi. Jacob menyatakan bahwa terjadi eksternalitas positif antar industri berupa *interindustry spillover* yang biasa disebut sebagai *Jacobs externalities* sebagai dampak terkonsentrasinya dan terasosiasinya industri-industri pada pada suatu wilayah. Henderson (1994) melengkapi pemikiran yang dikembangkan oleh Jacob dan menyatakan bahwa R&D berpengaruh positif terhadap *Jacobs externalities*.

Pendapat yang dikemukakan Hoover tentang penghematan lokalisasi mendukung pendapat Marshal yang menyatakan bahwa penghematan lokalisasi terjadi karena firm dalam industri yang sama mendapatkan keuntungan dari membentuk kluster dan terkonsentrasi pada lokasi yang sama. Marshal (Krugman, 1991: 36-67) mengemukakan pemikiran tentang eksternalitas dari konsentrasi industri secara spasial dan menjelaskan mengapa produsen cenderung berlokasi dekat dengan produsen lain pada industri yang sama. Menurut Marshal, konsentrasi spasial didorong oleh ketersediaan tenaga kerja yang terspecialisasi dimana berkumpulnya perusahaan pada suatu lokasi akan mendorong berkumpulnya tenaga kerja yang terspecialisasi, sehingga menguntungkan perusahaan dan tenaga kerja. Selain itu, berkumpulnya perusahaan atau industri yang saling terkait akan dapat meningkatkan efisiensi dalam pemenuhan kebutuhan input yang terspecialisasi yang lebih baik dan lebih murah. Yang terakhir, Marshal menyatakan bahwa jarak yang tereduksi dengan adanya konsentrasi spasial akan memperlancar arus informasi dan pengetahuan (*knowledge spillover*) pada lokasi tersebut.

Pemikiran Marshal tentang arus informasi dan pengetahuan dikembangkan Arrow (1962) tentang *knowledge spillover* yang diikuti oleh adanya *learning by doing*. Pandangan marshal dan Arrow tentang *knowledge spillover* yang terjadi dalam struktur industri monopolistik menjadi dasar dalam teori pertumbuhan endogen yang dikembangkan oleh Romer (1986). Sehingga eksternalitas yang berupa *knowledge spillover* dan merupakan *intraindustry spillover* yang merupakan perpaduan pemikiran Alfred Marshal, Keneth Arrow, dan Paul Romer disebut juga sebagai *MAR* (Marshal-Arrow-Romer) *Externalities* atau *Dynamic Externalities*. Tabel 2.1. merangkum berbagai eksternalitas berdasarkan klasifikasi yang disusun oleh Glaeser et al (1992) dan dilengkapi dengan klasifikasi yang disusun oleh Harris dan Kells (1997).

Tabel 2.1.

### Klasifikasi Spillover

	Competitive Industry	Monopolistic Industry
Industry Cluster	Porter	MAR
Diverse Industrial Base	Jacob	-

Sumber: Glaeser et al 1992; Harris dan Kells, 1997

Pada sisi lain, Porter (1998) mengemukakan pemikiran yang sedikit berbeda tentang *intraindustry spillovers*. Menurut Porter, sumber dari *knowledge spillover* adalah inovasi yang didorong oleh adanya persaingan dalam industri. Pemikiran Porter dikembangkan oleh Best (1999) yang mengemukakan bahwa persaingan akan mendorong entrepreneurship yang akan mendorong terjadinya inovasi dan *technological spin off*. Dengan adanya inovasi, akan terjadi variasi keahlian dan teknologi sehingga setiap perusahaan dalam kluster akan semakin terspecialisasi dan saling terkait satu sama lain.

#### 2.4. Sentripetal dan Sentrifugal

Fujita et al (1999: 1-12) menyatakan bahwa *intraindustry* dan *interindustry spillover* merupakan salah satu pendorong terjadinya agglomerasi industri atau *clustering*. Terjadinya agglomerasi disebabkan oleh mekanisme yang disebabkan oleh *trade of* antara *centripetal forces* dan *centrifugal forces*. *Centripetal forces* atau *agglomeration forces* adalah kekuatan yang mendorong terjadinya konsentrasi spasial, sedangkan *centrifugal forces* atau *dispersion forces* adalah kekuatan yang berlawanan dan mendorong terjadinya distribusi spasial. Klasifikasi tentang centripetal forces dan centrifugal forces menurut Fujita (1999) dirangkum dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2.

### Sentipetal dan Sentrifugal

Centripetal Forces	Centrifugal Forces
Linkages	Immobile factor
Thick market	Land rent and comuting
Knowledge spillover and other	Congestion and other pure
Pure external economies	Diseconomies

Sumber: Fujita et al 1999: 346

Fujita menjelaskan bahwa pada dasarnya, pemikiran tentang terjadinya agglomerasi didasari oleh dua hal: pertama, pentingnya hasil yang meningkat akibat skala ekonomis (*increasing return to scale*) dan biaya transportasi, dimana lingkaran keterkaitan kebelakang dan keterkaitan kedepan merupakan argumentasi logis yang menjelaskan terjadinya agglomerasi. Hal ini dapat menjelaskan mengapa mereka berlokasi saling berdekatan satu sama lain. Alasan kedua adalah *immobility some resources*, contoh: lahan/ tanah dan dalam beberapa kasus adalah tenaga kerja yang bertindak sebagai *centrifugal forces* (Fujita et al, 1999:345).

Pemikiran yang dikemukakan oleh Fujita et al (1999) mendukung pemikiran yang dikemukakan Porter tentang *related and supporting industries*. Porter menyatakan tentang pentingnya keterkaitan antar firm dalam industri dalam penciptaan nilai. Mekanisme keterkaitan antar firm dalam industri bisa berupa keterkaitan vertikal maupun keterkaitan horisontal. Keterkaitan vertikal adalah keterkaitan antar firm dari hulu sampai ke hilir. Sedangkan keterkaitan horisontal adalah keterkaitan pada perusahaan yang memiliki peranan sama dalam industri baik dan memiliki kedudukan sejajar. Semakin besar keterkaitan antar firm dalam industri akan semakin mendorong terkonsentrasi firm dalam industri secara spasial (Porter, 1990)

Porter (1998: 184-195) menambahkan tentang pentingnya dukungan terhadap industri. Dukungan itu bisa berupa dukungan dari institusi terkait, partisipasi aktif dari pemerintah, kondisi lingkungan eksternal yang baik maupun iklim usaha yang baik. Dengan adanya dukungan tersebut, firm-firm dalam kluster akan mengalami peningkatan kinerja dan efisiensi sehingga akan mendorong firm-firm diluar kluster bergabung ke dalam kluster tersebut.

### 2.5. Spesialisasi Industri

Menurut Aiginger dan Hansberg (2003), terdapat perbedaan makna antara spesialisasi dan konsentrasi. Spesialisasi dapat didefinisikan sebagai distribusi *share* industri dari suatu wilayah. Sedangkan Konsentrasi dapat didefinisikan sebagai *regional*

*share* yang menunjukkan distribusi lokasional dari suatu industri. Pada wilayah yang terspesialisasi, konsentrasi menunjukkan tingkatan aktivitas dan distribusi lokasional dari industri pada wilayah tersebut, dimana pada umumnya aktivitas ekonomi lebih terkonsentrasi wilayah *core* daripada *periphery*. Dengan adanya spesialisasi, *share* wilayah yang merupakan lokasi industri diluar industri utama relatif lebih rendah daripada *share* wilayah yang merupakan lokasi industri utama yang merupakan spesialisasi wilayah tersebut. Dengan adanya hal tersebut, kontribusi industri utama pada suatu wilayah yang terspesialisasi akan lebih besar daripada kontribusi industri tersebut pada wilayah yang lain. Hal tersebut akan menimbulkan distribusi spasial dari industri dimana industri tersebut cenderung terkonsentrasi pada wilayah tertentu (wilayah yang terspesialisasi pada industri tersebut). Berdasarkan uraian, dapat disimpulkan bahwa suatu industri akan cenderung terkonsentrasi pada wilayah yang terspesialisasi pada industri tersebut.

Terbentuknya kluster industri di suatu wilayah yang terjadi akibat proses agglomerasi menyebabkan wilayah tersebut menjadi terspesialisasi pada suatu industri. Menurut OECD (2000), spesialisasi industri menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi pada suatu wilayah dikuasai oleh beberapa industri tertentu. Suatu wilayah dapat diartikan sebagai wilayah yang terspesialisasi apabila dalam sebagian kecil industri pada wilayah tersebut memiliki pangsa yang besar terhadap keseluruhan industri. Struktur industri yang terspesialisasi pada industri tertentu menunjukkan bahwa wilayah tersebut memiliki keunggulan berupa daya saing pada industri tersebut.

Dalam kaitannya dengan Spesialisasi, perbedaan utama antara MAR dengan pemikiran yang dikemukakan Jacobs adalah efek dari spesialisasi (tingkatan terspesialisasinya suatu industri pada lokasi tertentu) dan *diversity* (range dari industri yang berbeda dalam suatu lokasi). Dasar pemikiran dari MAR menyatakan bahwa sebagian besar spillover terjadi antara firm dalam suatu industri. Suatu lokasi yang terspesialisasi pada konsentrasi industri yang tinggi dapat meningkatkan inovasi dan mempercepat pertumbuhan. Berlawanan dengan pemikiran yang dikemukakan oleh MAR, Jacob menekankan tentang pentingnya knowledge spillover antara industri yang berbeda dalam suatu lokasi. Jacob memprediksikan bahwa industri akan lebih inovatif dan tumbuh lebih cepat apabila berlokasi pada wilayah dengan industri yang beraneka ragam (Harris dan Kells, 1997)

Pemikiran yang mendukung pandangan Jacob dikemukakan oleh Glaeser et al (1992) yang menemukan bahwa persaingan dan *diversity* akan mendorong pertumbuhan dan inovasi, apabila industri pada wilayah tersebut tidak terspesialisasi. Kesimpulan Glaeser didukung oleh hasil pengamatan empiris di berbagai negara terutama di Eropa. Studi kasus di Italia menunjukkan bahwa efek positif terhadap pertumbuhan disebabkan oleh *diversity* bukan spesialisasi (Usai & Pacci, 2003). Pada pengamatan di Belanda, Van Soest et al (2002) menemukan kesimpulan yang senada.

Pemikiran yang lebih moderat dikemukakan Henderson et al (1995) yang melihat adanya efek positif dari keanekaragaman dan spesialisasi industri pada industri berteknologi tinggi. Kesimpulan yang sama ditemukan oleh Forni dan Paba (2002) yang menemukan bahwa spesialisasi dan variasi industri sama-sama penting bagi pertumbuhan sebagian besar industri manufaktur.

### 3. Data dan Metode penelitian

#### 3.1. Data

Dalam penelitian ini data yang diolah dan dianalisis secara kuantitatif adalah data PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) industri manufaktur besar dan menengah setiap Kota dan Kabupaten di Jawa Timur. Data PDRB yang digunakan dalam Makalah ini adalah data PDRB sektor industri manufaktur dengan standart klasifikasi ISIC 2 digit tahun 1996, 1997, 1999, 2000 dengan harga konstan tahun 1993. Dalam standar klasifikasi ISIC 2 digit, sektor industri manufaktur diklasifikasikan dalam sembilan subsektor (dijelaskan pada Tabel 3.1).

**Tabel 3.1**

Klasifikasi Industri Manufaktur Berdasarkan Standard ISIC 2 Digit	
Kode ISIC	Subsektor
3.1	Subsektor Industri Makanan, Minuman dan Tembakau
3.2	Subsektor Industri Tekstil, Pakaian Jadi dan Kulit
3.3	Subsektor Industri Kayu dan Sejenisnya
3.4	Subsektor Industri Kertas, Percetakan dan Penerbitan
3.5	Subsektor Industri Kimia, Minyak Bumi, Karet dan Plastik
3.6	Subsektor Industri Barang Galian Non Logam, Kecuali Minyak Bumi dan Batu Bara
3.7	Subsektor Industri Logam Dasar
3.8	Subsektor Barang Dari Logam, Mesin dan Peralatan
3.9	Subsktor industri Pengolahan Lainnya

Sumber: BPS

Data PDRB industri manufaktur yang digunakan dalam makalah ini berasal dari BPS, dimana data PDRB tersebut merupakan data utama yang dibutuhkan pada makalah ini. Selain itu, dalam makalah ini penulis juga menggunakan data pendukung yang bersumber BPS, Bapeprov, Deperindag, Internet maupun dari survey literatur serta penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Data tersebut bisa berupa kalimat maupun angka yang dapat memperkuat teori maupun analisis pada makalah ini secara kualitatif.

Dalam penelitian sebelumnya di negara lain yang sesuai dengan topik pada makalah ini, pada umumnya data yang digunakan adalah data tenaga kerja industri manufaktur tiap subsektor industri pada daerah setingkat kota atau kabupaten, dimana dalam konteks makalah ini dibutuhkan data tenaga kerja industri manufaktur setiap Kota dan Kabupaten di Jawa Timur dengan standart klasifikasi ISIC 2 digit. Selain itu dibutuhkan data *firm size* (*share* tenaga kerja *firm* terhadap tenaga kerja industri). Akan tetapi data *firm size* yang dibutuhkan tidak tersedia. Oleh karena itu, penulis memutuskan menggunakan data *regional size* (*share* PDRB industri suatu wilayah terhadap PDRB industri) yang tersedia dan dapat digunakan. Dalam mengatasi tidak adanya data *firm size*, penulis menggunakan data PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) industri manufaktur besar dan menengah setiap Kota dan Kabupaten di Jawa Timur dengan standart klasifikasi ISIC 2 digit sebagai *proxy* dengan sedikit pengolahan matematis.

Data PDRB yang digunakan diolah secara matematis sehingga dapat ditemukan persentase dari kontribusi regional pada suatu subsektor dimana pengolahan data tersebut akan dijelaskan secara lebih terperinci pada "Teknik Analisis" yang akan dijelaskan lebih lanjut. Dalam makalah ini, penggunaan data PDRB dapat dibenarkan secara metodologi karena telah ada penelitian di Indonesia dengan topik yang sama yang

menggunakan data tersebut meskipun dalam tingkatan provinsi (Sjoberg dan Sjöholm, 2001).

Tahun 1996-2000 digunakan sebagai sebagai tahun analisis karena penulis ingin melihat bagaimana konsentrasi industri manufaktur di Jawa Timur pada era sebelum dan sesudah krisis. Penulis sengaja tidak memasukkan tahun 1998 sebagai tahun krisis karena tahun tersebut merupakan puncak dari krisis, dimana berbagai sumber menyatakan bahwa data pada tahun tersebut tidak mencerminkan nilai sebenarnya. Penulis tidak masukkan tahun 2001 dan 2002 karena data yang sesuai dengan makalah ini pada tahun tersebut adalah data yang masih disempurnakan. Oleh karena itu, dalam makalah ini yang menjadi tahun analisis adalah tahun 1996, 1997, 1999 dan 2000.

Dalam pengumpulan dan pengolahan data, langkah pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi data yang dibutuhkan dan akan digunakan. Identifikasi data didasarkan atas teori dan pengamatan empiris yang berkaitan dengan dengan topik. Langkah kedua yang dilakukan adalah penyesuaian berdasarkan ketersediaan data, baik penyesuaian teori, maupun data yang akan digunakan. Langkah ketiga adalah pengumpulan data baik berupa angka maupun tertulis dan langkah terakhir adalah pengolahan dan analisis data. Metode pengumpulan data pada makalah ini adalah dokumenter, yaitu pengumpulan data sekunder yang berasal dari dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga pengumpul dan penerbit data maupun berasal dari penelitian sebelumnya.

### 3.2. Teknik Analisis

Apabila didasarkan pada klasifikasi yang dikemukakan oleh Head, Meyer & Ries (2002), makalah ini merupakan pengamatan empiris tentang konsentrasi spasial dan deskriptif dalam suatu titik waktu. Penggunaan tahun 1996, 1997, 1999 dan 2000 sebagai tahun analisis menunjukkan ada empat titik waktu yang dianalisis pada makalah ini. Empat titik waktu tersebut akan dianalisis secara kuantitatif dan akan dibahas secara secara kualitatif.

Dalam penyusunan indikator pada makalah ini, digunakan variabel/lambang yang konsisten, dimana satu variabel/lambang mewakili suatu pengertian dengan harapan tidak terjadi kerancuan dalam mengartikan variabel/lambang. Variabel, lambang serta indikator pada makalah ini didefinisikan dan disusun secara runtut untuk menghindari pengulangan dalam mendefinisikan variabel maupun menyusun indikator.

Dasar analisis pada makalah ini bersumber pada dua indikator yang merupakan dasar dalam penyusunan indeks spesialisasi dan konsentrasi spasial seperti yang dikemukakan oleh Knarvik et al (2000) yaitu:

$$V_i^S = \frac{PDRB_i^S}{PDRB_i} \quad (1)$$

Dimana  $V_i^S$  merupakan share dari PDRB subsektor industri manufaktur  $S$  di kota atau kabupaten  $i$  terhadap PDRB sektor industri manufaktur kabupaten atau kota  $i$  secara keseluruhan. Perlu diperhatikan bahwa  $i$  melambangkan kota atau kabupaten di Jawa Timur yang menjadi sampel penelitian, sedangkan  $S$  melambangkan subsektor industri manufaktur berdasarkan klasifikasi ISIC 2 digit.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan Aiginger dan Hansberg (2003), kontribusi  $PDRB$  subsektor industri manufaktur  $S$  di kabupaten atau kota  $i$  terhadap  $PDRB$

kabupaten secara keseluruhan dapat menunjukkan subsektor industri manufaktur apa yang merupakan spesialisasi sektor dari kota dan kabupaten  $i$ .

$$V^S = \frac{PDRB^S}{PDRB} \quad (2)$$

Spesialisasi pada tingkatan yang lebih luas dilambangkan oleh  $V^S$  yang merupakan *share* dari  $PDRB$  subsektor  $S$  terhadap  $PDRB$  sektor industri manufaktur Jawa Timur secara keseluruhan.  $V^S$  menunjukkan subsektor industri manufaktur yang merupakan spesialisasi dari sektor manufaktur Jawa Timur. Penggunaan data  $PDRB$  dalam menganalisis spasialisasi didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Kuncoro 2002.

$$S_i^S = \frac{PDRB_i^S}{PDRB^S} \quad (3)$$

Pada sisi lain, Aiginger dan Hansberg (2003) menyatakan bahwa konsentrasi dapat didefinisikan sebagai regional share yang menunjukkan distribusi lokasional dari suatu industri. Pada konteks Makalah ini, konsentrasi spasial yang dilambangkan dengan  $S_i^S$  yang menunjukkan kontribusi  $PDRB$  subsektor  $S$  di kota/kabupaten  $i$  terhadap  $PDRB$  subsektor  $S$  di seluruh Jawa Timur. Penggunaan data  $PDRB$  pada konsentrasi spasial berdasarkan penelitian yang dilakukan Sjoberg dan Sjöholm (2001).

$$X_i = \frac{PDRB_i}{PDRB} \quad (4)$$

$X_i$  Menunjukkan kontribusi industri manufaktur kabupaten/kota  $i$  terhadap industri manufaktur Jawa Timur. Perbandingan nilai  $X_i$  antara daerah  $i = (1, \dots, N)$  menunjukkan distribusi lokasional industri manufaktur di Jawa Timur.

Salah satu pendekatan yang paling sering digunakan adalah dalam menganalisis spesialisasi daerah adalah  $LQ > 1$  atau bisa disebut juga Hoover-Balassa koefisien (Lafourcade dan Mion, 2003). Pendekatan ini menyatakan bahwa spesialisasi relatif dalam industri (terutama manufaktur) pada suatu wilayah terjadi apabila spesialisasi industri pada suatu wilayah lebih besar daripada spesialisasi industri pada wilayah *agregat* (Kuncoro, 2004).

$$LQ = \frac{V_i^S}{V^S} = \frac{S_i^S}{X_i} \quad (5)$$

Apabila  $V_i^S > V^S$  atau  $S_i^S > X_i$  maka  $LQ > 1$

Apabila  $V_i^S < V^S$  atau  $S_i^S < X_i$  maka  $LQ < 1$

Nilai  $LQ > 1$  menunjukkan bahwa subsektor  $S$  terspesialisasi secara relatif di wilayah  $i$ . Berdasarkan tinjauan pustaka dan teori basis, Subsektor  $S$  merupakan subsektor unggulan yang layak untuk dikembangkan di wilayah  $i$  dan demikian pula sebaliknya apabila  $LQ < 1$  maka subsektor  $S$  bukan merupakan subsektor unggulan daerah tersebut. (bendhauid-Val 1991).

Pada sisi lain, Krugman menyatakan tentang perbedaan struktur industri pada suatu wilayah dengan struktur industri pada wilayah lain maupun seluruh wilayah akan mempengaruhi daya saing wilayah terhadap wilayah yang menjadi standard pengukuran. Hasil penilaian menunjukkan tingkat spesialisasi wilayah yang dianalisis. Oleh karena itu



dalam menganalisis spesialisasi suatu daerah digunakan indikator yang digunakan oleh Krugman (1991) yaitu: indeks spesialisasi regional atau sebut saja  $K_{SPEC}$  dan indeks spesialisasi bilateral yang dapat disebut sebagai  $B_{SPEC}$ .

Kim (1999) menyatakan bahwa nilai yang menjadi standar pengukuran  $K_{SPEC}$  dan  $B_{SPEC}$  berkisar antara nilai nol dan dua. Nilai nol menunjukkan bahwa adanya kesamaan struktur industri antara wilayah yang dianalisis dengan wilayah yang dijadikan *benchmark*. Nilai dua menunjukkan tidak adanya kesamaan struktur antara wilayah yang dianalisis sehingga masing-masing wilayah yang dianalisis terspesialisasi pada industri unggulan masing-masing.

$$K_{SPEC} = \sum_{S=1}^N |V_i^S - V^S| \quad (6)$$

$K_{SPEC}$  atau indeks spesialisasi regional menunjukkan tingkatan spesialisasi suatu wilayah bila dengan wilayah lain dengan wilayah bersama sebagai *benchmark*. Dalam konteks Jawa Timur, yang menjadi *benchmark* dalam menganalisis  $K_{SPEC}$  pada  $i$  adalah struktur industri provinsi Jawa Timur.  $K_{SPEC}$  bernilai dua apabila struktur industri industri pada wilayah  $i$  memiliki tidak memiliki kesamaan dengan struktur industri di Jawa Timur secara keseluruhan.  $K_{SPEC}$  bernilai nol apabila persamaan struktur industri daerah  $i$  sama dengan struktur industri Jawa Timur secara keseluruhan.  $K_{SPEC}$  wilayah  $i$  bernilai lebih besar daripada satu sampai dengan lebih kecil sama dengan dua menunjukkan bahwa wilayah  $i$  lebih terspesialisasi dari pada wilayah lain di Jawa Timur.

$$B_{SPEC} = \sum_{S=1}^N |V_i^S - V_j^S| \quad (7)$$

Pada sisi lain,  $B_{SPEC}$  digunakan untuk melihat apakah ada persamaan struktur antara dua wilayah yang dianalisis secara bilateral. Dalam Jawa Timur, wilayah yang dianalisis secara bilateral adalah wilayah  $i$  dan  $j$  dimana  $j$  juga melambangkan kabupaten/kota di Jawa Timur.  $B_{SPEC}$  sebesar dua menunjukkan bahwa wilayah  $i$  dan  $j$  memiliki struktur industri yang berbeda,  $B_{SPEC}$  sebesar nol menunjukkan bahwa wilayah  $i$  dan  $j$  memiliki kesamaan struktur industri yang sangat berkaitan dengan konsentrasi spasial pada industri manufaktur

Terdapat berbagai pendekatan yang digunakan untuk menganalisis konsentrasi spasial. Salah satu pendekatan yang sering digunakan menganalisis konsentrasi spasial adalah Herfindahl indeks yang dilambangkan  $H^S$  yang menunjukkan distribusi lokasi pada subsektor  $S$  di wilayah Jawa Timur. Nilai  $H^S$  berkisar antara nol dan satu, semakin tinggi  $H^S$  maka distribusi lokasi semakin tidak merata dan industri manufaktur pada subsektor  $S$  cenderung terkonsentrasi pada wilayah tertentu.

$$H^S = \sum_{i=1}^M (S_i^S)^2 \quad (8)$$

Pendekatan lain dalam menganalisis konsentrasi spasial dikemukakan oleh Ellison dan Glaeser (1997), ditujukan untuk mengisolasi efek dari konsentrasi spasial. Model yang dikemukakan diturunkan dari indeks yang berbasis tenaga kerja:

$$g_{EG} = \sum_{i=1}^M (S_i^S - X_i)^2 \quad (9)$$

$g_{EG}$  biasa disebut dengan Gini lokasional, menunjukkan tingkat spesialisasi suatu sektor dan konsentrasi spasial antara beberapa wilayah. Indeks yang dikembangkan dari  $g_{EG}$  telah digunakan oleh Ellison dan Glaeser untuk menganalisa konsentrasi spasial dari industri manufaktur di amerika serikat, berdasarkan analisa yang telah dilakukan, Ellison dan Glaeser berkesimpulan bahwa pada industri yang terspesialisasi, konsentrasi spasial terjadi karena *natural advantage* dan *knowledge spillover* (disebut juga Marshal-Arrow-Romer atau MAR eksternalitas). Akan tetapi sangat sulit untuk mengukur dorongan dari *knowledge spillover* terhadap konsentrasi spasial. Oleh karena itu, Ellison dan Glaeser (1999) mengemukakan tentang kontribusi *natural advantages* berdasarkan *factor endowment* yang secara simulatan mempengaruhi dan mendorong skala ekonomi internal perusahaan, untuk itu Ellison dan Glaeser membangun indikator untuk merefleksikan kontribusi dari *natural advantages* dan *knowledge spillover* yaitu:

$$\gamma_{EG} = \frac{G_{EG} - H^f}{1 - H^f} \quad (10)$$

Indikator tersebut dibangun dari persamaan (11) dan persamaan (12), dimana:

$$G_{EG} = \frac{g_{EG}}{1 - \sum_{i=1}^M (X_i)^2} \quad (11)$$

$G_{EG}$  atau yang biasa disebut dengan *raw concentration* menunjukkan besarnya kekuatan agglomerasi yang mendorong konsentrasi spasial dan disusun berdasarkan persamaan (9).

$$H = \sum_{f=1}^L (Z_f^S)^2 \quad (12)$$

$H^f$  merupakan firm size's herfindahl yang menunjukkan distribusi tenaga kerja pada industri sedangkan  $Z_f^S$  adalah *firm size* yang dikalkulasi berdasar *share* tenaga kerja firm terhadap tenaga kerja industri. Karena tidak tersedianya data, maka dalam makalah ini digunakan  $H$  sebagai *proxy* untuk menggantikan  $H^f$  dengan berdasarkan pada pendekatan yang dilakukan oleh Combes dan Lafourcade (2003) dimana:

$$H = \sum_{i=1}^M \frac{1}{M} (S_i^S)^2 \quad (13)$$

Oleh karena itu, dengan mengganti  $H^f$  dengan  $H$  maka persamaan (10) akan berubah menjadi:

$$\gamma_{EG} = \frac{G_{EG} - H}{1 - H} \quad (14)$$

Berdasarkan pengamatan empiris yang dilakukan oleh Ellison dan Glaeser,  $\gamma_{EG}$  menunjukkan pengaruh *natural advantage* dan *knowledge spillover* terhadap konsentrasi spasial dari industri. Ellison dan Glaeser (1997) menyatakan bahwa standard pengukuran dari indeks tersebut adalah: dibawah 0,02 menunjukkan dispersi dan diatas 0,05 menunjukkan terjadinya agglomerasi yang kedua-duanya disebabkan oleh pengaruh *natural advantage* dan *knowledge spillover*.

Dalam makalah ini, standard pengukuran tersebut tidak dapat digunakan, karena adanya perbedaan data dan perbedaan pendekatan. Oleh karena itu, makalah menggunakan metode yang digunakan oleh Ellison Glaeser dalam menentukan 0,02 dan 0,05 sebagai standar pengukuran. Ellison dan Glaeser menyatakan bahwa nilai standar pengukuran 0,02 berasal dari *median*  $\gamma_{EG}$  dan standar pengukuran 0,05 berasal dari *mean*  $\gamma_{EG}$ .

Pendekatan dalam menentukan standar median dan mean  $\gamma_{EG}$  diikuti oleh berbagai pengamatan empiris antara lain yang dilakukan oleh Maurel dan Sedillot (1999) maupun Lafourcade dan Mion (2003). Oleh karena dalam makalah ini, standard pengukurannya menggunakan metode yang sama dengan penelitian sebelumnya yaitu: nilai  $\gamma_{EG}$  dibawah median  $\gamma_{EG}$  menunjukkan dispersi dan diatas mean  $\gamma_{EG}$  menunjukkan terjadinya agglomerasi dimana terjadinya dispersi dan agglomerasi disebabkan oleh pengaruh *natural advantage* dan *knowledge spillover*.

#### 4. Hasil Pengamatan

##### 4.1. Industri Manufaktur di Jawa Timur

Jawa Timur adalah wilayah pertama Indonesia yang mengalami dampak dari revolusi industri. Sejak awal industri modern di Jawa Timur tidak diorientasikan kearah produksi barang-barang konsumsi namun ke arah pengolahan hasil pertanian, terutama industri gula dan industri berat. Kota Surabaya yang memiliki pelabuhan alam dan dihubungkan dengan derah pedalaman oleh sungai, pada tahun 1830-an telah menjadi pusat industri gula yang terus berkembang. Pada tahun 1860-an, penggunaan mesin uap pada penggilingan dan pemerosesan gula tidak hanya membangkitkan pabrik gula menjadi semakin besar, tetapi juga mendorong pertumbuhan industri penunjangnya. Sementara itu, dibukanya pelayanan antar pulau dengan kapal uap dan didirikannya pangkalan angkatan laut di kota Surabaya pada tahun 1850-an mengakibatkan berkembangnya sebuah industri perbaikan kapal yang besar di kota Surabaya (Dick, 1993 a). Rangkaian ketiga dalam pengembangan industri berat adalah dibukanya jaringan kereta api maupun trem berikut bengkel rekayasa yang mendukung jaringan infrastruktur tersebut pada dekade-dekade akhir abad ke sembilan belas. Fase industrialisasi yang baru dimulai di Jawa Timur ini berakhir dengan terjadinya depresi besar pada tahun 1930-an, yang memaksa ditutupnya pabrik gula dan menurunnya daya beli pasar lokal di Jawa Timur (Dick, 1993 b).

Periode antara perang dunia pertama dan perang dunia kedua ditandai dengan dilakukannya diversifikasi ke industri barang-barang konsumsi. Selama tahun 1920-an Jawa Timur menarik sejumlah industri barang konsumsi yang diorientasikan untuk pasar dalam negeri. Pada era setelah tahun 1934, pemerintah Hindia Belanda memberlakukan sistem tarif dan kuota yang proteksionis terhadap barang impor sehingga menyuburkan industri-industri barang substitusi impor di Jawa Timur (Dick, 1993 a).

Setelah Indonesia merdeka, semakin terjadi kecenderungan modal manufaktur untuk mengumpul di di Jakarta-Jawa Barat. Sebagai ibukota sebuah negara kesatuan, Jakarta semakin menjadi pusat pembuatan keputusan birokratik, pembelanjaan umum dan kelas menengah yang terus tumbuh (Hill, 2000). Setelah Tahun 1967, ketika modal asing diijinkan lagi, industri manufaktur menjamur di Jakarta secara praktis Jawa Timur menjadi semakin terabaikan dan tertinggal (Hill, 1988).

Survei terdahulu. mengenai sektor manufaktur besar dan menengah di Jawa Timur setelah kemerdekaan adalah sensus industri tahun 1963. hasil sensus tersebut menunjukkan bahwa struktur industri manufaktur di Jawa Timur memiliki struktur industri manufaktur yang didominasi oleh Industri makanan, minuman dan tembakau (ISIC 3.1). dominasi tersebut terjadi karena banyaknya pabrik gula dan pabrik rokok kretek yang berlokasi di Jawa Timur di Jawa Timur (Dick . 1993 a).

Tabel 4.1.  
PDRB Sektor Manufaktur Jawa Timur menurut Subsektor (Ribuan Rupiah)

Subsektor	Tahun			
	1996	1997	1999	2000
3.1	9125480.44	10142324.75	7727497.54	7755242.67
3.2	1752730.60	1851798.61	1561765.16	1568285.91
3.3	1062705.35	1109386.07	1049510.65	1139371.57
3.4	1018502.20	1083797.54	1049298.53	1087658.39
3.5	380911.22	436538.04	497390.66	617215.70
3.6	1713595.00	1355149.09	1035970.19	1024180.96
3.7	1222787.52	1321492.15	851534.13	882892.86
3.8	1170357.59	1362884.08	1094712.22	1144722.21
3.9	251198.14	277177.67	228390.80	213824.65
Total	17698268.06	18940548.00	15096069.88	15433394.92

Sumber: BPS data diolah

Dominasi industri makanan minuman dan tembakau terus bertahan sampai tahun observasi pada makalah ini (Tahun 1996, tahun 1997, tahun 1999 dan tahun 2000). Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4.1 dan tabel 4.2 yang memperlihatkan bahwa struktur industri manufaktur provinsi Jawa Timur masih tradisional yang terlihat dari dominasi subsektor makanan, minuman dan tembakau (ISIC 3.1), subsektor industri tekstil, pakaian jadi dan kulit (ISIC 3.2) dan subsektor industri barang galian non logam, kecuali minyak bumi dan batu bara (ISIC 3.6).

Dengan adanya dominasi dari subsektor makanan, minuman dan tembakau (ISIC 3.1), subsektor industri tekstil, pakaian jadi dan kulit (ISIC 3.2) dan subsektor industri barang galian non logam, kecuali minyak bumi dan batu bara (ISIC 3.6) menunjukkan bahwa industri manufaktur di Jawa Timur terspesialisasi pada industri tersebut. Hal ini dapat berimplikasi terhadap strategi dalam pembangunan industri manufaktur di Jawa Timur karena berdasarkan pandangan yang dikemukakan oleh Kuncoro (2004), spesialisasi industri pada suatu daerah dapat mendorong kemajuan industri tersebut.

Tabel 4.2.  
PDRB Sektor Manufaktur Jawa Timur menurut Subsektor (%)

Subsektor	Tahun			
	1996	1997	1999	2000
3.1	54.86%	53.55%	51.19%	50.25%
3.2	10.54%	9.78%	10.35%	10.16%
3.3	6.39%	5.86%	6.95%	7.38%

3.4	6.12%	5.72%	6.95%	7.05%
3.5	2.29%	2.30%	3.29%	4.00%
3.6	10.30%	7.15%	6.86%	6.64%
3.7	7.35%	6.98%	5.64%	5.72%
3.8	7.04%	7.20%	7.25%	7.42%
3.9	1.51%	1.46%	1.51%	1.39%
Total	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Sumber: BPS data diolah

Distribusi aktivitas industri manufaktur di Jawa Timur relatif tidak merata dan cenderung terkonsentrasi pada wilayah tertentu. Hal ini terlihat pada tabel 4.3. dan tabel 4.4. yang memperlihatkan bahwa industri manufaktur di Jawa Timur terkonsentrasi di kota Surabaya yang merupakan pusat aktivitas ekonomi di Jawa Timur. Pada tabel 4.3. dan 4.4. juga mengindikasikan bahwa industri manufaktur di Jawa Timur terkonsentrasi pada SWP I (Surabaya, Mojokerto, Sidoarjo, Lamongan, Gresik dan Lamongan).

Tabel 4.3 dan 4.4 menunjukkan bahwa kota Surabaya merupakan kota yang mendominasi Industri manufaktur di SWP I. Selain itu, dua kota industri lain yang merupakan lokasi terkonsentrasinya industri di SWP I (Sidoarjo dan Gresik) merupakan *hinterland* kota Surabaya. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Glaeser dan Khan (2003) tentang pertumbuhan dan perluasan aktivitas ekonomi perkotaan, besar kemungkinan bahwa industri manufaktur yang terkonsentrasi di SWP I (termasuk didalamnya aktivitas industri di Sidoarjo dan Gresik) terjadi karena *agglomeration effect* dari kota Surabaya.

Tabel 4.3.  
PDRB Sektor Manufaktur Kabupaten dan Kota di Jawa Timur (Ribuan Rupiah)

No.	Kabupaten/Kota	Tahun			
		1996	1997	1999	2000
1	SWP GERBANG KERTASUSILA				
	Pemkot. Surabaya	5077423.08	5585679.34	3861557.86	3885344.77
	Pemkot. Mojokerto	37225.96	39934.8	20646.74	21793.13
	Pemkab. Mojokerto	227111.16	241837.13	194839.22	201199.04
	Pemkab. Sidoarjo	2556304.4	2766851.1	2134693.25	2184686.93
	Pemkab. Lamongan	6169.8	6660.81	5349.08	5459.29
	Pemkab. Gresik	1609653.92	1294532.09	1481643.5	1595966.09
	Pemkab. Bangkalan	4356.15	4690.99	3953.86	3906.83
2	SWP MADURA & KEPULAUAN				
	Pemkab. Sampang	5115.97	5660.69	4136.01	4168.48
	Pemkab. Pamekasan	1812.62	1993.16	1779.44	1841.38
	Pemkab. Sumenep	63893.99	70401.47	47330.34	47427.87
3	SWP BANYUWANGI				
	Pemkab. Banyuwangi	212109.52	230054.93	135004.05	137985.48
4	SWP JEMBER & SEKITARNYA				
	Pemkab. Jember	105773.59	116552.94	89179.66	93212.64
	Pemkab. Bondowoso	22491.42	24519.56	16055.03	16293.55
	Pemkab. Situbondo	55136.75	60499.92	39065.16	40291.61
5	SWP PROBOLINGGO & LUMAJANG				
	Pemkot. Probolinggo	149042.31	161639.45	116914.77	120374.15
	Pemkab. Probolinggo	136141.6	147589.83	130461.62	133638.64
	Pemkab. Lumajang	83782.54	91940.41	54966.36	55742.23

6	SWP MALANG-PASURUAN				
	Pemkot. Malang	880858.93	967107.4	643976.86	649029.52
	Pemkot. Pasuruan	44030.63	49117.77	41911.01	44737.86
	Pemkab. Malang	212124.27	233079.93	202062.73	207854.58
	Pemkab. Pasuruan	1102878.68	1170292.02	962636.15	986506.1
7	SWP KEDIRI & SEKITARNYA				
	Pemkot. Kediri	3821219.06	4276281.09	3873818.05	3860350.03
	Pemkot. Blitar	24212.6	26167.63	25152.87	27709.64
	Pemkab. Kediri	198855.99	212676.78	184700.73	265839.7
	Pemkab. Blitar	7433.79	8041.03	6266.03	6306.9
	Pemkab. Trenggalek	3740.69	4113.82	2882.87	2929.23
	Pemkab. Tulungagung	367652.92	394930.43	298318.47	302653.67
	Pemkab. Jombang	90530.84	97518.48	72404.01	75442.79
	Pemkab. Nganjuk	43403.1	47048.31	27914.98	29197.8
8	SWP MADIUN & SEKITARNYA				
	Pemkot. Madiun	84651.24	93951.46	75031.18	78594.49
	Pemkab. Madiun	15932.23	17454.42	11865.65	12007.08
	Pemkab. Pacitan	3757.66	4043.92	2708.42	2652.67
	Pemkab. Ponorogo	9872.51	10881.49	10977.63	11439.09
	Pemkab. Magetan	21019.11	22751.53	13441.92	14062.9
	Pemkab. Ngawi	19807.94	21720.91	13394.47	14242.21
9	SWP TUBAN & BOJONEGORO				
	Pemkab. Tuban	363245.28	400553.41	260729.92	262244.41
	Pemkab. Bojonegoro	29495.81	31777.55	28299.98	30262.14
		17698268.1	18940548	15096069.9	15433394.9

Sumber: BPS data diolah

Tabel 4.4.

## PDRB Sektor Manufaktur Kabupaten dan Kota di Jawa Timur (%)

No.	Kabupaten/Kota	Tahun			
		1996	1997	1999	2000
1	SWP GERBANG KERTASUSILA				
	Pemkot. Surabaya	28.69%	29.49%	25.58%	25.17%
	Pemkot. Mojokerto	0.21%	0.21%	0.14%	0.14%
	Pemkab. Mojokerto	1.28%	1.28%	1.29%	1.30%
	Pemkab. Sidoarjo	14.44%	14.61%	14.14%	14.16%
	Pemkab. Lamongan	0.03%	0.04%	0.04%	0.04%
	Pemkab. Gresik	9.09%	6.83%	9.81%	10.34%
	Pemkab. Bangkalan	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%
2	SWP MADURA & KEPULAUAN				
	Pemkab. Sampang	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%
	Pemkab. Pamekasan	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%
	Pemkab. Sumenep	0.36%	0.37%	0.31%	0.31%
3	SWP BANYUWANGI				
	Pemkab. Banyuwangi	1.20%	1.21%	0.89%	0.89%
4	SWP JEMBER & SEKITARNYA				
	Pemkab. Jember	0.60%	0.62%	0.59%	0.60%
	Pemkab. Bondowoso	0.13%	0.13%	0.11%	0.11%
	Pemkab. Situbondo	0.31%	0.32%	0.26%	0.26%
5	SWP PROBOLINGGO & LUMAJANG				
	Pemkot. Probolinggo	0.84%	0.85%	0.77%	0.78%
	Pemkab. Probolinggo	0.77%	0.78%	0.86%	0.87%
	Pemkab. Lumajang	0.47%	0.49%	0.36%	0.36%
6	SWP MALANG-PASURUAN				
	Pemkot. Malang	4.98%	5.11%	4.27%	4.21%
	Pemkot. Pasuruan	0.25%	0.26%	0.28%	0.29%

	Pemkab. Malang	1.20%	1.23%	1.34%	1.35%
	Pemkab. Pasuruan	6.23%	6.18%	6.38%	6.39%
7	SWP KEDIRI & SEKITARNYA				
	Pemkot. Kediri	21.59%	22.58%	25.66%	25.01%
	Pemkot. Blitar	0.14%	0.14%	0.17%	0.18%
	Pemkab. Kediri	1.12%	1.12%	1.22%	1.72%
	Pemkab. Blitar	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%
	Pemkab. Trenggalek	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%
	Pemkab. Tulungagung	2.08%	2.09%	1.98%	1.96%
	Pemkab. Jombang	0.51%	0.51%	0.48%	0.49%
	Pemkab. Nganjuk	0.25%	0.25%	0.18%	0.19%
8	SWP MADIUN & SEKITARNYA				
	Pemkot. Madiun	0.48%	0.50%	0.50%	0.51%
	Pemkab. Madiun	0.09%	0.09%	0.08%	0.08%
	Pemkab. Pacitan	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%
	Pemkab. Ponorogo	0.06%	0.06%	0.07%	0.07%
	Pemkab. Magetan	0.12%	0.12%	0.09%	0.09%
	Pemkab. Ngawi	0.11%	0.11%	0.09%	0.09%
9	SWP TUBAN & BOJONEGORO				
	Pemkab. Tuban	2.05%	2.11%	1.73%	1.70%
	Pemkab. Bojonegoro	0.17%	0.17%	0.19%	0.20%

Sumber: BPS data diolah

Selain terkonsentrasi di SWP I, industri manufaktur di Jawa Timur juga terkonsentrasi di SWP VII Kediri dan Sekitarnya serta SWP VI Malang-Pasuruan. Pusat pertumbuhan industri manufaktur dari SWP VII adalah Kota Kediri yang merupakan kota dengan peranan sektor industri manufaktur terbesar kedua di Jawa Timur. Dominasi sektor industri manufaktur terutama pada ISIC 31 (subsektor industri makanan, minuman dan tembakau) di kota Kediri tidak terlepas dari adanya Gudang Garam, yang merupakan industri rokok terbesar di Indonesia (Young, 1993; Kuncoro dan Sumarno, 2003).

Dalam industri manufaktur, kontribusi yang diberikan oleh SWP VI adalah terbesar ketiga setelah SWP 1 dan SWP 7, Pusat pertumbuhan SWP VI adalah kota Malang dan didukung oleh industrialisasi di Kabupaten Pasuruan. Seperti halnya SWP lain di Jawa Timur, SWP VI cenderung didominasi oleh industri makanan, minuman dan tembakau dengan kontribusi sebesar 51,09% (tabel 5 lampiran). Kontribusi yang diberikan SWP VI terhadap PDRB industri makanan, minuman dan tembakau cukup besar Berdasarkan oleh data pada tabel 1 (lampiran) yang menyebutkan bahwa 12,54% PDRB industri manufaktur Jawa Timur terkonsentrasi di wilayah tersebut, yang merupakan kontribusi dari PDRB subsektor industri makanan, minuman dan tembakau terbesar ketiga di Jawa Timur setelah SWP VII dan SWP I.

#### 4.2. Determinan Industri Manufaktur Jawa Timur

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan industri manufaktur di Jawa Timur. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Santosa dan McMichael (2004), beberapa faktor tersebut antara lain adalah faktor kependudukan, ketenagakerjaan maupun Infrastruktur, termasuk di dalamnya infrastruktur sektor telekomunikasi, transportasi dan energi. Selain itu, kinerja industri manufaktur di Jawa Timur tidak terlepas dari peranan Sektor keuangan dan juga dari dukungan iklim investasi yang baik.

Kependudukan dan ketenagakerjaan merupakan determinan dari industri manufaktur. Kondisi kependudukan sangat mempengaruhi local demand terhadap output industri manufaktur di Jawa Timur, sedangkan kondisi ketenagakerjaan sangat mempengaruhi produktivitas industri manufaktur di Jawa Timur. Oleh karena itu, pada bagian selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut tentang kondisi kependudukan dan ketenagakerjaan di Jawa Timur.

Ketika kemerdekaan diproklamasikan, penduduk Jawa Timur berjumlah sekitar 20 juta jiwa. Seperti halnya provinsi-provinsi lain, Jawa Timur mengalami "*baby boom*" setelah era kemerdekaan, sehingga terjadi peningkatan jumlah penduduk (Hull, 1993). Jumlah penduduk provinsi Jawa Timur pada tahun 1989 adalah 29,188.852 jiwa, sedangkan pada tahun 1990 menurut sensus penduduk meningkat menjadi 32.48 juta jiwa. Menurut catatan SUSENAS 1994 dan data BPS, jumlah penduduk Jawa Timur tahun 1994 meningkat menjadi sebesar 33.423.234 jiwa dengan tingkat kepadatan rata - rata 689 jiwa / km<sup>2</sup> (BPS, berbagai terbitan).

Kepadatan penduduk rata-rata di Jawa Timur pada tahun 1995 meningkat menjadi 705 jiwa / km<sup>2</sup>. Tetapi pada tahun 1997 kepadatan penduduk rata-rata menurun menjadi 695 jiwa / km<sup>2</sup>. Selanjutnya sampai tahun 2002 kepadatan penduduk rata-rata cenderung mengalami peningkatan (BPS, berbagai terbitan). Secara umum, kepadatan penduduk Jawa Timur di perkotaan cenderung lebih tinggi daripada pedesaan. Hal ini terjadi karena urbanisasi yang disebabkan proses aglomerasi perkotaan (Kuncoro, 2000).

Dengan 20% penduduk yang tinggal di kawasan perkotaan, Jawa Timur merupakan provinsi yang lebih bersifat kota apabila dibandingkan dengan gabungan Jawa Tengah dan Jogjakarta, meskipun masih jauh apabila dibandingkan dengan dengan gabungan Jakarta dan Jawa Barat (Mackie, 1993). Meskipun demikian, Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia (Jones, 1993)

Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, Jawa Timur mencerminkan kecenderungan demografis yang terjadi di tingkat nasional. Meskipun demikian, Jawa Timur memiliki ciri-ciri khusus yang membuat kecenderungan-kecenderungan yang terjadi di pasar kerja tidak semata-mata merupakan replika dari kecenderungan tingkat nasional (Jones, 1993). Kondisi demografis tersebut sangat berpengaruh terhadap kondisi ketenagakerjaan di Jawa Timur.

Selama tiga puluh dua tahun berkuasanya pemerintahan orde baru, telah mengubah struktur ketenagakerjaan di Indonesia. Sumbangan lapangan kerja dari industri primer (pertanian, kehutanan, perburuan dan penangkapan ikan) telah mengalami penurunan, jenis pekerjaan semakin bertambah banyak, dan tingkat pendidikan angkatan kerja semakin meningkat (Hugo et al, 1987). Meskipun terjadi shock karena adanya krisis ekonomi, karakteristik tersebut masih mencerminkan kondisi ketenagakerjaan Indonesia sampai berakhirnya krisis dan pergantian pemerintahan (Sitanggang dan Nachrowi, 2004).

Menurunnya kontribusi tenaga kerja pada industri primer di Jawa Timur disertai dengan turunnya proporsi angkatan kerja yang tinggal di pedesaan. Pada saat bersamaan, struktur ketenagakerjaan di pedesaan menjadi semakin kompleks. Hal tersebut disertai perpindahan rutin yang dilakukan oleh tenaga kerja dalam bekerja di desa dan bekerja di kota (Jones, 1993).

Kompleksitas struktur ketenagakerjaan yang diikuti oleh perpindahan rutin tidak terlepas karena adanya efek dari industrialisasi pada kawasan perkotaan. Selain berdampak terhadap mobilitas rutin tenaga kerja, industrialisasi perkotaan juga mendorong



terjadinya proses urbanisasi, sehingga tenaga kerja di Jawa Timur semakin cenderung untuk terkonsentrasi pada sektor industri di perkotaan (Mackie, 1993). Hal ini diikuti dengan perluasan wilayah perkotaan yang disertai peningkatan ketersediaan infrastruktur pada kawasan perkotaan di Jawa Timur (Kuncoro, 2000; Dick, 1993 b).

Ketersediaan infrastruktur dan pelayanan publik sangat berpengaruh terhadap proses industrialisasi pada suatu daerah. Industrialisasi akan terpengaruh karena kedua hal tersebut berkaitan biaya operasional dari industri yang berlokasi pada wilayah tersebut, termasuk didalamnya adalah biaya transportasi (Glaeser dan Kohlase, 2003). Oleh karena itu pada bagian selanjutnya akan didemakalahkan tentang sistem infrastruktur dan transportasi

Dukungan infrastruktur berupa pelabuhan laut, pelabuhan udara, jalan raya, sarana informasi dan telekomunikasi serta pembangkit listrik sangat berpengaruh terhadap perkembangan industri manufaktur di provinsi Jawa Timur. Secara umum, infrastruktur transportasi (pelabuhan laut dan pelabuhan udara) Jawa Timur terkonsentrasi di kota Surabaya, yang merupakan kota pelabuhan utama di kawasan timur Indonesia. Selain itu, kota Surabaya juga merupakan pusat komunikasi dan informasi di Jawa Timur sekaligus konsumen listrik terbesar di Jawa Timur. Pada bagian bagian ini akan diuraikan lebih lanjut tentang infrastruktur yang dapat mendukung industrialisasi di Jawa Timur antara lain adalah infrastruktur informasi dan telekomunikasi; transportasi; dan energi listrik.

Kemajuan teknologi dibidang komunikasi di Jawa Timur telah diterapkan dan hampir menjangkau wilayah provinsi. Sementara itu untuk telex, faximile sudah menyebar pada kota - kota besar dan beberapa kota sedang di Jawa Timur, khususnya untuk kegiatan pemerintahan pengusaha SSB dan telex telah berjalan sangat efektif. Prasarana dan sarana telepon juga telah mudah dijangkau bahkan pada tingkat kelurahan/desa. Selain itu, menjamurnya penggunaan telepon genggam juga meningkatkan mobilitas dalam komunikasi masyarakat. Melalui penggunaan sarana telekomunikasi, tampak, bahwa perkembangan telekomunikasi di Jawa Timur. Baik untuk bisnis maupun sosial cukup pesat dan dapat dirasakan potensinya dalam mendukung pembangunan dan perkembangan daerah sampai ke pelosok

Adanya kemajuan dibidang komunikasi didukung oleh kemajuan dibidang informasi. Adanya stasiun televisi swasta lokal di Jawa Timur, yang didukung jaringan cukup luas, serta siaran televisi nasional yang mencapai wilayah kabupaten di Jawa Timur mempermudah masyarakat dalam memperoleh akses informasi. Selain itu didukung oleh banyaknya radio, maupun surat kabar yang beraneka ragam yang mempermudah *transfer of knowledge* kepada masyarakat. Dengan adanya kemajuan sarana informasi berpotensi untuk mendukung peningkatan kualitas *human capital* dan *social capital* di dalam mendukung perekonomian di Jawa Timur.

Secara Keseluruhan, sistem transportasi di Jawa Timur terdiri atas transportasi jalan raya, kereta api, laut/feri, dan Udara. Secara keseluruhan sistem transportasi jalan raya. Prasarana dan sarana transportasi yang ada, pada prinsipnya telah menjangkau hampir seluruh Jawa Timur sampai ke desa – desa. Infrastruktur sarana transportasi yang dapat mendukung industri manufaktur di Jawa Timur antara lain adalah jalan raya, jembatan, kereta api, transportasi udara dan transportasi laut.

Ketersediaan sarana transportasi darat sangat berpengaruh terhadap mobilitas dari aktivitas ekonomi di Jawa Timur. sarana transportasi darat yang dimaksud mencakup sarana transportasi jalan dan jembatan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh

Santosa dan McMichael (2004), pada saat ini terdapat beberapa strategi utama yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Timur dalam peningkatan kapasitas Jalan dan Jembatan untuk mendukung pembangunan ekonomi di Jawa Timur antara lain: Pembangunan jembatan penyeberangan Surabaya-Madura; meningkatkan kapasitas jalur lalu lintas pada Jawa Timur bagian selatan; dan pembangunan jalan tol Surabaya-Mojokerto.

Kapasitas jalan tersebut didukung oleh jaringan rel kereta api pada dasarnya menjangkau sebagian besar wilayah di Jawa Timur, namun demikian jaringan rel kereta api yang dioperasikan hanya sebagian saja, karena alasan kelayakan dan masalah pemeliharaan jaringan kereta api yang tidak dioperasikan sangat berat karena cukup banyaknya pembangunan pemukiman yang mengarah pada batas sempadan dari rel kereta api. Pada dasarnya, pengoperasian seluruh jalur kereta api akan dapat meningkatkan akses transportasi yang dapat mendukung sektor manufaktur di Jawa Timur.

Orientasi pengembangan sarana kereta api jangka panjang diarahkan pada pendaya gunaan prasarana dan sarana yang ada dengan ditambah pengadaan prasarana dan sarana yang baru dengan teknologi yang lebih baik. Selain itu akan didukung oleh perbaikan dan pengaktifan dari jalur-jalur kereta api terutama jalur strategis yang dapat mendukung pembangunan ekonomi di Jawa Timur.

Prasarana dan sarana transportasi udara di Jawa Timur pada hakekatnya bukan hanya ditunjukkan untuk pelayanan kegiatan intra regional namun juga antar provinsi dan internasional. Hal ini dibuktikan dengan adanya pelabuhan udara Juanda di Sidoarjo yang merupakan pelabuhan udara utama di Jawa Timur dan merupakan pelabuhan udara tersibuk kedua di Indonesia. Selain di kota Surabaya, di Malang juga terdapat pelabuhan udara yang berfungsi sebagai pelabuhan penerbangan Militer dan akan ditingkatkan penggunaannya sebagai pelabuhan udara komersial. Disamping itu terdapat pula penerbangan udara Iswahyudi di Madiun untuk kepentingan Militer dan Trunojoyo di Sumenep untuk pelabuhan perintis.

Menurut Ray and Blankfeld (2002), sistem transportasi laut secara Nasional menempatkan pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya) sebagai salah satu dari empat pelabuhan Utama di Indonesia yang didukung adanya terminal peti kemas yang berstandar internasional. Usaha yang telah dilakukan dalam rangka mengisi peranan tersebut sampai saat ini masih terbatas pada peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan jasa angkutan laut, sehingga dapat menunjang kelancaran arus barang dan meningkatkan pertumbuhan perdagangan antar pulau serta ekspor/import. Di samping itu Jawa Timur juga dilengkapi dengan pelabuhan laut pembantu yang ada di Meneng, Gresik, Probolinggo, Panarukan, Kalianget, Pasuruan, Lamongan dan Tuban.

Pemenuhan kebutuhan listrik merupakan salah satu sumbangan penting terhadap pembangunan industri di Jawa Timur. Akan tetapi, pemenuhan kebutuhan listrik tersebut membutuhkan banyak biaya, sehingga menjadi salah satu keterbatasan dalam peningkatan kapasitas dalam memenuhi kebutuhan listrik. Menurut Husin (1993), karena adanya keterbatasan tersebut, pembangunan dan peningkatan kapasitas kelistrikan di Jawa Timur cenderung tidak seimbang dengan banyaknya permintaan listrik di Jawa Timur. Santosa dan McMichael (2004) menambahkan bahwa keterbatasan dalam pemenuhan energi listrik tersebut menjadi salah satu kendala dalam pengembangan industri manufaktur di Jawa Timur.

Kota Surabaya memiliki posisi yang dominan dalam sektor keuangan dan perbankan di Jawa Timur, dimana sebagian besar bank yang ada di Jawa Timur, baik bank komersial milik pemerintah, swasta domestik maupun swasta asing berlokasi di kota Surabaya. Menurut Santosa dan McMichael (2004), Bank komersial swasta domestik di Surabaya mengontrol sekitar enam puluh persen dari *bank deposit* dari sektor perbankan di Jawa Timur. Bank Mandiri, BCA dan Bank Negara Indonesia (BNI) merupakan tiga bank dengan peranan terbesar di Jawa Timur. Bank Swasta asing kurang begitu berperan dalam sektor perbankan di Jawa Timur. Bank swasta asing yang memiliki kantor cabang di Jawa Timur, antara lain ABNAmro Bank, Standard Chartered Bank, HSBC, Citibank dan Australia's Commonwealth Bank lebih tersegmentasi dalam melayani perusahaan-perusahaan dengan beberapa produk antara lain credit cards, kredit ekspor impor maupun kredit investasi.

Iklim investasi merupakan salah satu determinan pendukung pertumbuhan industri manufaktur di Jawa Timur. Studi yang dilakukan oleh Jawa Pos Institute Pro Otonomi (Santosa dan McMichael, 2004) menunjukkan bahwa tiga dari kabupaten dan kota di Jawa Timur merupakan daerah yang secara aktif mendorong masuknya investasi. Tiga kabupaten dan kota tersebut adalah Kediri, Malang dan Sidoarjo, yang termasuk dari 20 wilayah yang paling atraktif dalam menarik masuknya investasi di Indonesia. Dengan adanya usaha yang aktif dalam menarik investasi daerah tersebut, diharapkan dapat meningkatkan masuknya investasi termasuk didalamnya investasi pada sektor manufaktur di Jawa Timur.

Menurut Santosa dan McMichael (2004), perencanaan pembangunan di Jawa Timur juga memiliki pengaruh yang kuat dalam menarik investasi pada suatu kawasan. Konsep kawasan industri terpadu merupakan suatu kebijakan yang mendorong masuknya investasi domestik maupun investasi asing pada sektor industri di suatu wilayah. Kawasan industri terpadu di Jawa Timur antara lain adalah: SIER (*Surabaya Industrial Estate Rungkut*) dan kawasan industri Tandes di Surabaya, Ngoro Industri Persada (NIP) di Mojokerto, PIER (*Pasuruan Industrial Estate Rembang*) di Pasuruan, dan juga KIM (Kawasan Industri Maspion) yang merupakan kawasan industri yang dibangun oleh Maspion Group yang berlokasi di Surabaya and Gresik. Adanya kawasan industri terpadu di Jawa Timur dapat mendukung industrialisasi di Jawa Timur.

#### 4.3. Spesialisasi dan karakteristik Industri Manufaktur di Jawa Timur

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Landiyanto (2004), ditemukan hal yang menarik bahwa industri manufaktur kota Surabaya didominasi oleh industri makanan, minuman dan tembakau (ISIC 3.1) sama halnya dengan provinsi Jawa Timur, sehingga dapat diduga adanya kesamaan antara struktur ekonomi kota Surabaya dengan struktur ekonomi Jawa Timur yang juga didominasi industri tersebut. Untuk membuktikan hal tersebut, perlu dianalisis struktur ekonomi kota Surabaya dengan provinsi Jawa Timur maupun kabupaten dan kota di Jawa Timur sebagai pembandingan.

Pada tabel 4.5 diperlihatkan krugman Spesialisasi indeks ( $K_{SPEC}$ ) pada wilayah SWP di Jawa Timur. Nilai tertinggi diperlihatkan oleh SWP IX (Kabupaten Tuban dan Bojonegoro) yang menunjukkan bahwa SWP tersebut adalah merupakan wilayah yang terspesialisasi secara relatif apabila dibandingkan dengan SWP lain di Jawa Timur dan memiliki perbedaan struktur industri yang paling besar apabila dibandingkan dengan SWP lain dengan struktur industri provinsi Jawa Timur sebagai *benchmark*.

Tabel 4.5.  
*K-Spec* Indeks berdasarkan SWP di Jawa Timur

SWP	1996	1997	1999	2000
1 SWP GERBANG KERTASUSILA	0.422965	0.415196	0.471939	0.467876
2 SWP MADURA & KEPULAUAN	0.67746	0.670438	0.668849	0.687199
3 SWP BANYUWANGI	0.815822	0.774364	0.737099	0.755895
4 SWP JEMBER & SEKITARNYA	0.787401	0.735005	0.752169	0.758357
5 SWP PROBOLINGGO & LUMAJANG	0.539026	0.509115	0.487199	0.499469
6 SWP MALANG-PASURUAN	0.45846	0.434417	0.487413	0.47164
7 SWP KEDIRI & SEKITARNYA	0.731197	0.699554	0.759319	0.743795
8 SWP MADIUN & SEKITARNYA	0.515857	0.444195	0.583976	0.586465
9 SWP TUBAN & BOJONEGORO	1.278696	1.293291	1.21289	1.199614

Sumber: BPS data diolah

Nilai terendah pada tabel 4.5 terlihat pada SWP I yang menunjukkan bahwa SWP I Gerbang Kertasusila merupakan wilayah yang paling memiliki kesamaan struktur dengan provinsi Jawa Timur. Hal ini ditunjukkan dengan  $K_{SPEC}$  yang secara relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan SWP lain di Jawa Timur. Selain SWP I, SWP lain yang memiliki banyak kesamaan dengan struktur ekonomi Jawa Timur adalah SWP VI Malang-Pasuruan.

Sama halnya dengan SWP I, apabila melihat pada  $K_{SPEC}$  indeks di kota Surabaya (Tabel 4.6) yang merupakan pusat pertumbuhan di SWP 1 sekaligus merupakan ibukota provinsi Jawa Timur, dapat terlihat bahwa  $K_{SPEC}$  kota Surabaya menunjukkan nilai terendah apabila dibandingkan dengan kabupaten dan kota lain di Jawa Timur. hal tersebut dapat diartikan bahwa seperti halnya SWP 1, struktur industri manufaktur kota Surabaya memiliki banyak kesamaan dengan struktur ekonomi Jawa Timur.

Begitu juga apabila melihat  $K_{SPEC}$  indeks pada kota Malang (Tabel 4.6), relatif tidak jauh berbeda dengan SWP 6 Malang-Pasuruan (Tabel 4.5), memiliki struktur ekonomi yang hampir sama dengan struktur ekonomi Jawa Timur. Dengan dua contoh kota yang memiliki struktur ekonomi yang mirip dengan SWP sebagai merupakan area ekonomi dan kebijakan kedua kota tersebut, dapat dilihat perbedaan struktur industri kedua kota tersebut dengan SWP maupun perbandingan struktur industri kedua kota tersebut dengan struktur industri Jawa Timur.

Krugman (1991) menyatakan bahwa dalam menentukan lokasi, industri manufaktur cenderung dinamis dan cenderung melakukan translokasi. Apabila didasarkan pada pengamatan empiris yang dilakukan oleh Elisson dan Glaeser (1999), industri manufaktur cenderung melakukan translokasi pada lokasi yang memiliki struktur ekonomi yang tidak jauh berbeda dengan lokasi sebelumnya dengan *natural advantages* dan *externalities* yang lebih menguntungkan. Oleh karena itu perlu diketahui perbedaan struktur antar SWP maupun antar kabupaten kota apabila dianalisis secara bilateral sehingga diketahui karakteristik masing-masing wilayah yang memungkinkan untuk terjadi translokasi industri. Dalam melihat derajat perbedaan struktur industri secara bilateral digunakan indeks spesialisasi bilateral Krugman ( $B_{SPEC}$ ).

Tabel 4.6.  
*K-Spec* Indeks berdasarkan Kabupaten dan Kota di Jawa Timur

SWP	Kabupaten/Kota	1996	1997	1999	2000	
1	Pemkot. Surabaya	0.384997	0.385777	0.418677	0.41539	
	Pemkot. Mojokerto	1.233114	1.162976	1.032661	0.976525	
	Pemkab. Mojokerto	0.651055	0.632577	0.779692	0.780236	
	Pemkab. Sidoarjo	0.835577	0.837048	0.864926	0.872771	
	Pemkab. Lamongan	0.546031	0.538008	0.677583	0.6538	
	Pemkab. Gresik	1.103919	1.083711	1.165255	1.129209	
	Pemkab. Bangkalan	1.046118	1.049701	1.197774	1.160913	
	2	Pemkab. Sampang	1.445872	1.390125	1.283825	1.27162
		Pemkab. Pamekasan	0.796976	0.730645	0.463236	0.493133
Pemkab. Sumenep		0.781855	0.767673	0.762219	0.775444	
3	Pemkab. Banyuwangi	0.815822	0.800244	0.737099	0.755895	
	4	Pemkab. Jember	0.881959	0.847842	0.837878	0.839541
Pemkab. Bondowoso		0.84868	0.792413	0.713849	0.721072	
Pemkab. Situbondo		0.743437	0.733612	0.782946	0.807038	
5	Pemkot. Probolinggo	0.501832	0.501801	0.458267	0.468047	
	Pemkab. Probolinggo	0.800059	0.7895	0.787233	0.803466	
	Pemkab. Lumajang	0.811108	0.802605	0.720539	0.730363	
6	Pemkot. Malang	0.697036	0.692036	0.696529	0.712078	
	Pemkot. Pasuruan	1.374346	1.388081	1.440339	1.430934	
	Pemkab. Malang	0.461035	0.450666	0.43867	0.419665	
	Pemkab. Pasuruan	0.931661	0.915576	0.95466	0.929256	
7	Pemkot. Kediri	0.966858	0.953035	0.974235	0.992878	
	Pemkot. Blitar	1.558004	1.515155	1.600669	1.612376	
	Pemkab. Kediri	1.214974	1.223489	1.210484	1.27721	
	Pemkab. Blitar	0.690234	0.649663	0.649815	0.646967	
	Pemkab. Trenggalek	0.710699	0.463494	0.426121	0.420446	
	Pemkab. Tulungagung	1.387928	1.393369	1.467218	1.46128	
	Pemkab. Jombang	0.582655	0.575168	0.53118	0.548814	
	Pemkab. Nganjuk	0.842392	0.783424	0.66314	0.686502	
	8	Pemkot. Madiun	0.824607	0.858599	1.009036	1.028404
Pemkab. Madiun		0.598305	0.427048	0.389998	0.407004	
Pemkab. Pacitan		0.966044	0.953151	0.871962	0.837346	
Pemkab. Ponorogo		0.834926	0.849255	1.017638	1.009955	
Pemkab. Magetan		0.843651	0.785405	0.720246	0.746327	
Pemkab. Ngawi		0.875702	0.809428	0.715018	0.713343	
9	Pemkab. Tuban	1.393264	1.3577	1.318919	1.308901	
	Pemkab. Bojonegoro	0.936471	0.894224	1.121762	1.123013	

Sumber: BPS data diolah

#### 4.4. Konsentrasi Spasial dan Distribusi Lokasional

Berdasarkan survei literatur dan penelitian sebelumnya pada tinjauan pustaka telah dijelaskan bahwa terdapat perbedaan makna antara spesialisasi dan konsentrasi. Spesialisasi pada industri manufaktur di Jawa Timur telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, oleh karena itu pada bagian selanjutnya akan dijelaskan tentang konsentrasi spasial dari industri manufaktur berdasarkan Subsektor di provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan Herfindahl indeks menurut SWP, industri manufaktur di Jawa Timur terkonsentrasi pada ISIC 37 (Industri Logam Dasar). Pada tahun observasi (Tabel 4.7), industri manufaktur dengan ISIC 37 memiliki Herfindahl indeks menurut SWP yang terbesar yang menunjukkan bahwa industri tersebut memiliki distribusi spasial yang paling tidak merata dan cenderung terkonsentrasi secara spasial pada suatu SWP di Jawa Timur. Industri pada subsektor industri logam dasar (ISIC 37) tersebut terkonsentrasi pada SWP I (Tabel 1, 2, 3 dan 4 lampiran).

Tabel 4.7.

 $H^S$  Industri Manufaktur SWP di Jawa Timur

ISIC	1996	1997	1999	2000
3.1	0.32694	0.3285	0.36645	0.36345
3.2	0.37152	0.36925	0.37121	0.37062
3.3	0.64666	0.6468	0.63903	0.64885
3.4	0.68512	0.68061	0.68039	0.67986
3.5	0.66341	0.66504	0.6196	0.4959
3.6	0.5372	0.43061	0.51049	0.50963
3.7	0.98206	0.98112	0.97932	0.97953
3.8	0.79557	0.79341	0.77066	0.76703
3.9	0.81904	0.80995	0.76972	0.76584
3	0.37282	0.36463	0.36492	0.3656

Sumber: BPS data diolah

Selain pada ISIC 37, industri manufaktur di Jawa Timur terkonsentrasi pada ISIC 39 (industri pengolahan lainnya). Hal ini ditunjukkan oleh Herfindahl indeks menurut SWP dari industri tersebut yang tertinggi kedua di Jawa Timur (Tabel 4.7). Industri pada subsektor industri pengolahan lainnya (ISIC 39) tersebut terkonsentrasi di SWP I Gerbang Kertasusila (Tabel 1, 2, 3 dan 4 lampiran).

Berdasarkan Herfindahl indeks menurut kabupaten dan kota, industri manufaktur di Jawa Timur terkonsentrasi pada ISIC 39 (Industri pengolahan lainnya). Pada tahun observasi, Industri manufaktur dengan ISIC 39 memiliki Herfindahl indeks berdasarkan kabupaten kota yang terbesar (Tabel 4.12.) yang menunjukkan bahwa industri tersebut memiliki distribusi spasial yang paling tidak merata dan cenderung terkonsentrasi pada suatu kabupaten kota. Industri pada subsektor industri pengolahan lainnya (ISIC 39) tersebut terkonsentrasi di kota Surabaya (Tabel 9, 10, 11 dan 12 lampiran).

Tabel 4.8.

 $H^S$  Industri Manufaktur Kabupaten dan Kota di Jawa Timur

ISIC	1996	1997	1999	2000
3.1	0.25416	0.25553	0.31143	0.30643
3.2	0.25172	0.25145	0.26721	0.26649

3.3	0.28578	0.28665	0.2826	0.29676
3.4	0.31499	0.31152	0.27741	0.27804
3.5	0.29565	0.29618	0.28151	0.23194
3.6	0.23684	0.23651	0.21795	0.21808
3.7	0.51109	0.51189	0.52859	0.52578
3.8	0.35457	0.35176	0.34071	0.33202
3.9	0.70172	0.68974	0.62629	0.6142
3	0.16613	0.16774	0.16833	0.16421

Sumber: BPS data diolah

Selain pada ISIC 39, industri manufaktur di Jawa Timur terkonsentrasi pada ISIC 37 (Industri Logam dasar). Hal ini ditunjukkan oleh Herfindahl indeks berdasarkan kabupaten dan kota dari industri tersebut (Tabel 4.8) yang tertinggi kedua di Jawa Timur. Industri pada subsektor industri logam dasar (ISIC 37) tersebut terkonsentrasi di kota Surabaya (lampiran Tabel 9,10, 11 dan 12). Hal itu seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa Ellison dan Glaeser mengemukakan peranan *knowledge spillover* dan *natural advantages* dalam mendorong terjadinya konsentrasi spasial.

Berdasarkan SWP, kontribusi terbesar *natural advantage* dan *knowledge spillover* pada konsentrasi spasial industri manufaktur di Jawa Timur terlihat pada ISIC 37 (Industri logam dasar) yang memiliki Ellison-Glaeser indeks berdasarkan SWP yang terbesar (Tabel 4.9). Industri pada subsektor industri pengolahan lainnya (ISIC 37) tersebut terkonsentrasi SWP 1 (lampiran Tabel 1, 2, 3 dan 4) dimana SWP 1 merupakan *agglomeration area* dari kota Surabaya (Dick 1993 a; 1993 b).

Tabel 4.9.

$\gamma_{EG}$  Industri Manufaktur SWP di Jawa Timur

ISIC	1996	1997	1999	2000
3.1	0.08286	0.06846	0.11766	0.11884
3.2	0.14051	0.12681	0.12556	0.12538
3.3	0.11116	0.12792	0.15144	0.15617
3.4	0.10377	0.11629	0.15701	0.15403
3.5	0.14483	0.16326	0.17845	0.03121
3.6	0.10774	0.10583	0.14796	0.14645
3.7	0.39067	0.41413	0.46439	0.46109
3.8	0.24101	0.26003	0.2898	0.28409
3.9	0.23245	0.24514	0.24998	0.24446

Sumber: BPS data diolah

Berdasarkan kabupaten kota, kontribusi terbesar *natural advantage* dan *knowledge spillover* pada konsentrasi spasial industri manufaktur di Jawa Timur terlihat pada ISIC 39 (Industri pengolahan lainnya) yang memiliki Ellison-Glaeser berdasarkan kabupaten kota yang terbesar (Tabel 4.10). Industri pada subsektor industri pengolahan lainnya (ISIC 39) tersebut terkonsentrasi pada kota Surabaya (Tabel 9, 10, 11 dan 12 lampiran).

Tabel 4.10.

$\gamma_{EG}$  Industri Manufaktur Kabupaten dan Kota di Jawa Timur

ISIC	1996	1997	1999	2000
3.1	0.06363	0.06225	0.08942	0.06712

3.2	0.28073	0.28538	0.30157	0.27857
3.3	0.26468	0.26953	0.28083	0.26663
3.4	0.2725	0.27302	0.24427	0.21771
3.5	0.17962	0.18205	0.22154	0.16895
3.6	0.1287	0.13039	0.15975	0.13874
3.7	0.25262	0.25571	0.3152	0.28035
3.8	0.13694	0.13748	0.17161	0.13874
3.9	0.42725	0.41846	0.42628	0.3833

Sumber: BPS data diolah

#### 4.5. Keterkaitan antara Spesialisasi dan Konsentrasi Spasial

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses dimana suatu masyarakat menciptakan suatu lingkungan yang mempengaruhi hasil-hasil indikator ekonomi seperti kenaikan kesempatan kerja. Lingkungan yang dimaksud sebagai sumber daya perencanaan meliputi lingkungan fisik, peraturan dan perilaku (Blakley, 1989). Pada konteks perencanaan pembangunan ekonomi daerah, makna perencanaan pembangunan bukanlah perencanaan dari suatu daerah akan tetapi merupakan perencanaan untuk suatu daerah, yang bisa dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki berbagai sumber daya publik yang tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan sumber-sumber daya swasta yang bertanggung jawab (Kuncoro, M., 2004).

Pada konteks pembangunan sektor industri manufaktur di suatu daerah, strategi yang berorientasi spasial dan regional merupakan salah satu faktor kunci yang dapat mendukung pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan industri manufaktur (Kuncoro, M. 2002). Strategi ini didasarkan atas *localization economies* dan *urbanization economies* didukung oleh keterkaitan antar sektor baik keterkaitan vertikal maupun horisontal (JICA, 2004a; 2004b; Fujita et al 1999; Fujita dan Thiesse 2002).

Kerangka dalam rumusan strategi tersebut adalah lokasi terkonsentrasinya aktivitas ekonomi dan spesialisasi wilayah. Kedua hal tersebut didukung oleh analisis tentang spesialisasi relatif baik dengan dengan agregat wilayah maupun secara bilateral dan didukung oleh analisis tentang konsentrasi spasial secara sektoral dengan tidak mengesampingkan peranan natural advantages masing-masing wilayah (Ellison dan Glaeser 1997; 1999; Midelfart-Knarvik et al, 2000).

Pada tinjauan pustaka telah dijelaskan bahwa dengan adanya konsentrasi spasial, akan menciptakan keuntungan yang berupa penghematan lokalisasi dan penghematan urbanisasi yang merupakan faktor pendorong terjadinya agglomerasi. Penghematan lokalisasi berkaitan dengan eksternalitas yang terjadi pada suatu industri telah memunculkan fenomena kluster industri, yang sering disebut *industrial cluster* versi Marshal atau *industrial districts*. Pada konteks industri manufaktur di Jawa Timur, dapat dijumpai berbagai fenomena *industrial district*, yang merupakan kluster yang terjadi secara alami. Pada umumnya *industrial district* di Provinsi Jawa Timur berbentuk sentra industri kecil dan rumah tangga.

Pada sisi lain, kluster pada industri manufaktur yang merupakan obyek observasi makalah ini di provinsi Jawa Timur, sebagian besar berbentuk *industrial complex cluster*, yang tidak terjadi secara alami dan membutuhkan investasi maupun campur tangan oleh



pemerintah maupun institusi lain yang terkait dalam membangun relationship dengan berdasarkan rasionalitas. Pada umumnya kluster ini berbentuk kawasan industri yang didukung oleh infrastruktur yang memadai.

Pada sisi lain, pada kawasan pedesaan banyak ditemui *social network cluster* terutama pada industri kecil dan rumah tangga yang mengandalkan *interpersonal relationship* berdasarkan persamaan sejarah maupun budaya. Di Provinsi Jawa Timur, secara umum terdapat banyak kesamaan antara *industrial district* dengan *social network cluster*, dimana pada *social network cluster* tidak semata-mata terbentuk karena penghematan lokalisasi, akan tetapi lebih disebabkan oleh kesamaan minat, sejarah dan budaya yang didasari oleh hubungan sosial.

Apabila berdasarkan aktivitas industri secara spasial, Industri Manufaktur di Provinsi Jawa Timur terkonsentrasi pada tiga SWP yaitu SWP I Gerbang Kertasusila, SWP VI Malang – Pasuruan dan SWP VII Kediri dan sekitarnya. Data pada tahun 1996 menunjukkan bahwa 53,78% tenaga kerja industri manufaktur besar dan menengah provinsi Jawa Timur terkonsentrasi pada SWP I. Selain itu, data tahun 1996 juga menunjukkan bahwa 25,75% kontribusi PDRB industri manufaktur provinsi Jawa Timur berasal dari SWP VII dan 12,66% PDRB industri manufaktur provinsi Jawa Timur berasal dari SWP VI (data pada lampiran Tabel 1).

Industri manufaktur SWP I (Gerbang Kertasusila), cenderung didominasi oleh industri makanan, minuman dan tembakau dengan kontribusi sebesar 32,6% (tabel 5 lampiran). Hasil analisis *LQ* tahun 1996 pada subsektor makanan minuman dan tembakau di SWP I (Lampiran Tabel 17) menunjukkan nilai sebesar 0,6323. Hasil analisis *LQ* tersebut mengindikasikan bahwa subsektor tersebut bukan merupakan subsektor unggulan wilayah tersebut.

Akan tetapi perlu dianalisis lebih jauh tentang efektivitas *LQ* dalam menentukan industri unggulan karena, berdasarkan skala, dan potensi, seharusnya industri dengan ISIC 3.1 adalah merupakan industri unggulan di SWP I. Argumen tersebut didukung data pada Tabel 1 dan Tabel 2 (lampiran) yang menunjukkan bahwa meskipun terus mengalami penurunan, kontribusi dari PDRB subsektor industri makanan, minuman dan tembakau di SWP I terbesar kedua di Jawa Timur setelah SWP VII Kediri dan sekitarnya. Rendahnya nilai *LQ* pada industri tersebut di SWP I terjadi karena besarnya skala Industri manufaktur di SWP I sehingga peranan industri dengan ISIC 3.1 di SWP I kurang dominan apabila dibandingkan dengan peran industri dengan ISIC 3.1 di SWP lain. Pada dasarnya, industri dengan ISIC 3.1 masih dapat dikembangkan di SWP I karena didukung oleh skala ekonomi dan skala industri dari SWP I.

Secara keseluruhan besarnya skala industri manufaktur di SWP I tidak terlepas dari peranan kota Surabaya sebagai pusat industri, perdagangan dan jasa di Jawa Timur. Studi yang dilakukan oleh Dick (1993 b) menunjukkan bahwa peranan Surabaya sebagai pusat industri manufaktur telah ada sejak jaman dimulainya revolusi industri dan sejak saat itu Surabaya berkembang menjadi pusat industri di Jawa Timur dan juga menjadi penyangga industrialisasi Jawa Timur.

Selain terkonsentrasi di kota Surabaya, industri manufaktur di Jawa Timur juga terkonsentrasi di dua kota industri lain di SWP I (Sidoarjo dan Gresik) yang merupakan *hinterland* kota Surabaya. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Glaeser dan Khan (2003) tentang pertumbuhan dan perluasan aktivitas ekonomi perkotaan, besar kemungkinan bahwa industri manufaktur yang terkonsentrasi di SWP I (termasuk

didalamnya aktivitas industri di Sidoarjo dan Gresik) terjadi karena *agglomeration effect* dari kota Surabaya.

Konsentrasi spasial pada industri manufaktur kota Surabaya dan besarnya pengaruh *agglomeration effect* dari kota Surabaya terhadap wilayah sekitarnya bisa terjadi akibat adanya agglomerasi yang disebabkan oleh upaya mengurangi biaya transportasi dengan berlokasi di sekitar *local demand* yang besar serta upaya untuk memperoleh akses pasar yang luas (Krugman,1991) pendapat ini dapat membantu menjelaskan kenapa terjadi konsentrasi spasial pada industri makanan, minuman dan tembakau di kota Surabaya. Jumlah penduduk Surabaya yang cukup banyak merupakan pasar potensial bagi output industri makanan, minuman dan tembakau. Selain itu, adanya pelabuhan laut di kota Surabaya mempermudah akses menuju pasar industri tersebut, baik pasar dalam negeri maupun pasar ekspor (Dick, 1993 a: 325-343).

Pendapat yang dikemukakan Dick (1993 a) didukung oleh Ellison dan Glaeser (1999) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk sebagai pasar potensial dan pelabuhan laut yang mendukung industri merupakan *natural advantages* dari suatu wilayah. Fujita dan Mori (1996) menambahkan bahwa adanya pelabuhan laut akan memperbesar skala kota dan meningkatkan eksternalitas positif dari konsentrasi spasial. Pendapat ini didukung oleh Porter (1990) yang menyatakan bahwa *demand condition* dan *factor condition* (termasuk didalamnya akses transportasi dan infrastruktur merupakan determinan keunggulan industri suatu wilayah

Apabila kembali pada pembahasan tentang SWP, telah dikemukakan sebelumnya bahwa peranan terbesar dalam subsektor industri makanan minuman dan tembakau berasal dari SWP VII (Kediri dan Sekitarnya). **Tabel 1** dan **tabel 2** pada lampiran menunjukkan bahwa pada tahun 1996 dan 1997 sekitar 44% PDRB dari subsektor industri makanan minuman dan tembakau (ISIC 31) berasal dari SWP VII dan meningkat menjadi sekitar 51% pada tahun 1999 dan 2000 (**Tabel 3** dan **Tabel 4** lampiran). Jumlah tersebut merupakan kontribusi tertinggi dari SWP di Jawa Timur dan merupakan 88% dari seluruh PDRB industri manufaktur di SWP 7. Data yang telah disebutkan menunjukkan dominasi dari SWP VII pada subsektor tersebut. Sedangkan apabila melihat *LQ* industri tersebut pada SWP VII pada tahun observasi lebih besar daripada satu, dapat dilihat bahwa subsektor tersebut merupakan subsektor andalan di SWP VII (**Tabel 17, 18, 19** dan **20** Lampiran).

Apabila diamati lebih mendalam, industri manufaktur di SWP VII terkonsentrasi di kota Kediri yang merupakan kota dengan peranan sektor industri manufaktur terbesar kedua di Jawa Timur. Dominasi sektor industri manufaktur terutama pada ISIC 3.1 (subsektor industri makanan, minuman dan tembakau) di kota Kediri tidak terlepas dari adanya Gudang Garam, yang merupakan industri rokok terbesar di Indonesia. Secara historis, dominasi Gudang Garam di kota Kediri tidak hanya meliputi aspek ekonomi kota Kediri, akan tetapi juga aspek sosial dan kemasyarakatan (Young, 1993; Kuncoro dan Sumarno, 2003).

Sedangkan pada SWP VI (Malang-Pasuruan) yang juga merupakan lokasi terkonsentrasinya industri manufaktur di Jawa Timur, cenderung didominasi oleh industri makanan, minuman dan tembakau dengan kontribusi sebesar 51, 09% (**Tabel 5** lampiran). Hasil analisis *LQ* menurut SWP pada tahun 1996 sebesar 0,9909 (**Tabel 17** lampiran) pada subsektor makanan minuman dan tembakau di SWP VI menunjukkan bahwa subsektor tersebut bukan merupakan subsektor unggulan wilayah tersebut.

Meskipun demikian, kontribusi yang diberikan SWP VI terhadap PDRB industri makanan, minuman dan tembakau di Jawa Timur cukup besar. Berdasarkan oleh data pada Tabel 1 (lampiran) yang menyebutkan bahwa 12,54% PDRB dari subsektor industri makanan, minuman dan tembakau Jawa Timur terkonsentrasi di wilayah tersebut, yang merupakan kontribusi dari PDRB subsektor industri makanan, minuman dan tembakau terbesar ketiga di Jawa Timur setelah SWP VII dan SWP I.

Tedapat fenomena menarik pada SWP I DAN SWP VI, dimana industri manufaktur terkonsentrasi pada koridor Surabaya-Malang. Pada SWP VI terlihat dari adanya konsentrasi industri manufaktur di kabupaten Pasuruan dan kota Malang. Apabila dilihat secara geografis akan terlihat adanya *manufacturing belt* (sabuk manufaktur) yang membentang meliputi SWP I dan SWP VI. Sabuk manufaktur tersebut mencakup beberapa lokasi terkonsentrasinya industri manufaktur di Jawa Timur antara lain adalah kabupaten Gresik, kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, kabupaten Pasuruan dan Kota Malang. Sabuk manufaktur ini dihubungkan dengan akses transportasi berupa jalan tol dan jalan antar kota yang cukup baik menuju akses pelabuhan laut internasional di kota Surabaya dan dan pelabuhan udara internasional di kabupaten Sidoarjo

Menurut Krugman (1991), berdasarkan berbagai fenomena empiris, sabuk manufaktur muncul karena adanya penghematan urbanisasi yang dialami industri karena berlokasi pada suatu wilayah. Kuncoro (2002) menyatakan bahwa penghematan urbanisasi (*urbanization economies*) terjadi karena keuntungan (*agglomeration effect*) terjadi ketika efisiensi perusahaan meningkat akibat meningkatnya produksi dan efisiensi seluruh perusahaan dalam wilayah yang sama. Penghematan karena berlokasi di wilayah yang sama ini terjadi akibat skala perekonomian kota yang besar serta beranekaragam, dan bukan akibat skala suatu jenis industri. Penghematan urbanisasi memunculkan fenomena yang disebut dengan aglomerasi perkotaan yang menyebabkan terjadinya perluasan wilayah metropolitan (*extended metropolitan regions*) dan mendorong industrialisasi pada suatu wilayah.

Apabila dilihat berdasar pendapat yang dikemukakan oleh Krugman (1991) dan Kuncoro (2002), fenomena sabuk manufaktur yang terjadi pada koridor Surabaya-Malang didukung oleh jalur transportasi yang menghubungkan dua kota yang mendukung, yaitu kota Malang dan kota Surabaya, dimana industri manufaktur pada koridor tersebut (terutama di Kabupaten Pasuruan) berlokasi pada jalur lalu lintas Surabaya-Malang. Seperti diketahui bahwa jalur transportasi Surabaya-Malang dihubungkan oleh jalur yang cukup baik sehingga akan meningkatkan efisiensi serta akan mengurangi biaya transportasi lalulintas input dan output industri. Selain itu, Industri yang berada di koridor Surabaya-Malang didukung kota Malang yang merupakan salah satu kota terbesar di Jawa Timur dan juga oleh kota Surabaya sebagai kota Terbesar di Jawa Timur yang memiliki skala yang besar baik dalam aktivitas ekonomi maupun adanya dukungan pelabuhan laut skala internasional di kota Surabaya.

Kotler dan Kertajaya (2000) mengemukakan sebuah contoh transformasi struktur ekonomi Jepang pasca perang dunia kedua, yang menunjukkan adanya perubahan dari struktur ekonomi yang berbasis pertanian menjadi struktur ekonomi yang berbasis industri manufaktur dengan biaya rendah. Model Jepang ini kemudian diadopsi oleh negara-negara lain di Asia seperti Korsel, Taiwan, Singapura, Malaysia, Thailand dan Indonesia. Model pembangunan negara-negara industri baru berdasarkan transformasi struktur ekonomi merupakan salah satu dasar peningkatan prospek ekonomi di Asia dan

memunculkan fenomena yang disebut *flying geese*. Berdasar hal tersebut, dalam mengembangkan industri manufaktur di Jawa Timur, perlu dikenali struktur industri sektor manufaktur pada masing-masing wilayah baik menurut SWP maupun menurut kabupaten kota.

Pada SWP yang merupakan lokasi terkonsentrasinya industri manufaktur di Jawa Timur, cenderung memiliki struktur industri manufaktur yang sama dengan provinsi Jawa Timur. Diantara tiga SWP tersebut, SWP yang memiliki perbedaan struktur industri terbesar dengan struktur industri provinsi Jawa Timur apabila dibandingkan dengan dua SWP lainnya adalah SWP VII (kediri dan sekitarnya). Perbedaan tersebut tidak begitu mencolok, hanya terjadi karena besarnya kontribusi industri makanan, minuman dan tembakau di SWP VII.

Industri Rokok kretek merupakan industri yang padat karya, sedangkan apabila melihat kontribusi dari industri makanan, minuman dan tembakau yang didominasi industri rokok di SWP VII begitu besar akan menunjukkan bahwa di SWP VII banyak tersedia tenaga kerja yang terspesialisasi pada industri rokok. Adanya tenaga kerja yang terspesialisasi memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Salah satu dampak positif dikemukakan oleh Marshal (1920) yang menyatakan bahwa ketersediaan tenaga kerja spesialis akan menguntungkan perusahaan yang terspesialisasi di wilayah tersebut akan mempermudah perusahaan dalam memperoleh input tenaga kerja. Porter (1990) menambahkan bahwa tenaga kerja yang terspesialisasi merupakan bagian dari faktor yang merupakan determinan dari keunggulan suatu wilayah dan dapat menjadi dasar keunggulan kompetitif wilayah tersebut. Lafourcade dan Mion (2003) menyatakan bahwa dengan adanya tenaga kerja yang terspesialisasi akan mendorong perusahaan yang terspesialisasi untuk terkonsentrasi pada wilayah tersebut. Oleh karena itu, industri makanan, minuman dan tembakau sangat layak untuk dikembangkan di wilayah SWP VII.

Salah satu hal yang harus diperhatikan dari adanya dominasi dari ketersediaan tenaga kerja yang terspesialisasi di suatu wilayah adalah kemampuan daerah tersebut melakukan transformasi industri. Adanya dominasi dari tenaga kerja dari suatu industri sama halnya dengan kurangnya ketersediaan tenaga kerja dari industri yang lain. Selain itu, pada wilayah yang terspesialisasi, pengaruh *Jacobian spillover* (spillover antar industri) baik berupa *knowledge spillover* maupun *kapital spillover* sangat kurang. Hal tersebut menimbulkan stasisnya perkembangan industri selain industri utama di SWP VII dan menyulitkan SWP VII dalam melakukan transformasi industri.

Apabila melihat pada  $K_{SPEC}$  indeks di kota Surabaya (tabel 4.6) yang merupakan pusat pertumbuhan di SWP I sekaligus merupakan ibukota provinsi Jawa Timur, dapat terlihat bahwa seperti halnya SWP I, struktur industri manufaktur kota Surabaya memiliki banyak kesamaan dengan struktur ekonomi Jawa Timur. dengan struktur industri yang memiliki banyak kesamaan dengan struktur industri Jawa Timur, akan memudahkan SWP I maupun kota Surabaya dalam melakukan transformasi industri sesuai dengan strategi pembangunan. Transformasi industri yang terjadi akan didukung oleh *Jacobian spillover* (spillover antar industri) yang didorong oleh adanya keanekaragaman industri pada suatu wilayah.

Dalam melaksanakan transformasi industri, perlu dipersiapkan sumber daya dan infrastruktur pendukung industri dan perdagangan dengan memperhatikan keterkaitan *intraindustry* dan keterkaitan *interindustry* yang dapat menopang industri unggulan (Porter, 1990; 1998 a; 1998 b). Infrastruktur yang ada harus diperkuat dengan investasi

pada *human capital* dan *research and development* yang didukung ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga secara kumulatif dapat mendorong pertumbuhan industri manufaktur serta sektor-sektor lain secara keseluruhan (Harvey dan Armstrong, 2001).

Hal yang sama juga ditemukan pada struktur industri di Kota Malang, yang merupakan pusat pertumbuhan dari SWP VI.  $K_{SPEC}$  indeks pada kota Malang menunjukkan nilai cukup rendah, hal ini menunjukkan bahwa struktur industri kota Malang memiliki banyak kesamaan dengan struktur industri provinsi Jawa Timur. Sama halnya dengan SWP I atau kota Surabaya, pada SWP VI maupun kota Malang, akan dapat dengan mudah melakukan transformasi industri sesuai dengan strategi kebijakan industri di wilayah tersebut.

Dalam melakukan transformasi industri, selain didorong oleh adanya sumber daya dan infrastruktur pendukung, transformasi industri perlu didorong dengan terciptanya iklim persaingan, iklim usaha dan iklim investasi yang kondusif bagi industri tersebut. Untuk mendukung hal tersebut, provinsi Jawa Timur perlu mengatur sumber daya substansial dari sektor swasta. Hal ini membutuhkan pembentukan kelembagaan dan peraturan lingkungan yang dapat menarik investasi swasta dalam bidang infrastruktur, merubah hukum dan peraturan; mengenalkan konsep pemberian harga yang merefleksikan biaya (*cost-reflective pricing*); dan menyediakan prosedur dan proses privatisasi dan/atau disinvestasi yang transparan (World Bank, 2003 b). Pandangan ini diperkuat dengan pendapat yang dikemukakan Porter yang menyatakan bahwa persaingan yang didukung oleh iklim usaha yang baik akan meningkatkan efisiensi, produktivitas dan kualitas (Porter, 1990; 1998 a; 1998 b). Best menambahkan bahwa persaingan dan iklim usaha yang baik akan menciptakan iklim investasi yang kondusif serta akan membangun *entrepreneurship* para pelaku dalam industri (Best, 1999), sedangkan iklim usaha dan iklim investasi yang baik dibangun melalui tata kelola yang baik dengan didukung penuh oleh aspek kelembagaan secara hirarkis (Williamson, 1985). sedangkan pemerintah bertindak sebagai "landasan kelembagaan" dan "penjaga iklim persaingan" agar persaingan dapat tercapai pada titik optimal (North, 1990).

Pada sisi lain, apabila melihat perbandingan struktur industri antara SWP I, SWP VI dan SWP VII secara bilateral dengan krugman bilateral indeks, akan terlihat bahwa secara kumulatif, SWP I Gerbang Kertasusila memiliki struktur ekonomi yang berbeda dengan SWP VII dan kedua wilayah memiliki spesialisasi masing-masing. Akan tetapi apabila SWP I dibandingkan dengan SWP VI, akan terlihat bahwa kedua wilayah tersebut memiliki banyak kesamaan. Begitu juga apabila SWP VI dibandingkan dengan SWP VII akan terlihat bahwa kedua wilayah tersebut juga memiliki banyak kesamaan.

Implikasi dari pengukuran spesialisasi bilateral adalah dalam kebijakan industri antar daerah. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, dalam pembangunan industri pada suatu daerah, tidak terlepas dengan peranan daerah pendukung dari industri tersebut. Pada dasarnya, koordinasi dan kerjasama sebaiknya ditekankan pada wilayah agglomerasi industri yang mencakup wilayah kabupaten kota dalam SWP maupun wilayah yang memiliki keseragaman dalam struktur industri antar kabupaten kota maupun antar SWP (Banarjee, 2002; Danani, 2000; Landiyanto, 2004).

Koordinasi dan kerjasama perlu dilakukan karena pada wilayah-wilayah tersebut terlokasi industri-industri saling berkaitan dan memiliki ketergantungan langsung baik secara vertikal maupu horisointal. Hal ini didukung oleh pemikiran Porter menyatakan bahwa *related and supporting industries* antar wilayah dan *factor conditions* suatu wilayah

harus diperkuat oleh dukungan serta kerjasama sinergis pemerintah antar wilayah dengan Stakeholder terkait baik secara vertikal maupun horisontal dalam pembangunan institusi pendukung (Porter, 1990; 1998 a; 1998 b)

Berdasar analisis sebelumnya, ditemukan bahwa penentuan industri unggulan sebagai dasar pembangunan industri memiliki beberapa kelemahan, oleh karena itu disarankan bahwa dalam penentuan industri unggulan daerah perlu melihat kemampuan daerah sekitarnya dalam memberikan dukungan terhadap industri tersebut. Dukungan ini dapat muncul oleh adanya kerjasama antar daerah, terutama pada wilayah yang memiliki keterkaitan maupun struktur industri seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Kerjasama tersebut didasarkan UU No 22/1999 tentang otonomi daerah, dimana pemerintah kota dan kabupaten memiliki kebebasan seluas-luasnya untuk mengatur daerah masing-masing berdasarkan aspirasi dari bawah (Word Bank, 2003 a).

Akan tetapi, berbagai evaluasi pelaksanaan otonomi secara empiris memperlihatkan munculnya ego kedaerahan yang berlebihan, inefisiensi, distorsi pasar dan persaingan tidak sehat antar daerah (Kuncoro, 2004; Saad, I., 2003; Usman, 2001). Oleh karena itu, apabila perkembangan industri manufaktur di Jawa Timur pada era otonomi tidak dikelola dengan semangat kerjasama yang baik, akan menimbulkan kebijakan pembangunan industri yang tumpang tindih dan tidak efisien (Landiyanto, 2004).

Oleh karena itu dalam merumuskan kerjasama antar daerah dalam pengembangan industri, selain perlu untuk mengetahui lokasi industri manufaktur dan struktur industri pada masing-masing wilayah seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, juga perlu mengetahui konsentrasi spasial dari industri yang terspesialisasi di Jawa Timur dimana data menunjukkan bahwa industri manufaktur di provinsi Jawa Timur terspesialisasi pada subsektor industri makanan, minuman dan tembakau (ISIC 3.1), subsektor industri tekstil, pakaian jadi dan kulit (ISIC 3.2) dan subsektor industri barang galian non logam, kecuali minyak bumi dan batu bara (ISIC 3.6).

Konsentrasi spasial pada ketiga subsektor industri manufaktur yang terspesialisasi di Jawa Timur tersebut dapat dilihat dengan indeks herfindahl. Pada tahun 1996,  $H^S$  pada subsektor industri makanan, minuman dan tembakau berdasarkan SWP bernilai sebesar 0,32 dan pada tahun 1999 menunjukkan perubahan yang berarti menjadi 0,36 (Tabel 4.7). Peningkatan tersebut menunjukkan adanya peningkatan keanekaragaman karakteristik yang terspesialisasi dan menunjukkan adanya peningkatan dominasi beberapa SWP pada industri tersebut. Meskipun demikian, pada tingkatan demikian indeks herfindahl dianggap cukup rendah, dimana skala tersebut menunjukkan bahwa distribusi dari PDRB subsektor tersebut relatif merata pada masing-masing SWP. Hal ini terjadi karena, Industri makanan, minuman dan tembakau mendominasi pada semua SWP di Jawa Timur.

Dominasi dari industri makanan, minuman dan tembakau, di setiap SWP di Jawa Timur kurang dapat dijelaskan oleh terjadinya MAR (Marshall-Arrow-Romer) eksternalitas (*knowledge spillover*) dan eksternalitas yang disebabkan *natural advantage*. Hal ini ditunjukkan oleh rendahnya Ellison Glaeser indeks ( $\gamma_{EG}$ ) pada subsektor industri makanan, minuman dan tembakau. Meskipun pada tingkatan SWP terjadi peningkatan  $\gamma_{EG}$  0,06363 pada tahun 1996 menjadi sebesar 0,08942, pada tahun 1999 (Tabel 4.9), nilai tersebut tidak mencerminkan peningkatan yang signifikan dari peranan MAR externalities dan natural advantages pada subsektor industri makanan minuman dan tembakau.

Satu hal yang tidak boleh terlupakan kerjasama antar daerah dalam pengembangan industri adalah mengakomodasi terjadinya mobilitas lokasional industri manufaktur baru sebagai implikasi perkembangan maupun akibat adanya transformasi industri dari suatu wilayah baik menurut SWP maupun kabupaten dan kota. Pada umumnya, mobilitas lokasional dari industri dapat berupa relokasi industri maupun perluasan spasial dari aktivitas industri dari suatu daerah ke daerah lain. Pada dasarnya, industri akan berelokasi maupun mempeluas aktivitas ekonominya pada wilayah yang lebih menguntungkan maupun wilayah yang memiliki struktur ekonomi yang sama dengan lokasi sebelumnya. Adanya mobilitas industri pada antar wilayah akan mengakibatkan perubahan dalam konsentrasi spasial dari industri yang diperlihatkan oleh herfindahl indeks.

Indeks herfindahl menurut SWP dari subsektor industri tekstil, pakaian jadi dan kulit (ISIC 3.2) yang berkisar sebesar 0,37 pada tahun 1997 (Tabel 4.7) memperlihatkan bahwa distribusi dari aktivitas ekonomi pada industri tersebut cukup merata pada SWP di Jawa Timur (tidak menunjukkan adanya dominasi suatu SWP yang menguasai industri tersebut). Hal ini menunjukkan adanya penyebaran lokasi industri pakaian jadi, tekstil dan kulit pada wilayah SWP di Jawa Timur.

Selain dengan kesamaan struktur industri, dengan diketahuinya sejauh mana peranan *spillover* dan *natural advantages* dalam mendorong terjadinya konsentrasi industri akan membantu dalam menentukan daerah yang sebaiknya saling kerjasama. Berlokasinya akitivitas industri tekstil, pakaian jadi dan kulit (ISIC 3.2) pada wilayah SWP di Jawa Timur terjadi karena MAR (Marshal-Arrow-Romer) eksternalitas (*knowledge spillover*) dan eksternalitas yang disebabkan *natural advantage*. Hal ini ditunjukkan oleh Ellison-Glaeser indeks yang cukup tinggi ( $\gamma_{EG}$ ) pada subsektor industri tekstil, pakaian jadi dan kulit (ISIC 3.2) menurut SWP yang berkisar antara 0,12 sampai 0,14 (Tabel 4.9) sehingga dapat mencerminkan peranan MAR *externalities* dan *natural advantages* pada industri tersebut. Sehingga dalam merumuskan kerjasama antar daerah pada Industri tekstil, pakaian jadi dan kulit, perlu memperimbangkan kareakteristik *spillover* pada masing-masing daerah dan *natural advantages* apa yang mendorong industri tersebut.

Indeks herfindahl berdasar SWP dari subsektor industri barang galian non logam, kecuali minyak bumi dan batu bara (ISIC 3.6) yang berkisar sebesar 0,5 (Tabel 4.7) yang memperlihatkan bahwa distribusi dari aktivitas ekonomi tidak merata pada SWP di Jawa Timur (menunjukkan adanya dominasi suatu SWP yang menguasai industri tersebut). Hal ini menunjukkan adanya penyebaran lokasi industri pakaian jadi, tekstil dan kulit pada wilayah SWP di Jawa Timur.

Berlokasinya subsektor industri barang galian non logam, kecuali minyak bumi dan batu bara (ISIC 3.6) pada wilayah SWP di Jawa Timur terjadi karena peranan MAR (Marshal-Arrow-Romer) eksternalitas (*knowledge spillover*) dan eksternalitas yang disebabkan *natural advantage* yang cukup besar. Hal ini ditunjukkan oleh Ellison Glaeser indeks yang cukup tinggi ( $\gamma_{EG}$ ) pada subsektor industri barang galian non logam, kecuali minyak bumi dan batu bara (ISIC 3.6) yang berkisar antara 0,10 sampai 0,14 (Tabel 4.9) sehingga dapat mencerminkan peranan MAR *externalities* dan *natural advantages* pada industri tersebut. Seperti halnya pada Industri tekstil, pakaian jadi dan kulit, dalam merumuskan kerjasama antar daerah dalam mengembangkan industri barang galian non logam, kecuali minyak bumi dan batu bara (ISIC 3.6) perlu memperimbangkan kareakteristik *spillover* pada masing-masing daerah dan *natural advantages* yang mendorong industri tersebut.

Pada industri tekstil, pakaian jadi dan kulit (ISIC 3.2) dan industri barang galian non logam, kecuali minyak bumi dan batu bara (ISIC 3.6), *knowledge spillover* memiliki peranan yang sangat penting baik bagi industri tersebut maupun bagi daerah lokasi industri dan pengambil kebijakan karena kedua Industri tersebut adalah industri yang berbasis sumber daya manusia sehingga dengan adanya *knowledge spillover* akan mendorong akumulasi modal manusia yang diperkuat oleh *learning by doing* sehingga akan meningkatkan pertumbuhan industri tersebut (Romer, 1986; Lucas, 1988).

Perlu ditekankan bahwa mobilitas industri harus terjadi secara alami untuk mengurangi distorsi dan inefisiensi, pemerintah provinsi Jawa Timur hanya boleh terlibat dalam perencanaan kawasan industri baru serta penyiapan infrastruktur untuk mencengah distorsi pasar. Selain itu, peran terpenting bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah mengorganisasikan kerjasama antara pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Timur dalam merumuskan kebijakan industri yang terpadu (Banerjee, 2002; Danani, 2000; Landiyanto, 2004; World bank, 2003 a; 2003 b).

Selain itu, perlu adanya *repositioning* peran kota Surabaya dari pusat industri dan perdagangan di Indonesia Timur menjadi pusat keuangan, perdagangan dan jasa yang menopang industrialisasi di Indonesia timur. Hal ini didukung oleh jumlah sumber daya manusia berkualitas yang cukup besar, adanya pelabuhan laut, dan bandara internasional serta peranan provinsi Jawa Timur sebagai salah satu pusat industri manufaktur di Indonesia. *Repositioning* peranan kota Surabaya akan mendukung pengembangan ekonomi provinsi Jawa Timur serta pengembangan kawasan timur Indonesia (Kotler et al, 1997; Kotler dan Kertajaya, 2000; World bank, 2003 a; 2003 b; Dick, 1993: 230-255; 325-343; Kuncoro, 2004).

## 5. Kesimpulan

### 5.1. Kesimpulan

Pada konteks pembangunan sektor industri manufaktur di suatu daerah, strategi yang berorientasi spasial dan regional merupakan salah satu faktor kunci yang dapat mendukung pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan industri manufaktur. Strategi ini didasarkan atas *localization economies* dan *urbanization economies* didukung oleh keterkaitan antar sektor baik keterkaitan vertikal maupun horisontal. Kerangka dalam rumusan strategi tersebut adalah lokasi terkonsentrasinya aktivitas ekonomi dan spesialisasi wilayah. Kedua hal tersebut didukung oleh analisis tentang spesialisasi relatif baik dengan dengan agregat wilayah maupun secara bilateral dan didukung oleh analisis tentang konsentrasi spasial secara sektoral dengan tidak mengesampingkan peranan *spillover* maupun *natural advantages* pada masing-masing wilayah.

Hasil analisis menunjukkan bahwa analisis *LQ* yang digunakan untuk menentukan sektor unggulan suatu wilayah harus dibandingkan dengan konsentrasi spasial dan spesialisasi dari industri pada wilayah tersebut, karena dengan adanya spesialisasi industri pada suatu wilayah akan meningkatkan produktivitas industri pada wilayah tersebut. Selain itu, adanya konsentrasi spasial juga akan mengurangi biaya transaksi antar perusahaan dalam industri yang saling berdekatan (terutama bagi perusahaan yang saling terkait dalam satu industri).

Berdasarkan SWP Industri Manufaktur di Provinsi Jawa Timur terkonsentrasi pada tiga SWP yaitu SWP 1 Gerbang Kertasusila, SWP 6 Malang – Pasuruan dan SWP 7 Kediri



dan sekitarnya. Sedangkan apabila berdasarkan kabupaten kota, industri manufaktur kota Surabaya terkonsentrasi di kota Surabaya, kabupaten Gresik, kabupaten Sidoarjo, kota Kediri kabupaten Pasuruan dan kota Malang.

Subsektor andalan provinsi Jawa Timur berdasarkan spesialisasi tingkat provinsi adalah subsektor makanan, minuman dan tembakau (ISIC 3.1), subsektor industri tekstil, pakaian jadi dan kulit (ISIC 3.2) dan subsektor industri barang galian non logam, kecuali minyak bumi dan batu bara (ISIC 3.6). Perkembangan subsektor tersebut didorong oleh terjadinya agglomerasi yang disebabkan oleh natural advantages maupun eksternalitas berupa *knowledge spillover* dan tenaga kerja yang terspesialisasi. Selain itu perkembangan subsektor tersebut juga didorong oleh akses pasar, baik berupa jumlah penduduk maupun sarana transportasi.

Pada SWP yang merupakan lokasi terkonsentrasinya industri manufaktur di Jawa Timur, cenderung memiliki struktur industri manufaktur yang sama dengan provinsi Jawa Timur. Dimana wilayah yang memiliki struktur industri relatif sama dengan struktur industri Jawa Timur, akan lebih mudah dalam melakukan transformasi industri sesuai dengan strategi pembangunan. Dengan strategi transformasi industri yang didukung oleh kebijakan yang sesuai, akan menciptakan industri unggulan baru disuatu wilayah.

Dalam penentuan industri unggulan daerah perlu melihat kemampuan daerah tersebut maupun kemampuan daerah sekitarnya dalam memberikan dukungan terhadap industri tersebut. Dukungan ini dapat muncul oleh adanya kerjasama antar daerah, yang memiliki keterkaitan maupun kesamaan struktur sehingga mendukung industri unggulan daerah tersebut maupun mobilitas lokasional yang mendorong terjadinya transformasi industri.

## 5.2. Saran

Untuk dapat mendapatkan hasil yang lebih akurat mengenai konsentrasi spasial industri di suatu wilayah, pada penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan perbandingan antara analisis dengan data tenaga kerja dan dengan data PDRB berdasar subsektor dengan berbagai tingkatan agregasi agar hasil analisis yang ditemukan dapat lebih tajam. Analisis tersebut perlu didukung dengan analisis ekonometri agar argumen yang menjelaskan terjadinya konsentrasi spasial dapat dipertanggung jawabkan secara statistik.

Kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah provinsi Jawa Timur adalah mengembangkan sektor unggulan dengan mempertimbangkan distribusi lokasional dengan memperhatikan struktur industri pada masing-masing wilayah. Selain itu, pemerintah perlu memperhatikan mengapa industri berlokasi dan berkembang pada suatu wilayah tertentu. Apabila hal yang telah disebutkan dipenuhi maka pemerintah provinsi Jawa Timur dalam mengembangkan sektor manufaktur tidak lagi mengembangkan sektor unggulan akan tetapi menciptakan dan mengembangkan sektor unggulan yang memiliki keunggulan kompetitif

Dalam menciptakan dan mengembangkan sektor unggulan, pemerintah provinsi Jawa Timur perlu menciptakan iklim persaingan, iklim usaha dan iklim investasi yang kondusif bagi industri tersebut. Dalam mendukung hal tersebut, pemerintah provinsi Jawa Timur dengan dukungan oleh swasta harus mempersiapkan sumber daya dan infrastruktur pendukung yang disertai oleh modal manusia dan IPTEK. Dengan semakin berkembangnya industri manufaktur, Pemerintah provinsi Jawa Timur sebaiknya

mengkoodinasikan kerjasama antar daerah dalam pengembangan industri manufaktur di Jawa Timur. Yang terakhir, pemerintah provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan pemerintah kota Surabaya harus mempersiapkan kebijakan industri Jawa Timur terpadu yang sesuai perubahan peran kota Surabaya agar lebih efisien dalam melakukan aktifitas ekonomi.

Strategi pengembangan industri manufaktur berbasis konsentrasi spasial ini merupakan strategi pembangunan diwujudkan dengan pendekatan prioritas (*priority approach*) dengan didukung oleh kedekatan lokasional yang diharapkan menciptakan pola keterkaitan antar kegiatan baik di dalam sektor industri sendiri (keterkaitan horizontal) maupun antara sektor industri dengan seluruh jaringan produksi dan distribusi terkait (keterkaitan vertikal). Dengan adanya eksternalitas positif dari konsentrasi spasial dan keterkaitan dalam industri, dapat menjadi dasar bagi kalangan usaha untuk mengembangkan usaha dengan bergabung menjadi bagian dari kluster industri agar dapat mendapatkan keuntungan dari *agglomeration economies* dan *localization economies*.

#### Daftar Pustaka

- Aiginger, K. and Hansberg, E (2003). "*Specialization versus Concentration: A Notes of Theory and Evidence*". SIEPR Working Paper.
- Amstrong, H. and Taylor, J (2001). "*Regional Economics and Policy*". Blackwell Publisher.
- Banerjee, S (2002). "Recovery and Growth in Indonesian Industry: Future Policy Framework" United Nations Support Facility for Indonesian Recovery Working Paper 02/08
- Bank Indonesia (2003) "*Tinjauan Terhadap Industri Manufaktur di Jawa Timur*" Surabaya: Bank Indonesia
- Best, M. (1999). "*Cluster Dynamics in Theory and Practise: Singapore/Johor and Penang Electronics*". UNIDO/ISIS
- Blakley, E., (1989). "*Planning Local Economic Development: Theory and Practices*". California: Sage Publication, Inc.
- BPS (Berbagai Edisi). "*PDRB Jawa Timur Berdasarkan Kabupaten dan Kota*" Biro Pusat Statistik.
- Carlton, D. , 1983, "The Location and Employment Choices of New Firms: an Econometric Model with Discrete and Continuous Endogenous Variables" *Review of Economics and Statistics* 65 : 440-449.
- Coase, R. (1937). "The Nature of the Firm". *Economica*. Vol 4. No 3, pp 386-405
- Danani, S (2000). "Indonesia: Strategic for Manufacturing Competitiveness" United Nations Industrial Development Organizations. UNDP/UNIDO Project No. NC/INS/99/004.
- Deichmann, U., Kaiser, K., Lall, S and Shalizi, Z (2005) "*Agglomeration, Transport, and Regional Development in Indonesia*". World Bank Policy Research Working Paper 3477, January 2005
- Deidda, S., Pacci, R & Ussai, S. (2002). "*Spatial Externalities and Local Economic Growth*". CRENOS Working Paper 02/06
- Deperindag. (2001). "*Strategi Pembangunan Industri 2001*". Jakarta: 2001.
- Dick, H. (1993a). "*Manufacturing*". In H.,J.J. Fox, & J. Mackie (Ed), *Balanced Development: East Java in the New Order* (pp. 230-255). Singapore: Oxford University Press.

- Dick, H. (1993b). *"The Economic Role of Surabaya"*. In H.,J.J. Fox, & J. Mackie (Ed), *Balanced Development: East Java in the New Order* (pp. 325-343). Singapore: Oxford University Press.
- Ellison, G. and Glaeser, E. (1997). "Geographic Concentration in US Manufacturing Industries: A Dartboard Approach". *Journal Political Economy*. Vol. 105. pp 889-927
- Ellison, G. and Glaeser, E. (1999). "The Geographic Concentration of Industry: Does Natural Advantage Explain Agglomeration?" *American Economic Review*. Vol 89. pp 311-316
- Forni M. and S. Paba (2001), Knowledge Spillovers and the Growth of Local Industries, *CEPR Discussion Papers* n. 2934.
- Fujita, M., Krugman, P.,and Venables, A.J.(1999). *"The Spatial Economy: Cities, Regions, and International Trade"*. Cambridge and London: The MIT Press.
- Fujita, M. and Thiesse, J.F. (2002). *"Economics of Agglomeration: Cities, Industrial Location, and Regional Growth"*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Fujita, M. and T, Mori. (1996). "The Role of Ports in Making of Major Cities: Self Agglomeration and Hub Effect". *Journal of Development Economics*. Vol 49, pp. 93-120
- Glaeser, E. Kallal, H. Scheinkman, J. and Scheleifer, A (1992). "Growth in Cities". *Journal of Political Economy*. Vol 100, pp 1126-1152.
- Glaeser, E. and Khan, M (2003). *"Sprawl and Urban Growth"*. Harvard Institute of Economic Research Discussion Paper No. 2004.
- Glaeser, E. and Kohlase, J (2003). *"Cities, Regions and the Decline of Transport Costs"*. Harvard Institute of Economic Research Discussion Paper No. 2014.
- Gordon ,I.R. and McCann, P. (2000). "Industrial Clusters: Complexess, Agglomeration and/or Social Network?" *Urban Studies*. Vol 37. pp 513-532
- Guiness, P and Husin, I. (1993). *"Industrial Expansion into a Rural Subdistricts"*. In H.,J.J. Fox, & J. Mackie (Ed), *Balanced Development: East Java in the New Order* (pp. 272-295). Singapore: Oxford University Press.
- Harrisons, B. (1992). "Industrial Districs: Old Wine in New Bottles?" *Regional Studies*, Vol 26. pp 469-483
- Harris, M & Stuart, K. (1997). *"Knowledge Spillover, Location and Growth: Theory and Evidence"*. Melbourne Institute Working Paper 6/97.
- Head, K., Mayer,T., & Ries, J. (2002). *"Market Size and Agglomeration"*. CEP Working Paper.
- Head, K & Mayer, T. (2003). *"The Empirics of Agglomeration and Trade"*. Cepii Working Paper No: 2003-15.
- Henderson, V (1994) *"Externalities and industrial Development"*. NBER Working Paper No. 4730.
- Henderson, V., Kuncoro, A. and Turner, M. (1995), "Industrial Development in Cities". *Journal of Political Economics*, 103, 1067-1090.
- Hill, H. (1988). *"Foreign Investment and Industrialization in Indonesia"* Singapore: Oxford University Press.
- Hill, H. (2000). *"The Indonesian Economy"*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Hofman, B. and Kaiser, K., (2004). *"The Making of Big Bang and its Aftermath: A political Economy Perspective"*. Georgia: Andrew Young School of Policy Studies. Georgia State University.
- Hugo, G., Hull, T., Hull, V., and Jones, G. (1987). *"The Demographic Dimension in Indonesian Development"*. Singapore: Oxford University Press.
- Hull, T. (1993). *"East Java's Family Planning Revolution, 1961-1987"*. In H.,J.J. Fox, & J. Mackie (Ed), *Balanced Development: East Java in the New Order* (pp. 54-74). Singapore: Oxford University Press.
- Husin, I. (1993). *"Electricity"*. In H.,J.J. Fox, & J. Mackie (Ed), *Balanced Development: East Java in the New Order* (pp. 256-271). Singapore: Oxford University Press.
- JICA (2004a). *"Studi Penguatan Kapasitas Kluster UKM di Indonesia: Laporan Akhir"*. Studi JICA Untuk Penguatan Kapasitas Sentra-sentra UKM di Indonesia.
- JICA (2004b). *"Petunjuk Pengembangan Kluster: bagi Kluster Fasilitator"*. Studi JICA Untuk Penguatan Kapasitas Sentra-sentra UKM di Indonesia.
- Jones, G. (1993). *"East Java: Educational Change and Changing Employment Structure"*. In H.,J.J. Fox, & J. Mackie (Ed), *Balanced Development: East Java in the New Order* (pp. 75-100). Singapore: Oxford University Press.
- Kim, S. (1995) "Expansion of Markets and the Geographic Distribution of Economics Activities: The Trends in U.S. Regional Manufacturing Structure 1860-1987". *The Quarterly Journal of Economics*. November. No 110. pp 881-908.
- Kolehmainen, J. (2002). *"Territorial Agglomeration as a Local Innovation Environment"*. MIT Industrial Performance Center. Working paper. 03002
- Kompas. (2000). *"Kebijakan Nasional Sektor Industri: Aglomerasi dengan kemitraan"*. Harian Kompas: 2000, 19 agustus.
- Kotler, P., Jatusripitak, S. and Maesincee, S (1997). *"Marketing of Nations"*. New York: The Free Press.
- Kotler, P. and Kertajaya, H. (2000). *"Repositioning Asia: From Bubble to Sustainable Economy"*. Singapore: John Wiley & Sons.
- Krugman, P. (1991). *"Geography and trade"*. Cambridge: MIT Press.
- Kuncoro, M. (2000). "Beyond Agglomeration and Urbanization". *Gajah Mada International Journal of Business*. September 2000. Vol.2.No.3, pp.307-325.
- Kuncoro, M. (2002). *"Analisis Spasial dan Regional"*. Jogjakarta: AMP YKPN.
- Kuncoro, M. (2004). *"Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan peluang"*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kuncoro, M. dan Sumarno, S. (2003) "Struktur, Kinerja, dan Kluster Industri Rokok Kretek: Indonesia 1996 – 1999". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. Vol 18, No 1. pp 61-87.
- Lafourcade, M. and Mion, G. (2003). "Concentration, Spatial Clustering and Size of Plants: Disentangling the Sources of Co-location Externalities". CORE Working Paper
- Landiyanto, E, A. (2004 a) "Otonomi Daerah dan Strategi Pembangunan di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus di Kota Surabaya". dipresentasikan pada Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Analisis Fiskal Departemen Keuangan RI. Jakarta 30 Oktober 2004.
- Landiyanto, E, A. (2004 b) *"Konsentrasi Spasial Industri Manufaktur: Tinjauan Empiris di Kota Surabaya"*. dipresentasikan pada Seminar akademik tahunan yang

- diselenggarakan oleh ISEI Pusat dan Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi FE UI di Hotel Nikko Jakarta 8-9 Desember 2004.
- Lucas, R. (1988). "On the Mechanics Economic Development". *Journal of Monetary Economics*. Vol 22. pp 3-22
- Mackie, J. (1993). "The East Java Economy: From Dualism to Balanced Development". In H., J. J. Fox, & J. Mackie (Ed), *Balanced Development: East Java in the New Order* (pp. 23-53). Singapore: Oxford University Press
- Marshall, A. (1920) "*Principles of Economics*", London: Mcmillan
- Maurel, F and Sedillot, B. (1999). "A Measure Geographic Concentration In French Manufacturing Industries". *Regional Science and Urban Economics*. Vol. 53. pp 469-481.
- Midelfart-Knarvik, K.H., Overman, H, G., Redding, S, J., and Venables, A, J. (2000). "*The Location of European Industry*", Report prepared for the Directorate General for Economic and Financial Affairs, European Commission, Brussels.
- North, D. (1990). "*Institutions, Institutional Change and Economic Performance*". New York: Cambridge University Press.
- OECD, (2000). "*The Competitiveness of European Industry: The 1999 Report*". Working Document of the Services of the European Commission.
- Porter, M.E. (1990). "*The Competitive Advantage of Nations*". New York: The Free Press.
- Porter, M.E (1998a). "Clusters and New Economics of Competition". *Harvard Business Review*, November-December (6), 77-91
- Porter, M. E. (1998b). "*On Competition*". Boston: Harvard Business School Publishing.
- Raines, P. (2002). "*Local or National Competitive Advantage*". European Policies Research Centre, University of Strathclyde, Glasgow.
- Ramelan, R. (1998). "Industri Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi: Landasan Pembangunan Daya Saing Nasional di Masa Depan". *Perencanaan Pembangunan*. No 11/ Maret 1998. pp 33-43.
- Ray, D and Blankfeld, R (2002). "*Reforming Indonesia's Ports*". paper prepared for Indonesian Ministry of Industry and Trade, Partnership for Economic Growth Project
- Romer, P. (1986). "Increasing Return and Long Run Growth". *Journal of Political Economy*. Vol 94. pp 1002-1038
- Saad, Ilyas. (2003). "*Implementasi Otonomi Daerah sudah mengarah pada Distorsi dan High Cost Economy*". SMERU Working Paper.
- Santosa, B and McMichael, H (2004) "*Industrial Development in East Java: A Special Case?*". Australian National University Working Paper.
- Sitanggang, I, R dan Nachrowi, N, I (2004). "*Pengaruh Struktur Ekonomi pada Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral: Analisis Model Demometrik di 30 Propinsi pada 9 Sektor di Indonesia*". Makalah disampaikan pada Seminar akademik Tahunan Ekonomi I yang diselenggarakan oleh ISEI bekerjasama dengan PPSIE FE UI, di Jakarta 8-9 Desember 2004.
- Sjoberg, O and Sjolholm, F (2001). "Trade Liberalization and the Geography of Production: Agglomeration, Concentration and Dispersal in Indonesia's Manufacturing Industry" Stocholm School of Economics Working Paper No 138.

- Subjanto, B. (1997). "Analisis Terhadap Efisiensi Sektor Industri Manufaktur di Indonesia". *Perencanaan Pembangunan*. No 10/ Desember 1997. pp 53-65
- Usai S and Paci R. (2003) "Externalities and Local Economic Growth in Manufacturing Industries" in Fingleton B. (ed.) *European Regional Growth*. Springer-Verlag.
- Usman, S., (2001). "*Indonesia's Decentralization Policy: Initial Experiences and Emerging Problems*". SMERU Working paper.
- Van de Soest, Gerking and van Oort (2002) " Knowledge externalities, agglomeration economies and employment growth in Dutch cities". *Center discussion paper*, 2002-41.
- Williamson, O. E. (1985). "*The Economics Institution of Capitalism: Firms, Markets, Relational Contracting*". New York: The Free press.
- World Bank. (2003). "*Kota-Kota dalam Transisi: Tinjauan Saktor Perkotaan pada Era Desentralisasi di Indonesia*". Working Paper No.7.
- Young, K. (1993). "*Kediri and Gudang Garam: An Industrial Enclave in Rural Setting*". In H.,J.J. Fox, & J. Mackie (Ed), *Balanced Development: East Java in the New Order* (pp. 296-307). Singapore: Oxford University Press.

Tabel 1. Konsentrasi Subsektor pada Daerah menurut SWP 1996

SWP		3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	3
1	SWP Gerbang Kertasusila	34,01%	41,88%	79,73%	81,84%	80,17%	70,97%	99,10%	88,88%	90,22%	53,78%
2	SWP Madura & Kepulauan	0,66%	0,01%	0,05%	0,04%	0,00%	0,41%	0,00%	0,19%	0,09%	0,40%
3	SWP Banyuwangi	2,15%	0,02%	0,41%	0,39%	0,41%	0,18%	0,00%	0,23%	0,00%	1,20%
4	SWP Jember & Sekitarnya	1,81%	0,01%	0,40%	0,00%	1,36%	0,43%	0,00%	0,03%	0,15%	1,04%
5	SWP Probolinggo & Lumajang	3,01%	1,13%	3,18%	2,37%	1,53%	0,56%	0,00%	0,05%	0,01%	2,08%
6	SWP Malang-Pasuruan	12,54%	41,63%	7,89%	3,32%	14,14%	5,21%	0,89%	6,66%	6,50%	12,66%
7	SWP Kediri & Sekitarnya	44,01%	15,07%	5,71%	11,68%	1,27%	4,76%	0,01%	0,31%	2,98%	25,75%
8	SWP Madiun & Sekitarnya	0,97%	0,25%	0,60%	0,04%	1,07%	0,60%	0,00%	3,52%	0,03%	0,88%
9	SWP Tuban & Bojonegoro	0,84%	0,00%	2,05%	0,31%	0,05%	16,87%	0,00%	0,13%	0,02%	2,22%
Total SWP		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: BPS data diolah

Tabel 2. Konsentrasi Subsektor pada Daerah menurut SWP 1997

SWP		3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	3
1	SWP Gerbang Kertasusila	34,00%	42,27%	79,74%	81,55%	80,29%	60,74%	99,05%	88,75%	89,69%	52,48%
2	SWP Madura & Kepulauan	0,65%	0,03%	0,04%	0,04%	0,03%	0,55%	0,00%	0,19%	0,11%	0,41%
3	SWP Banyuwangi	2,09%	0,02%	0,41%	0,40%	0,40%	0,25%	0,00%	0,24%	0,00%	1,21%
4	SWP Jember & Sekitarnya	1,78%	0,07%	0,39%	0,04%	1,35%	0,58%	0,00%	0,03%	0,21%	1,06%
5	SWP Probolinggo & Lumajang	2,98%	1,09%	3,23%	2,36%	1,50%	0,75%	0,00%	0,06%	0,01%	2,12%
6	SWP Malang-Pasuruan	12,44%	40,87%	7,81%	3,39%	14,01%	7,00%	0,90%	6,70%	6,75%	12,77%
7	SWP Kediri & Sekitarnya	44,22%	15,31%	5,76%	11,78%	1,28%	6,40%	0,02%	0,36%	3,17%	26,75%
8	SWP Madiun & Sekitarnya	0,92%	0,31%	0,60%	0,12%	1,08%	0,82%	0,01%	3,52%	0,05%	0,90%
9	SWP Tuban & Bojonegoro	0,92%	0,03%	2,03%	0,32%	0,07%	22,91%	0,01%	0,14%	0,02%	2,28%
Total SWP		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: BPS data diolah

Tabel 3. Konsentrasi Subsektor pada Daerah menurut SWP 1999

SWP		3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	3
1	SWP Gerbang Kertasusila	29,01%	43,57%	79,22%	81,71%	76,87%	68,62%	98,96%	87,38%	87,25%	51,02%
2	SWP Madura & Kepulauan	0,57%	0,03%	0,04%	0,05%	0,00%	0,48%	0,00%	0,28%	0,03%	0,35%
3	SWP Banyuwangi	1,54%	0,02%	0,42%	0,45%	0,41%	0,18%	0,00%	0,25%	0,00%	0,89%
4	SWP Jember & Sekitarnya	1,62%	0,07%	0,37%	0,05%	1,50%	0,43%	0,05%	0,04%	0,26%	0,96%
5	SWP Probolinggo & Lumajang	2,70%	0,98%	2,79%	3,08%	1,75%	0,69%	0,00%	0,07%	0,01%	2,00%
6	SWP Malang-Pasuruan	11,12%	39,74%	7,34%	4,03%	16,66%	5,77%	0,99%	7,41%	8,23%	12,26%
7	SWP Kediri & Sekitarnya	51,82%	15,28%	6,86%	10,06%	1,45%	4,83%	0,01%	0,37%	4,12%	29,75%
8	SWP Madiun & Sekitarnya	0,75%	0,27%	0,59%	0,16%	1,27%	0,63%	0,00%	4,05%	0,07%	0,84%
9	SWP Tuban & Bojonegoro	0,87%	0,04%	2,36%	0,41%	0,08%	18,38%	0,00%	0,15%	0,02%	1,91%
Total SWP		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: BPS data diolah

Tabel 4. Konsentrasi Subsektor pada daerah menurut SWP 2000

SWP		3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	3
1	SWP Gerbang Kertasusila	28,91%	43,49%	79,88%	81,67%	67,53%	68,53%	98,97%	87,16%	87,00%	51,18%
2	SWP Madura & Kepulauan	0,56%	0,03%	0,04%	0,05%	0,00%	0,48%	0,00%	0,28%	0,03%	0,35%
3	SWP Banyuwangi	1,57%	0,03%	0,38%	0,46%	0,36%	0,17%	0,00%	0,24%	0,00%	0,89%
4	SWP Jember & Sekitarnya	1,67%	0,07%	0,36%	0,05%	1,42%	0,43%	0,05%	0,05%	0,28%	0,97%
5	SWP Probolinggo & Lumajang	2,75%	0,99%	2,73%	3,06%	1,48%	0,65%	0,00%	0,07%	0,02%	2,01%
6	SWP Malang-Pasuruan	11,36%	39,72%	6,95%	4,00%	14,54%	5,77%	0,97%	7,53%	8,48%	12,23%
7	SWP Kediri & Sekitarnya	51,53%	15,37%	6,74%	10,12%	13,50%	4,83%	0,01%	0,39%	4,09%	29,61%
8	SWP Madiun & Sekitarnya	0,77%	0,27%	0,56%	0,15%	1,10%	0,63%	0,00%	4,14%	0,07%	0,86%
9	SWP Tuban & Bojonegoro	0,89%	0,04%	2,36%	0,42%	0,07%	18,51%	0,00%	0,15%	0,03%	1,90%
Total SWP		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: BPS data diolah



Tabel 5. Spesialisasi Daerah pada Subsektor menurut SWP 1996

SWP		3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	3
1	SWP Gerbang Kertasusila	32,60%	7,71%	8,90%	8,76%	3,21%	12,78%	12,73%	10,93%	2,38%	100,00%
2	SWP Madura & Kepulauan	85,22%	0,17%	0,69%	0,53%	0,02%	9,90%	0,00%	3,17%	0,30%	100,00%
3	SWP Banyuwangi	92,35%	0,18%	2,06%	1,89%	0,73%	1,49%	0,01%	1,28%	0,00%	100,00%
4	SWP Jember & Sekitarnya	90,26%	0,14%	2,32%	0,00%	2,83%	4,02%	0,02%	0,21%	0,21%	100,00%
5	SWP Probolinggo & Lumajang	74,56%	5,37%	9,16%	6,55%	1,58%	2,60%	0,00%	0,17%	0,01%	100,00%
6	SWP Malang-Pasuruan	51,09%	32,57%	3,74%	1,51%	2,41%	3,98%	0,49%	3,48%	0,73%	100,00%
7	SWP Kediri & Sekitarnya	88,12%	5,80%	1,33%	2,61%	0,11%	1,79%	0,00%	0,08%	0,16%	100,00%
8	SWP Madiun & Sekitarnya	56,91%	2,82%	4,08%	0,26%	2,63%	6,66%	0,00%	26,58%	0,05%	100,00%
9	SWP Tuban & Bojonegoro	19,58%	0,00%	5,53%	0,81%	0,05%	73,62%	0,02%	0,38%	0,01%	100,00%
Total SWP		51,56%	9,90%	6,00%	5,75%	2,15%	9,68%	6,91%	6,61%	1,42%	100,00%

Sumber: BPS data diolah

Tabel 6. Spesialisasi Daerah pada Subsektor menurut SWP 1997

SWP		3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	3
1	SWP Gerbang Kertasusila	34,69%	7,88%	8,90%	8,89%	3,53%	8,28%	13,17%	12,17%	2,50%	100,00%
2	SWP Madura & Kepulauan	84,65%	0,75%	0,53%	0,56%	0,14%	9,57%	0,08%	3,34%	0,37%	100,00%
3	SWP Banyuwangi	92,27%	0,18%	1,99%	1,90%	0,76%	1,46%	0,01%	1,43%	0,00%	100,00%
4	SWP Jember & Sekitarnya	89,69%	0,61%	2,15%	0,21%	2,92%	3,90%	0,02%	0,22%	0,29%	100,00%
5	SWP Probolinggo & Lumajang	75,29%	5,04%	8,92%	6,38%	1,63%	2,53%	0,00%	0,21%	0,01%	100,00%
6	SWP Malang-Pasuruan	52,14%	31,28%	3,58%	1,52%	2,53%	3,92%	0,49%	3,78%	0,77%	100,00%
7	SWP Kediri & Sekitarnya	88,53%	5,59%	1,26%	2,52%	0,11%	1,71%	0,01%	0,10%	0,17%	100,00%
8	SWP Madiun & Sekitarnya	54,39%	3,41%	3,89%	0,76%	2,75%	6,50%	0,10%	28,11%	0,08%	100,00%
9	SWP Tuban & Bojonegoro	21,52%	0,13%	5,20%	0,80%	0,07%	71,82%	0,02%	0,44%	0,01%	100,00%
Total SWP		53,55%	9,78%	5,86%	5,72%	2,30%	7,15%	6,98%	7,20%	1,46%	100,00%

Sumber: BPS data diolah

Tabel 7. Spesialisasi daerah pada Subsektor menurut SWP 1999

SWP		3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	3
1	SWP Gerbang Kertasusila	29,10%	8,83%	10,79%	11,13%	4,96%	9,23%	10,94%	12,42%	2,59%	100,00%
2	SWP Madura & Kepulauan	82,22%	0,85%	0,74%	1,01%	0,05%	9,27%	0,00%	5,73%	0,13%	100,00%
3	SWP Banyuwangi	88,04%	0,28%	3,28%	3,49%	1,53%	1,35%	0,00%	2,02%	0,01%	100,00%
4	SWP Jember & Sekitarnya	86,92%	0,77%	2,68%	0,38%	5,17%	3,08%	0,27%	0,32%	0,41%	100,00%
5	SWP Probolinggo & Lumajang	69,09%	5,06%	9,69%	10,67%	2,88%	2,35%	0,00%	0,25%	0,01%	100,00%
6	SWP Malang-Pasuruan	46,45%	33,53%	4,16%	2,29%	4,48%	3,23%	0,45%	4,38%	1,02%	100,00%
7	SWP Kediri & Sekitarnya	89,15%	5,31%	1,60%	2,35%	0,16%	1,11%	0,00%	0,09%	0,21%	100,00%
8	SWP Madiun & Sekitarnya	45,48%	3,32%	4,88%	1,28%	4,95%	5,13%	0,03%	34,80%	0,12%	100,00%
9	SWP Tuban & Bojonegoro	23,15%	0,19%	8,59%	1,49%	0,13%	65,87%	0,00%	0,56%	0,02%	100,00%
Total SWP		51,19%	10,35%	6,95%	6,95%	3,29%	6,86%	5,64%	7,25%	1,51%	100,00%

Sumber: BPS data diolah

Tabel 8. Spesialisasi Daerah pada Subsektor menurut SWP 2000

SWP		3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	3
1	SWP Gerbang Kertasusila	28,38%	8,63%	11,52%	11,25%	5,28%	8,89%	11,06%	12,63%	2,36%	100,00%
2	SWP Madura & Kepulauan	81,98%	0,86%	0,78%	1,04%	0,05%	9,26%	0,00%	5,90%	0,13%	100,00%
3	SWP Banyuwangi	88,04%	0,29%	3,16%	3,59%	1,62%	1,29%	0,00%	2,00%	0,01%	100,00%
4	SWP Jember & Sekitarnya	86,31%	0,75%	2,72%	0,39%	5,85%	2,95%	0,28%	0,35%	0,40%	100,00%
5	SWP Probolinggo & Lumajang	68,85%	5,00%	10,04%	10,76%	2,95%	2,14%	0,00%	0,25%	0,01%	100,00%
6	SWP Malang-Pasuruan	46,65%	32,99%	4,19%	2,31%	4,75%	3,13%	0,46%	4,57%	0,96%	100,00%
7	SWP Kediri & Sekitarnya	87,44%	5,28%	1,68%	2,41%	1,82%	1,08%	0,00%	0,10%	0,19%	100,00%
8	SWP Madiun & Sekitarnya	44,97%	3,20%	4,83%	1,27%	5,11%	4,84%	0,03%	35,63%	0,12%	100,00%
9	SWP Tuban & Bojonegoro	23,48%	0,19%	9,19%	1,58%	0,14%	64,81%	0,00%	0,59%	0,02%	100,00%
Total SWP		50,25%	10,16%	7,38%	7,05%	4,00%	6,64%	5,72%	7,42%	1,39%	100,00%

Sumber: BPS data diolah

Tabel 9. Konsentrasi Subsektor pada Daerah menurut Kab/Kota 1996

SWP	Kabupaten/Kota	3.1.	3.2.	3.3.	3.4.	3.5.	3.6.	3.7.	3.8.	3.9.	3
1	Pemkot. Surabaya	25,87%	4,59%	16,38%	12,31%	36,27%	36,47%	60,00%	53,90%	83,35%	28,69%
	Pemkot. Mojokerto	0,08%	1,52%	0,07%	0,06%	0,17%	0,03%	0,00%	0,08%	0,09%	0,21%
	Pemkab. Mojokerto	0,97%	0,40%	2,80%	6,96%	0,38%	1,19%	0,05%	0,71%	0,20%	1,28%
	Pemkab. Sidoarjo	5,08%	32,23%	11,47%	51,90%	4,39%	7,33%	38,86%	20,95%	5,73%	14,44%
	Pemkab. Lamongan	0,03%	0,08%	0,06%	0,00%	0,03%	0,06%	0,00%	0,00%	0,06%	0,03%
	Pemkab. Gresik	1,97%	3,00%	48,94%	10,62%	38,90%	25,88%	0,18%	13,23%	0,06%	9,09%
	Pemkab. Bangkalan	0,01%	0,05%	0,00%	0,00%	0,02%	0,01%	0,00%	0,00%	0,73%	0,02%
2	Pemkab. Sampang	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%
	Pemkab. Pamekasan	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
	Pemkab. Sumenep	0,63%	0,00%	0,02%	0,04%	0,00%	0,16%	0,00%	0,19%	0,08%	0,36%
3	Pemkab. Banyuwangi	2,15%	0,02%	0,41%	0,39%	0,41%	0,18%	0,00%	0,23%	0,00%	1,20%
4	Pemkab. Jember	1,08%	0,00%	0,09%	0,00%	1,34%	0,06%	0,00%	0,03%	0,00%	0,60%
	Pemkab. Bondowoso	0,21%	0,00%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%
	Pemkab. Situbondo	0,52%	0,01%	0,01%	0,00%	0,02%	0,37%	0,00%	0,00%	0,15%	0,31%
5	Pemkot. Probolinggo	0,97%	1,01%	2,82%	0,06%	1,25%	0,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,84%
	Pemkab. Probolinggo	1,20%	0,07%	0,09%	2,30%	0,05%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,77%
	Pemkab. Lumajang	0,85%	0,06%	0,27%	0,02%	0,23%	0,06%	0,00%	0,05%	0,01%	0,47%
6	Pemkot. Malang	8,34%	4,25%	0,15%	0,47%	0,58%	1,09%	0,00%	1,42%	0,48%	4,98%
	Pemkot. Pasuruan	0,07%	0,04%	0,99%	0,01%	0,02%	0,04%	0,01%	2,16%	0,00%	0,25%
	Pemkab. Malang	1,03%	2,42%	1,19%	0,23%	4,41%	2,09%	0,00%	0,50%	0,74%	1,20%
	Pemkab. Pasuruan	3,09%	34,91%	5,56%	2,61%	9,13%	1,99%	0,88%	2,57%	5,27%	6,23%
7	Pemkot. Kediri	41,83%	0,01%	0,12%	0,02%	0,24%	0,03%	0,00%	0,04%	0,00%	21,59%
	Pemkot. Blitar	0,03%	0,01%	1,91%	0,00%	0,01%	0,06%	0,00%	0,00%	0,02%	0,14%
	Pemkab. Kediri	0,53%	0,26%	2,59%	11,45%	0,14%	0,02%	0,00%	0,08%	0,04%	1,12%
	Pemkab. Blitar	0,07%	0,00%	0,02%	0,00%	0,04%	0,03%	0,00%	0,01%	0,00%	0,04%
	Pemkab. Trenggalek	0,03%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%
	Pemkab. Tulungagung	0,39%	14,19%	0,03%	0,10%	0,51%	4,58%	0,00%	0,15%	0,01%	2,08%
	Pemkab. Jombang	0,68%	0,60%	0,87%	0,00%	0,33%	0,01%	0,01%	0,02%	2,87%	0,51%
Pemkab. Nganjuk	0,45%	0,00%	0,15%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,25%	
8	Pemkot. Madiun	0,39%	0,15%	0,23%	0,03%	0,07%	0,18%	0,00%	3,46%	0,00%	0,48%
	Pemkab. Madiun	0,12%	0,00%	0,14%	0,00%	0,07%	0,20%	0,00%	0,01%	0,02%	0,09%
	Pemkab. Pacitan	0,01%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%
	Pemkab. Ponorogo	0,03%	0,06%	0,12%	0,01%	0,82%	0,08%	0,00%	0,05%	0,00%	0,06%
	Pemkab. Magetan	0,22%	0,04%	0,03%	0,00%	0,02%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%
	Pemkab. Ngawi	0,21%	0,00%	0,04%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%
9	Pemkab. Tuban	0,70%	0,00%	0,58%	0,30%	0,05%	16,82%	0,00%	0,13%	0,00%	2,05%
	Pemkab. Bojonegoro	0,14%	0,00%	1,47%	0,01%	0,00%	0,05%	0,00%	0,00%	0,02%	0,17%
Total Kab/Kota		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: BPS data diolah

Tabel 10. Konsentrasi Subsektor pada Daerah menurut Kab/Kota 1997

SWP	Kabupaten/Kota	3.1.	3.2.	3.3.	3.4.	3.5.	3.6.	3.7.	3.8.	3.9.	3	
1	Pemkot. Surabaya	25,69%	4,58%	16,23%	12,47%	36,32%	36,46%	60,30%	53,63%	82,59%	28,78%	
	Pemkot. Mojokerto	0,09%	1,46%	0,07%	0,05%	0,16%	0,03%	0,01%	0,08%	0,09%	0,21%	
	Pemkab. Mojokerto	0,95%	0,38%	2,80%	6,71%	0,38%	1,18%	0,05%	0,74%	0,21%	1,25%	
	Pemkab. Sidoarjo	5,03%	32,85%	11,49%	51,50%	4,43%	7,38%	38,50%	20,82%	5,93%	14,26%	
	Pemkab. Lamongan	0,03%	0,08%	0,06%	0,00%	0,03%	0,06%	0,00%	0,00%	0,06%	0,03%	
	Pemkab. Gresik	2,21%	2,87%	49,08%	10,81%	38,95%	25,71%	0,18%	13,46%	0,06%	9,09%	
2	Pemkab. Bangkalan	0,01%	0,05%	0,00%	0,00%	0,02%	0,01%	0,00%	0,01%	0,74%	0,02%	
	Pemkab. Sampang	0,01%	0,02%	0,01%	0,00%	0,01%	0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	
	Pemkab. Pamekasan	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,01%	
3	Pemkab. Sumenep	0,63%	0,00%	0,02%	0,04%	0,00%	0,16%	0,00%	0,19%	0,08%	0,36%	
	Pemkab. Banyuwangi	2,09%	0,02%	0,41%	0,40%	0,40%	0,18%	0,00%	0,24%	0,00%	1,19%	
	Pemkab. Jember	1,06%	0,04%	0,09%	0,03%	1,30%	0,06%	0,00%	0,03%	0,02%	0,60%	
4	Pemkab. Bondowoso	0,20%	0,01%	0,29%	0,00%	0,02%	0,01%	0,00%	0,00%	0,03%	0,13%	
	Pemkab. Situbondo	0,52%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,37%	0,00%	0,00%	0,16%	0,31%	
	Pemkot. Probolinggo	0,97%	0,97%	2,86%	0,06%	1,23%	0,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,83%	
5	Pemkab. Probolinggo	1,17%	0,07%	0,09%	2,28%	0,05%	0,08%	0,00%	0,01%	0,00%	0,76%	
	Pemkab. Lumajang	0,84%	0,05%	0,28%	0,02%	0,22%	0,06%	0,00%	0,05%	0,01%	0,47%	
	Pemkot. Malang	8,28%	4,15%	0,15%	0,48%	0,58%	1,09%	0,00%	1,44%	0,50%	4,98%	
	Pemkot. Pasuruan	0,07%	0,04%	1,00%	0,01%	0,02%	0,04%	0,01%	2,15%	0,01%	0,25%	
6	Pemkab. Malang	1,05%	2,44%	1,20%	0,24%	4,30%	2,08%	0,00%	0,49%	0,75%	1,20%	
	Pemkab. Pasuruan	3,04%	34,24%	5,46%	2,66%	9,10%	1,98%	0,89%	2,63%	5,49%	6,03%	
	Pemkot. Kediri	42,12%	0,01%	0,13%	0,02%	0,23%	0,03%	0,00%	0,04%	0,02%	22,03%	
	Pemkot. Blitar	0,03%	0,01%	1,92%	0,02%	0,01%	0,07%	0,01%	0,02%	0,03%	0,13%	
	Pemkab. Kediri	0,51%	0,25%	2,64%	11,52%	0,13%	0,02%	0,00%	0,08%	0,04%	1,10%	
	Pemkab. Blitar	0,07%	0,00%	0,02%	0,00%	0,04%	0,03%	0,00%	0,01%	0,03%	0,04%	
	Pemkab. Trenggalek	0,03%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	0,02%	0,00%	0,02%	
	Pemkab. Tulungagung	0,39%	14,39%	0,03%	0,10%	0,52%	4,57%	0,00%	0,15%	0,01%	2,03%	
7	Pemkab. Jombang	0,66%	0,58%	0,87%	0,02%	0,33%	0,01%	0,01%	0,02%	3,01%	0,50%	
	Pemkab. Nganjuk	0,42%	0,05%	0,15%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,04%	0,24%	
	Pemkot. Madiun	0,37%	0,15%	0,23%	0,03%	0,07%	0,18%	0,00%	3,44%	0,00%	0,48%	
	Pemkab. Madiun	0,10%	0,06%	0,14%	0,03%	0,07%	0,20%	0,00%	0,01%	0,02%	0,09%	
	Pemkab. Pacitan	0,01%	0,01%	0,03%	0,00%	0,00%	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	
	Pemkab. Ponorogo	0,03%	0,06%	0,12%	0,01%	0,83%	0,09%	0,00%	0,05%	0,00%	0,06%	
8	Pemkab. Magetan	0,21%	0,04%	0,03%	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	0,02%	0,02%	0,12%	
	Pemkab. Ngawi	0,20%	0,00%	0,04%	0,04%	0,10%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%	
	Pemkab. Tuban	0,78%	0,02%	0,58%	0,31%	0,05%	16,97%	0,01%	0,13%	0,00%	2,06%	
	Pemkab. Bojonegoro	0,14%	0,01%	1,44%	0,01%	0,02%	0,05%	0,00%	0,01%	0,02%	0,16%	
	Total Kab/Kota		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: BPS data diolah

Tabel 11. Konsentrasi Subsektor pada Daerah menurut Kab/Kota 1999

SWP	Kabupaten/Kota	3.1.	3.2.	3.3.	3.4.	3.5.	3.6.	3.7.	3.8.	3.9.	3
1	Pemkot. Surabaya	22,82%	4,41%	13,28%	12,72%	28,12%	30,74%	63,75%	52,67%	78,40%	25,58%
	Pemkot. Mojokerto	0,07%	0,80%	0,06%	0,07%	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%	0,14%
	Pemkab. Mojokerto	0,79%	0,33%	3,17%	6,56%	0,45%	1,38%	0,04%	0,80%	0,29%	1,29%
	Pemkab. Sidoarjo	3,84%	35,30%	13,63%	47,15%	5,06%	8,21%	34,94%	20,45%	7,45%	14,14%
	Pemkab. Lamongan	0,03%	0,10%	0,07%	0,00%	0,03%	0,07%	0,00%	0,00%	0,07%	0,04%
	Pemkab. Gresik	1,45%	2,58%	49,00%	15,21%	43,00%	28,21%	0,22%	13,45%	0,08%	9,81%
	Pemkab. Bangkalan	0,01%	0,06%	0,01%	0,00%	0,03%	0,01%	0,00%	0,00%	0,86%	0,03%
2	Pemkab. Sampang	0,01%	0,02%	0,01%	0,00%	0,00%	0,26%	0,00%	0,05%	0,00%	0,03%
	Pemkab. Pamekasan	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	0,01%	0,03%	0,01%
	Pemkab. Sumenep	0,55%	0,00%	0,02%	0,04%	0,00%	0,19%	0,00%	0,22%	0,00%	0,31%
3	Pemkab. Banyuwangi	1,54%	0,02%	0,42%	0,45%	0,41%	0,18%	0,00%	0,25%	0,00%	0,89%
4	Pemkab. Jember	1,02%	0,04%	0,11%	0,04%	1,45%	0,06%	0,00%	0,03%	0,02%	0,59%
	Pemkab. Bondowoso	0,16%	0,02%	0,25%	0,00%	0,03%	0,01%	0,03%	0,01%	0,04%	0,11%
	Pemkab. Situbondo	0,44%	0,02%	0,01%	0,01%	0,02%	0,36%	0,01%	0,00%	0,19%	0,26%
5	Pemkot. Probolinggo	0,84%	0,86%	2,39%	0,06%	1,44%	0,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,77%
	Pemkab. Probolinggo	1,24%	0,07%	0,09%	2,99%	0,05%	0,09%	0,00%	0,01%	0,00%	0,86%
	Pemkab. Lumajang	0,62%	0,06%	0,32%	0,02%	0,26%	0,06%	0,00%	0,06%	0,01%	0,36%
6	Pemkot. Malang	7,17%	2,99%	0,17%	0,53%	0,68%	1,34%	0,00%	1,57%	0,62%	4,27%
	Pemkot. Pasuruan	0,05%	0,05%	0,84%	0,01%	0,03%	0,04%	0,01%	2,50%	0,00%	0,28%
	Pemkab. Malang	1,18%	2,33%	1,43%	0,31%	5,17%	2,19%	0,00%	0,49%	0,99%	1,34%
	Pemkab. Pasuruan	2,72%	34,36%	4,91%	3,18%	10,78%	2,20%	0,97%	2,85%	6,62%	6,38%
	Pemkot. Kediri	50,08%	0,01%	0,13%	0,03%	0,27%	0,03%	0,00%	0,04%	0,00%	25,66%
7	Pemkot. Blitar	0,03%	0,01%	2,08%	0,02%	0,01%	0,07%	0,00%	0,00%	0,03%	0,17%
	Pemkab. Kediri	0,52%	0,32%	3,36%	9,74%	0,15%	0,02%	0,00%	0,09%	0,05%	1,22%
	Pemkab. Blitar	0,07%	0,00%	0,02%	0,00%	0,05%	0,03%	0,00%	0,01%	0,03%	0,04%
	Pemkab. Trenggalek	0,03%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	0,02%	0,00%	0,02%
	Pemkab. Tulungagung	0,28%	14,23%	0,04%	0,12%	0,61%	4,63%	0,00%	0,17%	0,02%	1,98%
	Pemkab. Jombang	0,52%	0,65%	1,03%	0,02%	0,36%	0,01%	0,01%	0,03%	3,94%	0,48%
	Pemkab. Nganjuk	0,30%	0,05%	0,19%	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,05%	0,18%
	Pemkot. Madiun	0,33%	0,10%	0,17%	0,05%	0,08%	0,20%	0,00%	3,95%	0,01%	0,50%
8	Pemkab. Madiun	0,08%	0,06%	0,15%	0,03%	0,08%	0,20%	0,00%	0,01%	0,03%	0,08%
	Pemkab. Pacitan	0,01%	0,01%	0,04%	0,00%	0,00%	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%
	Pemkab. Ponorogo	0,02%	0,06%	0,16%	0,01%	0,99%	0,09%	0,00%	0,05%	0,00%	0,07%
	Pemkab. Magetan	0,15%	0,04%	0,03%	0,02%	0,02%	0,02%	0,00%	0,02%	0,02%	0,09%
	Pemkab. Ngawi	0,15%	0,00%	0,05%	0,05%	0,11%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,09%
	Pemkab. Tuban	0,75%	0,02%	0,66%	0,40%	0,06%	18,32%	0,00%	0,14%	0,00%	1,73%
	Pemkab. Bojonegoro	0,12%	0,02%	1,70%	0,01%	0,02%	0,05%	0,00%	0,01%	0,02%	0,19%
Total Kab/Kota		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: BPS data diolah

Tabel 12. Konsentrasi Subsektor pada Daerah menurut Kab/Kota 2000

SWP	Kabupaten/Kota	3.1.	3.2.	3.3.	3.4.	3.5.	3.6.	3.7.	3.8.	3.9.	3
1	Pemkot. Surabaya	22,44%	4,29%	13,42%	12,91%	25,34%	30,56%	63,33%	51,55%	77,57%	25,17%
	Pemkot. Mojokerto	0,07%	0,81%	0,06%	0,07%	0,17%	0,00%	0,05%	0,02%	0,12%	0,14%
	Pemkab. Mojokerto	0,80%	0,33%	3,07%	6,59%	0,37%	1,39%	0,05%	0,80%	0,52%	1,30%
	Pemkab. Sidoarjo	3,85%	35,20%	12,55%	47,28%	4,34%	8,12%	35,31%	20,82%	7,75%	14,16%
	Pemkab. Lamongan	0,03%	0,10%	0,06%	0,00%	0,02%	0,07%	0,00%	0,00%	0,08%	0,04%
	Pemkab. Gresik	1,70%	2,71%	50,72%	14,82%	37,27%	28,37%	0,23%	13,96%	0,11%	10,34%
2	Pemkab. Bangkalan	0,01%	0,06%	0,01%	0,00%	0,02%	0,01%	0,00%	0,00%	0,85%	0,03%
	Pemkab. Sampang	0,01%	0,02%	0,01%	0,00%	0,00%	0,26%	0,00%	0,05%	0,00%	0,03%
	Pemkab. Pamekasan	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	0,01%	0,03%	0,01%
3	Pemkab. Sumenep	0,54%	0,00%	0,02%	0,04%	0,00%	0,19%	0,00%	0,22%	0,00%	0,31%
	Pemkab. Banyuwangi	1,57%	0,03%	0,38%	0,46%	0,36%	0,17%	0,00%	0,24%	0,00%	0,89%
4	Pemkab. Jember	1,05%	0,04%	0,12%	0,05%	1,38%	0,06%	0,00%	0,03%	0,03%	0,60%
	Pemkab. Bondowoso	0,16%	0,02%	0,23%	0,00%	0,02%	0,01%	0,04%	0,01%	0,05%	0,11%
	Pemkab. Situbondo	0,46%	0,02%	0,01%	0,01%	0,02%	0,36%	0,01%	0,00%	0,20%	0,26%
5	Pemkot. Probolinggo	0,86%	0,86%	2,33%	0,06%	1,20%	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,78%
	Pemkab. Probolinggo	1,26%	0,07%	0,09%	2,98%	0,04%	0,09%	0,00%	0,01%	0,00%	0,87%
	Pemkab. Lumajang	0,62%	0,06%	0,31%	0,02%	0,23%	0,06%	0,00%	0,06%	0,01%	0,36%
6	Pemkot. Malang	7,19%	3,01%	0,17%	0,53%	0,58%	1,35%	0,00%	1,58%	0,65%	4,21%
	Pemkot. Pasuruan	0,06%	0,05%	0,82%	0,01%	0,02%	0,05%	0,01%	2,55%	0,00%	0,29%
	Pemkab. Malang	1,22%	2,33%	1,40%	0,32%	4,41%	2,19%	0,00%	0,50%	0,99%	1,35%
	Pemkab. Pasuruan	2,90%	34,33%	4,56%	3,14%	9,52%	2,18%	0,96%	2,89%	6,84%	6,39%
7	Pemkot. Kediri	49,72%	0,01%	0,13%	0,03%	0,23%	0,03%	0,00%	0,04%	0,00%	25,01%
	Pemkot. Blitar	0,03%	0,01%	2,14%	0,02%	0,01%	0,07%	0,00%	0,00%	0,04%	0,18%
	Pemkab. Kediri	0,52%	0,32%	3,12%	9,80%	12,42%	0,02%	0,00%	0,09%	0,05%	1,72%
	Pemkab. Blitar	0,07%	0,00%	0,02%	0,00%	0,04%	0,03%	0,00%	0,01%	0,04%	0,04%
	Pemkab. Trenggalek	0,03%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	0,02%	0,00%	0,02%
	Pemkab. Tulungagung	0,31%	14,32%	0,04%	0,12%	0,50%	4,63%	0,00%	0,18%	0,02%	1,96%
8	Pemkab. Jombang	0,54%	0,65%	1,11%	0,02%	0,30%	0,01%	0,01%	0,03%	3,89%	0,49%
	Pemkab. Nganjuk	0,32%	0,05%	0,18%	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,05%	0,19%
	Pemkot. Madiun	0,33%	0,10%	0,17%	0,05%	0,07%	0,20%	0,00%	4,04%	0,01%	0,51%
	Pemkab. Madiun	0,08%	0,06%	0,14%	0,03%	0,07%	0,20%	0,00%	0,01%	0,03%	0,08%
	Pemkab. Pacitan	0,01%	0,01%	0,03%	0,00%	0,00%	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%
9	Pemkab. Ponorogo	0,02%	0,06%	0,14%	0,01%	0,85%	0,09%	0,00%	0,05%	0,01%	0,07%
	Pemkab. Magetan	0,16%	0,04%	0,03%	0,02%	0,01%	0,02%	0,00%	0,02%	0,03%	0,09%
	Pemkab. Ngawi	0,16%	0,00%	0,05%	0,05%	0,09%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,09%
	Pemkab. Tuban	0,76%	0,02%	0,67%	0,41%	0,05%	18,46%	0,00%	0,14%	0,00%	1,70%
	Pemkab. Bojonegoro	0,13%	0,02%	1,69%	0,01%	0,02%	0,05%	0,00%	0,01%	0,03%	0,20%
Total Kab/Kota		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: BPS data diolah

Tabel 13. Spesialisasi Daerah pada Subsektor menurut Kab/Kota 1996

SWP	Kabupaten/Kota	3.1.	3.2.	3.3.	3.4.	3.5.	3.6.	3.7.	3.8.	3.9.	3
1	Pemkot. Surabaya	46,49%	1,59%	3,43%	2,47%	2,72%	12,31%	14,45%	12,42%	4,12%	100,00%
	Pemkot. Mojokerto	18,68%	71,56%	2,09%	1,51%	1,73%	1,24%	0,00%	2,57%	0,61%	100,00%
	Pemkab. Mojokerto	38,85%	3,06%	13,11%	31,20%	0,64%	9,01%	0,26%	3,64%	0,22%	100,00%
	Pemkab. Sidoarjo	18,14%	22,10%	4,77%	20,68%	0,65%	4,91%	18,59%	9,59%	0,56%	100,00%
	Pemkab. Lamongan	42,59%	23,11%	11,06%	0,31%	1,62%	17,85%	0,64%	0,53%	2,29%	100,00%
	Pemkab. Gresik	11,18%	3,27%	32,31%	6,72%	9,21%	27,55%	0,14%	9,62%	0,01%	100,00%
	Pemkab. Bangkalan	29,65%	21,52%	1,14%	0,00%	2,00%	3,58%	0,00%	0,00%	42,11%	100,00%
2	Pemkab. Sampang	16,26%	0,00%	1,62%	0,00%	0,00%	81,98%	0,00%	0,00%	0,14%	100,00%
	Pemkab. Pamekasan	88,20%	2,59%	9,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Pemkab. Sumenep	90,65%	0,11%	0,38%	0,59%	0,02%	4,41%	0,00%	3,51%	0,32%	100,00%
3	Pemkab. Banyuwangi	92,35%	0,18%	2,06%	1,89%	0,73%	1,49%	0,01%	1,28%	0,00%	100,00%
4	Pemkab. Jember	92,97%	0,00%	0,87%	0,00%	4,84%	0,96%	0,03%	0,33%	0,00%	100,00%
	Pemkab. Bondowoso	85,79%	0,00%	14,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Pemkab. Situbondo	86,87%	0,47%	0,25%	0,00%	0,12%	11,55%	0,00%	0,05%	0,69%	100,00%
5	Pemkot. Probolinggo	59,58%	11,83%	20,10%	0,39%	3,21%	4,87%	0,00%	0,02%	0,00%	100,00%
	Pemkab. Probolinggo	80,15%	0,86%	0,68%	17,17%	0,13%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Pemkab. Lumajang	92,12%	1,22%	3,47%	0,26%	1,03%	1,17%	0,00%	0,72%	0,02%	100,00%
6	Pemkot. Malang	86,41%	8,45%	0,18%	0,55%	0,25%	2,13%	0,00%	1,89%	0,14%	100,00%
	Pemkot. Pasuruan	14,72%	1,75%	23,87%	0,22%	0,19%	1,53%	0,25%	57,47%	0,00%	100,00%
	Pemkab. Malang	44,49%	20,02%	5,95%	1,12%	7,92%	16,85%	0,00%	2,78%	0,88%	100,00%
	Pemkab. Pasuruan	25,60%	55,49%	5,35%	2,41%	3,15%	3,09%	0,98%	2,73%	1,20%	100,00%
7	Pemkot. Kediri	99,90%	0,01%	0,03%	0,01%	0,02%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	100,00%
	Pemkot. Blitar	10,64%	0,62%	83,90%	0,00%	0,14%	4,44%	0,00%	0,00%	0,26%	100,00%
	Pemkab. Kediri	24,30%	2,28%	13,86%	58,65%	0,26%	0,13%	0,00%	0,47%	0,05%	100,00%
	Pemkab. Blitar	85,96%	0,30%	2,34%	0,00%	2,27%	7,58%	0,00%	1,55%	0,00%	100,00%
	Pemkab. Trenggalek	84,38%	0,00%	3,10%	0,00%	0,00%	12,40%	0,00%	0,00%	0,12%	100,00%
	Pemkab. Tulungagung	9,62%	67,64%	0,08%	0,29%	0,53%	21,35%	0,00%	0,49%	0,01%	100,00%
	Pemkab. Jombang	68,15%	11,64%	10,26%	0,00%	1,39%	0,21%	0,08%	0,30%	7,97%	100,00%
Pemkab. Nganjuk	93,68%	0,00%	3,62%	2,36%	0,03%	0,11%	0,00%	0,00%	0,20%	100,00%	
8	Pemkot. Madiun	41,86%	3,13%	2,85%	0,38%	0,30%	3,62%	0,00%	47,84%	0,01%	100,00%
	Pemkab. Madiun	65,96%	0,00%	9,46%	0,00%	1,59%	21,75%	0,00%	0,90%	0,34%	100,00%
	Pemkab. Pacitan	35,92%	0,00%	9,56%	0,00%	0,00%	54,43%	0,00%	0,00%	0,09%	100,00%
	Pemkab. Ponorogo	23,78%	10,49%	12,82%	0,89%	31,54%	14,64%	0,00%	5,76%	0,09%	100,00%
	Pemkab. Magetan	93,74%	2,99%	1,50%	0,00%	0,28%	1,49%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Pemkab. Ngawi	95,35%	0,27%	2,37%	0,00%	1,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	100,00%
9	Pemkab. Tuban	17,62%	0,00%	1,69%	0,85%	0,05%	79,35%	0,02%	0,42%	0,00%	100,00%
	Pemkab. Bojonegoro	43,63%	0,00%	52,83%	0,32%	0,00%	3,07%	0,00%	0,00%	0,15%	100,00%
Total Kab/Kota		51,56%	9,90%	6,00%	5,75%	2,15%	9,68%	6,91%	6,61%	1,42%	100,00%

Sumber: BPS data diolah

Tabel 14. Spesialisasi Daerah pada Subsektor menurut Kab/Kota 1997

SWP	Kabupaten/Kota	3.1.	3.2.	3.3.	3.4.	3.5.	3.6.	3.7.	3.8.	3.9.	3
1	Pemkot. Surabaya	46,64%	1,52%	3,22%	2,42%	2,84%	11,91%	14,26%	13,09%	4,10%	100,00%
	Pemkot. Mojokerto	21,97%	67,69%	2,04%	1,48%	1,79%	1,26%	0,38%	2,75%	0,63%	100,00%
	Pemkab. Mojokerto	39,86%	2,94%	12,86%	30,07%	0,69%	8,90%	0,28%	4,15%	0,24%	100,00%
	Pemkab. Sidoarjo	18,42%	21,99%	4,61%	20,17%	0,70%	4,87%	18,39%	10,26%	0,59%	100,00%
	Pemkab. Lamongan	43,74%	22,30%	10,52%	0,31%	1,75%	17,74%	0,66%	0,56%	2,42%	100,00%
	Pemkab. Gresik	12,69%	3,01%	30,87%	6,64%	9,64%	26,60%	0,14%	10,40%	0,01%	100,00%
2	Pemkab. Bangkalan	26,63%	19,91%	1,11%	0,00%	2,16%	3,43%	0,00%	3,21%	43,54%	100,00%
	Pemkab. Sampang	9,22%	8,08%	1,51%	0,00%	1,06%	78,90%	1,08%	0,00%	0,15%	100,00%
	Pemkab. Pamekasan	87,54%	2,47%	3,87%	1,76%	1,68%	0,00%	0,00%	0,00%	2,68%	100,00%
3	Pemkab. Sumenep	90,64%	0,11%	0,36%	0,57%	0,02%	4,27%	0,00%	3,71%	0,33%	100,00%
	Pemkab. Banyuwangi	92,27%	0,18%	1,99%	1,90%	0,76%	1,46%	0,01%	1,43%	0,00%	100,00%
4	Pemkab. Jember	92,01%	0,63%	0,84%	0,32%	4,89%	0,90%	0,03%	0,35%	0,05%	100,00%
	Pemkab. Bondowoso	84,47%	0,98%	13,12%	0,00%	0,44%	0,62%	0,00%	0,00%	0,36%	100,00%
	Pemkab. Situbondo	87,33%	0,44%	0,23%	0,10%	0,13%	11,01%	0,00%	0,06%	0,72%	100,00%
5	Pemkot. Probolinggo	60,75%	11,12%	19,66%	0,38%	3,33%	4,74%	0,00%	0,02%	0,00%	100,00%
	Pemkab. Probolinggo	80,56%	0,83%	0,65%	16,75%	0,14%	1,00%	0,00%	0,07%	0,00%	100,00%
	Pemkab. Lumajang	92,38%	1,10%	3,33%	0,25%	1,06%	1,11%	0,00%	0,74%	0,02%	100,00%
6	Pemkot. Malang	86,86%	7,94%	0,17%	0,54%	0,26%	2,06%	0,00%	2,02%	0,14%	100,00%
	Pemkot. Pasuruan	14,04%	1,64%	22,52%	0,21%	0,19%	1,48%	0,24%	59,62%	0,04%	100,00%
	Pemkab. Malang	45,70%	19,38%	5,71%	1,10%	8,06%	16,29%	0,00%	2,88%	0,89%	100,00%
	Pemkab. Pasuruan	26,33%	54,17%	5,18%	2,46%	3,39%	3,09%	1,01%	3,06%	1,30%	100,00%
7	Pemkot. Kediri	99,91%	0,00%	0,03%	0,01%	0,02%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	100,00%
	Pemkot. Blitar	10,67%	0,61%	81,47%	0,74%	0,14%	4,58%	0,65%	0,87%	0,27%	100,00%
	Pemkab. Kediri	24,35%	2,20%	13,79%	58,68%	0,27%	0,13%	0,00%	0,52%	0,05%	100,00%
	Pemkab. Blitar	84,69%	0,29%	2,23%	0,39%	2,30%	7,47%	0,00%	1,69%	0,95%	100,00%
	Pemkab. Trenggalek	72,92%	5,78%	3,02%	0,38%	0,00%	11,91%	0,00%	5,87%	0,13%	100,00%
	Pemkab. Tulungagung	9,92%	67,49%	0,08%	0,27%	0,58%	21,11%	0,00%	0,53%	0,01%	100,00%
	Pemkab. Jombang	68,25%	10,99%	9,89%	0,18%	1,49%	0,20%	0,09%	0,34%	8,56%	100,00%
	Pemkab. Nganjuk	91,43%	1,86%	3,47%	2,35%	0,03%	0,11%	0,07%	0,47%	0,22%	100,00%
8	Pemkot. Madiun	40,21%	2,98%	2,70%	0,35%	0,32%	3,47%	0,00%	49,95%	0,01%	100,00%
	Pemkab. Madiun	59,01%	6,30%	9,16%	1,64%	1,64%	20,55%	0,36%	0,98%	0,36%	100,00%
	Pemkab. Pacitan	32,20%	4,05%	9,25%	0,22%	0,00%	53,52%	0,00%	0,66%	0,09%	100,00%
	Pemkab. Ponorogo	23,46%	9,59%	12,03%	0,84%	33,20%	14,54%	0,00%	6,25%	0,08%	100,00%
	Pemkab. Magetan	91,52%	2,91%	1,43%	0,78%	0,29%	1,44%	0,50%	0,93%	0,19%	100,00%
	Pemkab. Ngawi	92,73%	0,25%	2,29%	1,88%	2,04%	0,79%	0,00%	0,00%	0,03%	100,00%
9	Pemkab. Tuban	19,68%	0,08%	1,61%	0,84%	0,05%	77,28%	0,02%	0,44%	0,00%	100,00%
	Pemkab. Bojonegoro	44,66%	0,74%	50,43%	0,30%	0,30%	2,95%	0,00%	0,47%	0,16%	100,00%
Total Kab/Kota		52,25%	9,54%	5,72%	5,58%	2,25%	9,40%	6,81%	7,02%	1,43%	100,00%

Sumber: BPS data diolah



Tabel 15. Spesialisasi Daerah pada Subsektor menurut Kab/Kota 1999

SWP	Kabupaten/Kota	3.1.	3.2.	3.3.	3.4.	3.5.	3.6.	3.7.	3.8.	3.9.	3
1	Pemkot. Surabaya	45,66%	1,78%	3,61%	3,46%	3,62%	8,25%	14,06%	14,93%	4,64%	100,00%
	Pemkot. Mojokerto	26,90%	60,78%	3,01%	3,56%	4,49%	0,00%	0,00%	0,00%	1,26%	100,00%
	Pemkab. Mojokerto	31,46%	2,61%	17,10%	35,32%	1,15%	7,33%	0,18%	4,51%	0,34%	100,00%
	Pemkab. Sidoarjo	13,90%	25,83%	6,70%	23,18%	1,18%	3,98%	13,94%	10,49%	0,80%	100,00%
	Pemkab. Lamongan	37,30%	28,70%	13,63%	0,41%	2,73%	14,20%	0,00%	0,00%	3,03%	100,00%
	Pemkab. Gresik	7,57%	2,72%	34,71%	10,77%	14,44%	19,72%	0,13%	9,94%	0,01%	100,00%
	Pemkab. Bangkalan	19,95%	22,32%	1,44%	0,00%	3,22%	2,58%	1,06%	0,00%	49,43%	100,00%
2	Pemkab. Sampang	9,86%	8,00%	2,08%	0,93%	0,60%	65,41%	0,00%	12,89%	0,23%	100,00%
	Pemkab. Pamekasan	62,10%	2,63%	5,16%	2,59%	0,00%	17,29%	0,00%	6,90%	3,34%	100,00%
	Pemkab. Sumenep	89,30%	0,16%	0,46%	0,95%	0,00%	4,07%	0,00%	5,06%	0,00%	100,00%
3	Pemkab. Banyuwangi	88,04%	0,28%	3,28%	3,49%	1,53%	1,35%	0,00%	2,02%	0,01%	100,00%
4	Pemkab. Jember	88,27%	0,70%	1,29%	0,52%	8,10%	0,69%	0,00%	0,36%	0,06%	100,00%
	Pemkab. Bondowoso	77,68%	1,49%	16,15%	0,10%	0,86%	0,59%	1,81%	0,68%	0,63%	100,00%
	Pemkab. Situbondo	87,64%	0,64%	0,32%	0,18%	0,24%	9,56%	0,24%	0,07%	1,11%	100,00%
5	Pemkot. Probolinggo	55,72%	11,43%	21,43%	0,53%	6,12%	4,73%	0,00%	0,03%	0,01%	100,00%
	Pemkab. Probolinggo	73,43%	0,82%	0,69%	24,07%	0,21%	0,71%	0,00%	0,07%	0,00%	100,00%
	Pemkab. Lumajang	87,22%	1,60%	6,08%	0,44%	2,34%	1,15%	0,00%	1,14%	0,03%	100,00%
6	Pemkot. Malang	86,02%	7,26%	0,27%	0,87%	0,53%	2,16%	0,00%	2,68%	0,22%	100,00%
	Pemkot. Pasuruan	10,03%	1,77%	20,96%	0,30%	0,31%	1,11%	0,26%	65,26%	0,00%	100,00%
	Pemkab. Malang	45,22%	18,03%	7,43%	1,60%	12,72%	11,21%	0,00%	2,67%	1,12%	100,00%
	Pemkab. Pasuruan	21,83%	55,75%	5,35%	3,47%	5,57%	2,37%	0,86%	3,24%	1,57%	100,00%
7	Pemkot. Kediri	99,90%	0,00%	0,03%	0,01%	0,03%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	100,00%
	Pemkot. Blitar	8,00%	0,48%	86,99%	1,03%	0,20%	3,00%	0,00%	0,00%	0,30%	100,00%
	Pemkab. Kediri	21,73%	2,73%	19,11%	55,32%	0,41%	0,11%	0,00%	0,54%	0,06%	100,00%
	Pemkab. Blitar	83,18%	0,33%	3,12%	0,70%	3,80%	5,78%	0,00%	1,86%	1,23%	100,00%
	Pemkab. Trenggalek	69,40%	7,28%	5,24%	0,80%	0,00%	9,95%	0,00%	7,14%	0,18%	100,00%
	Pemkab. Tulungagung	7,23%	74,50%	0,13%	0,43%	1,02%	16,06%	0,00%	0,62%	0,01%	100,00%
	Pemkab. Jombang	55,23%	14,00%	14,89%	0,30%	2,48%	0,17%	0,09%	0,39%	12,44%	100,00%
	Pemkab. Nganjuk	84,12%	2,67%	7,18%	4,81%	0,00%	0,12%	0,00%	0,73%	0,37%	100,00%
8	Pemkot. Madiun	33,93%	2,00%	2,36%	0,64%	0,53%	2,82%	0,00%	57,70%	0,02%	100,00%
	Pemkab. Madiun	53,85%	7,88%	13,49%	2,53%	3,29%	17,17%	0,00%	1,17%	0,62%	100,00%
	Pemkab. Pacitan	36,41%	4,97%	14,53%	0,31%	0,00%	42,88%	0,00%	0,75%	0,14%	100,00%
	Pemkab. Ponorogo	16,71%	8,94%	14,88%	1,16%	44,64%	8,47%	0,00%	5,10%	0,10%	100,00%
	Pemkab. Magetan	87,20%	4,61%	2,33%	1,67%	0,68%	1,49%	0,30%	1,35%	0,37%	100,00%
	Pemkab. Ngawi	86,33%	0,45%	3,81%	3,65%	3,90%	0,74%	0,00%	1,07%	0,05%	100,00%
9	Pemkab. Tuban	22,11%	0,12%	2,68%	1,61%	0,11%	72,81%	0,00%	0,57%	0,00%	100,00%
	Pemkab. Bojonegoro	32,72%	0,84%	63,04%	0,37%	0,40%	1,97%	0,00%	0,46%	0,20%	100,00%
	Total Kab/Kota	51,19%	10,35%	6,95%	6,95%	3,29%	6,86%	5,64%	7,25%	1,51%	100,00%

Sumber: BPS data diolah

Tabel 16. Spesialisasi Daerah pada Subsektor menurut Kab/Kota 2000

SWP	Kabupaten/Kota	3.1.	3.2.	3.3.	3.4.	3.5.	3.6.	3.7.	3.8.	3.9.	3
1	Pemkot. Surabaya	44,79%	1,73%	3,93%	3,61%	4,03%	8,06%	14,39%	15,19%	4,27%	100,00%
	Pemkot. Mojokerto	26,19%	58,13%	3,15%	3,64%	4,85%	0,00%	1,83%	1,05%	1,15%	100,00%
	Pemkab. Mojokerto	30,91%	2,55%	17,38%	35,62%	1,12%	7,07%	0,21%	4,57%	0,56%	100,00%
	Pemkab. Sidoarjo	13,68%	25,27%	6,54%	23,54%	1,23%	3,81%	14,27%	10,91%	0,76%	100,00%
	Pemkab. Lamongan	38,69%	28,28%	13,09%	0,41%	2,65%	13,88%	0,00%	0,00%	3,01%	100,00%
	Pemkab. Gresik	8,25%	2,66%	36,21%	10,10%	14,41%	18,20%	0,13%	10,01%	0,01%	100,00%
2	Pemkab. Bangkalan	20,33%	22,83%	1,63%	0,00%	3,41%	2,61%	1,12%	1,30%	46,76%	100,00%
	Pemkab. Sampang	10,27%	8,03%	2,22%	0,97%	0,63%	65,06%	0,00%	12,58%	0,24%	100,00%
	Pemkab. Pamekasan	63,09%	2,57%	5,29%	2,61%	0,00%	16,58%	0,00%	6,61%	3,26%	100,00%
3	Pemkab. Sumenep	89,02%	0,16%	0,48%	0,98%	0,00%	4,07%	0,00%	5,29%	0,00%	100,00%
	Pemkab. Banyuwangi	88,04%	0,29%	3,16%	3,59%	1,62%	1,29%	0,00%	2,00%	0,01%	100,00%
4	Pemkab. Jember	87,07%	0,68%	1,45%	0,53%	9,16%	0,66%	0,00%	0,39%	0,06%	100,00%
	Pemkab. Bondowoso	77,73%	1,48%	15,95%	0,10%	0,84%	0,58%	1,92%	0,76%	0,62%	100,00%
	Pemkab. Situbondo	88,04%	0,63%	0,31%	0,18%	0,24%	9,20%	0,26%	0,07%	1,08%	100,00%
5	Pemkot. Probolinggo	55,71%	11,21%	22,10%	0,54%	6,17%	4,22%	0,00%	0,03%	0,01%	100,00%
	Pemkab. Probolinggo	73,21%	0,81%	0,74%	24,26%	0,20%	0,69%	0,00%	0,08%	0,01%	100,00%
	Pemkab. Lumajang	86,77%	1,60%	6,32%	0,45%	2,58%	1,09%	0,00%	1,16%	0,03%	100,00%
6	Pemkot. Malang	85,85%	7,28%	0,29%	0,89%	0,55%	2,13%	0,00%	2,79%	0,21%	100,00%
	Pemkot. Pasuruan	10,07%	1,69%	20,98%	0,29%	0,32%	1,03%	0,25%	65,37%	0,00%	100,00%
	Pemkab. Malang	45,34%	17,60%	7,66%	1,70%	13,10%	10,80%	0,00%	2,77%	1,02%	100,00%
	Pemkab. Pasuruan	22,79%	54,57%	5,26%	3,46%	5,96%	2,26%	0,86%	3,36%	1,48%	100,00%
7	Pemkot. Kediri	99,89%	0,00%	0,04%	0,01%	0,04%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	100,00%
	Pemkot. Blitar	7,37%	0,44%	88,00%	0,97%	0,20%	2,73%	0,00%	0,00%	0,28%	100,00%
	Pemkab. Kediri	15,29%	1,91%	13,36%	40,10%	28,83%	0,08%	0,00%	0,40%	0,04%	100,00%
	Pemkab. Blitar	82,60%	0,33%	3,43%	0,72%	3,81%	5,68%	0,00%	2,13%	1,29%	100,00%
	Pemkab. Trenggalek	68,72%	7,38%	5,80%	0,79%	0,74%	9,18%	0,00%	7,19%	0,19%	100,00%
	Pemkab. Tulungagung	7,86%	74,20%	0,13%	0,43%	1,02%	15,66%	0,00%	0,68%	0,01%	100,00%
	Pemkab. Jombang	55,32%	13,58%	16,70%	0,29%	2,42%	0,17%	0,09%	0,41%	11,02%	100,00%
	Pemkab. Nganjuk	84,57%	2,57%	6,94%	4,64%	0,03%	0,12%	0,00%	0,73%	0,39%	100,00%
8	Pemkot. Madiun	32,90%	1,94%	2,44%	0,64%	0,58%	2,65%	0,00%	58,84%	0,01%	100,00%
	Pemkab. Madiun	54,64%	7,63%	13,11%	2,56%	3,39%	16,87%	0,00%	1,21%	0,59%	100,00%
	Pemkab. Pacitan	37,66%	5,14%	14,80%	0,33%	0,00%	41,08%	0,00%	0,84%	0,15%	100,00%
	Pemkab. Ponorogo	16,12%	8,65%	14,13%	1,14%	46,12%	8,26%	0,00%	5,47%	0,10%	100,00%
	Pemkab. Magetan	87,57%	4,46%	2,21%	1,61%	0,65%	1,43%	0,28%	1,40%	0,39%	100,00%
	Pemkab. Ngawi	85,90%	0,43%	4,31%	3,55%	4,02%	0,70%	0,00%	1,05%	0,05%	100,00%
9	Pemkab. Tuban	22,45%	0,12%	2,91%	1,72%	0,11%	72,08%	0,00%	0,60%	0,00%	100,00%
	Pemkab. Bojonegoro	32,43%	0,80%	63,53%	0,36%	0,41%	1,84%	0,00%	0,45%	0,18%	100,00%
Total Kab/Kota		50,25%	10,16%	7,38%	7,05%	4,00%	6,64%	5,72%	7,42%	1,39%	100,00%

Sumber: BPS data diolah

Tabel 17. LQ pada Subsektor menurut SWP 1996

SWP		3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9
1	SWP Gerbang Kertasusila	0,6323	0,7787	1,4825	1,5217	1,4906	1,3196	1,8426	1,6525	1,6775
2	SWP Madura & Kepulauan	1,6527	0,0171	0,1156	0,0919	0,0099	1,0224	0,0000	0,4790	0,2128
3	SWP Banyuwangi	1,7911	0,0183	0,3425	0,3285	0,3386	0,1543	0,0013	0,1942	0,0023
4	SWP Jember & Sekitarnya	1,7504	0,0143	0,3865	0,0000	1,3142	0,4155	0,0024	0,0311	0,1469
5	SWP Probolinggo & Lumajang	1,4460	0,5423	1,5258	1,1389	0,7323	0,2689	0,0000	0,0259	0,0046
6	SWP Malang-Pasuruan	0,9909	3,2891	0,6230	0,2625	1,1176	0,4116	0,0703	0,5260	0,5134
7	SWP Kediri & Sekitarnya	1,7091	0,5852	0,2216	0,4535	0,0493	0,1850	0,0002	0,0119	0,1159
8	SWP Madiun & Sekitarnya	1,1037	0,2846	0,6799	0,0457	1,2216	0,6882	0,0000	4,0197	0,0372
9	SWP Tuban & Bojonegoro	0,3796	0,0000	0,9216	0,1415	0,0225	7,6033	0,0022	0,0581	0,0080

Sumber: BPS data diolah

Tabel 18. LQ pada Subsektor menurut SWP 1997

SWP		3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9
1	SWP Gerbang Kertasusila	0,6478	0,8055	1,5194	1,5538	1,5300	1,1574	1,8873	1,6911	1,7090
2	SWP Madura & Kepulauan	1,5809	0,0768	0,0904	0,0977	0,0617	1,3377	0,0113	0,4644	0,2554
3	SWP Banyuwangi	1,7231	0,0184	0,3393	0,3319	0,3290	0,2047	0,0013	0,1991	0,0023
4	SWP Jember & Sekitarnya	1,6749	0,0629	0,3670	0,0375	1,2654	0,5447	0,0024	0,0303	0,1954
5	SWP Probolinggo & Lumajang	1,4059	0,5154	1,5233	1,1141	0,7085	0,3541	0,0000	0,0285	0,0047
6	SWP Malang-Pasuruan	0,9737	3,1989	0,6110	0,2653	1,0963	0,5477	0,0707	0,5248	0,5280
7	SWP Kediri & Sekitarnya	1,6532	0,5722	0,2154	0,4403	0,0478	0,2394	0,0008	0,0134	0,1186
8	SWP Madiun & Sekitarnya	1,0157	0,3487	0,6638	0,1335	1,1949	0,9081	0,0149	3,9071	0,0543
9	SWP Tuban & Bojonegoro	0,4018	0,0128	0,8873	0,1406	0,0316	10,0380	0,0023	0,0608	0,0082

Sumber: BPS data diolah

Tabel 19. LQ pada Subsektor menurut SWP 1999

SWP		3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9
1	SWP Gerbang Kertasusila	0,5685	0,8540	1,5525	1,6014	1,5066	1,3449	1,9394	1,7125	1,7099
2	SWP Madura & Kepulauan	1,6062	0,0821	0,1065	0,1449	0,0140	1,3514	0,0000	0,7906	0,0857
3	SWP Banyuwangi	1,7200	0,0274	0,4719	0,5028	0,4631	0,1963	0,0000	0,2784	0,0043
4	SWP Jember & Sekitarnya	1,6981	0,0742	0,3855	0,0550	1,5686	0,4490	0,0472	0,0441	0,2715
5	SWP Probolinggo & Lumajang	1,3497	0,4893	1,3938	1,5354	0,8744	0,3421	0,0000	0,0342	0,0063
6	SWP Malang-Pasuruan	0,9075	3,2414	0,5990	0,3290	1,3589	0,4707	0,0805	0,6047	0,6714
7	SWP Kediri & Sekitarnya	1,7417	0,5136	0,2307	0,3383	0,0489	0,1623	0,0002	0,0125	0,1385
8	SWP Madiun & Sekitarnya	0,8886	0,3210	0,7023	0,1840	1,5013	0,7481	0,0056	4,7988	0,0811
9	SWP Tuban & Bojonegoro	0,4522	0,0186	1,2352	0,2137	0,0409	9,5988	0,0000	0,0770	0,0128

Sumber: BPS data diolah

Tabel 20. LQ pada Subsektor menurut SWP 2000

SWP		3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9
1	SWP Gerbang Kertasusila	0,5648	0,8497	1,5609	1,5959	1,3195	1,3390	1,9338	1,7030	1,7001
2	SWP Madura & Kepulauan	1,6316	0,0844	0,1054	0,1469	0,0124	1,3955	0,0000	0,7959	0,0948
3	SWP Banyuwangi	1,7521	0,0281	0,4276	0,5095	0,4063	0,1945	0,0000	0,2697	0,0047
4	SWP Jember & Sekitarnya	1,7177	0,0738	0,3683	0,0557	1,4639	0,4445	0,0488	0,0468	0,2851
5	SWP Probolinggo & Lumajang	1,3702	0,4916	1,3605	1,5267	0,7379	0,3219	0,0000	0,0342	0,0075
6	SWP Malang-Pasuruan	0,9283	3,2466	0,5679	0,3272	1,1882	0,4714	0,0796	0,6158	0,6931
7	SWP Kediri & Sekitarnya	1,7401	0,5191	0,2276	0,3418	0,4558	0,1632	0,0003	0,0132	0,1380
8	SWP Madiun & Sekitarnya	0,8950	0,3149	0,6542	0,1797	1,2785	0,7299	0,0052	4,8033	0,0865
9	SWP Tuban & Bojonegoro	0,4673	0,0190	1,2442	0,2236	0,0356	9,7668	0,0000	0,0791	0,0137

Sumber: BPS data diolah

Tabel 21. *LQ* pada Subsektor menurut Kab/Kota 1996

SWP	Kabupaten/Kota	3.1.	3.2.	3.3.	3.4.	3.5.	3.6.	3.7.	3.8.	3.9.
1	Pemkot. Surabaya	0,9017	0,1601	0,5709	0,4290	1,2643	1,2711	2,0914	1,8789	2,9052
	Pemkot. Mojokerto	0,3623	7,2257	0,3486	0,2626	0,8048	0,1280	0,0000	0,3887	0,4330
	Pemkab. Mojokerto	0,7535	0,3090	2,1839	5,4214	0,2972	0,9307	0,0380	0,5502	0,1559
	Pemkab. Sidoarjo	0,3518	2,2316	0,7942	3,5932	0,3041	0,5076	2,6906	1,4503	0,3970
	Pemkab. Lamongan	0,8259	2,3334	1,8425	0,0538	0,7536	1,8435	0,0929	0,0799	1,6137
	Pemkab. Gresik	0,2168	0,3303	5,3806	1,1676	4,2776	2,8450	0,0200	1,4550	0,0064
	Pemkab. Bangkalan	0,5750	2,1730	0,1902	0,0000	0,9273	0,3702	0,0000	0,0000	29,6677
2	Pemkab. Sampang	0,3154	0,0000	0,2695	0,0000	0,0000	8,4666	0,0000	0,0000	0,1020
	Pemkab. Pamekasan	1,7106	0,2610	1,5345	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Pemkab. Sumenep	1,7582	0,0116	0,0630	0,1019	0,0109	0,4554	0,0000	0,5309	0,2277
3	Pemkab. Banyuwangi	1,7911	0,0183	0,3425	0,3285	0,3386	0,1543	0,0013	0,1942	0,0023
4	Pemkab. Jember	1,8031	0,0000	0,1455	0,0000	2,2499	0,0988	0,0042	0,0497	0,0000
	Pemkab. Bondowoso	1,6638	0,0000	2,3665	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Pemkab. Situbondo	1,6848	0,0476	0,0412	0,0000	0,0554	1,1925	0,0000	0,0080	0,4885
5	Pemkot. Probolinggo	1,1555	1,1941	3,3481	0,0681	1,4892	0,5030	0,0000	0,0030	0,0027
	Pemkab. Probolinggo	1,5544	0,0868	0,1139	2,9840	0,0605	0,1037	0,0000	0,0000	0,0023
	Pemkab. Lumajang	1,7865	0,1227	0,5785	0,0453	0,4777	0,1209	0,0000	0,1086	0,0116
6	Pemkot. Malang	1,6759	0,8531	0,0307	0,0950	0,1173	0,2196	0,0000	0,2858	0,0973
	Pemkot. Pasuruan	0,2854	0,1771	3,9749	0,0386	0,0864	0,1583	0,0368	8,6903	0,0000
	Pemkab. Malang	0,8628	2,0213	0,9909	0,1939	3,6815	1,7402	0,0000	0,4206	0,6169
	Pemkab. Pasuruan	0,4966	5,6028	0,8916	0,4185	1,4646	0,3194	0,1413	0,4122	0,8463
7	Pemkot. Kediri	1,9376	0,0005	0,0057	0,0011	0,0111	0,0014	0,0000	0,0018	0,0000
	Pemkot. Blitar	0,2063	0,0623	13,9735	0,0000	0,0658	0,4585	0,0000	0,0000	0,1825
	Pemkab. Kediri	0,4713	0,2305	2,3082	10,1912	0,1203	0,0137	0,0000	0,0714	0,0317
	Pemkab. Blitar	1,6671	0,0305	0,3899	0,0000	1,0539	0,7834	0,0000	0,2338	0,0000
	Pemkab. Trenggalek	1,6365	0,0000	0,5163	0,0000	0,0000	1,2804	0,0000	0,0000	0,0855
	Pemkab. Tulungagung	0,1866	6,8295	0,0140	0,0499	0,2446	2,2047	0,0000	0,0742	0,0070
	Pemkab. Jombang	1,3216	1,1757	1,7090	0,0000	0,6450	0,0214	0,0122	0,0452	5,6160
	Pemkab. Nganjuk	1,8169	0,0000	0,6030	0,4097	0,0133	0,0112	0,0000	0,0000	0,1430
8	Pemkot. Madiun	0,8119	0,3164	0,4748	0,0656	0,1412	0,3737	0,0000	7,2349	0,0087
	Pemkab. Madiun	1,2792	0,0000	1,5747	0,0000	0,7386	2,2466	0,0000	0,1365	0,2424
	Pemkab. Pacitan	0,6966	0,0000	1,5924	0,0000	0,0000	5,6214	0,0000	0,0000	0,0658
	Pemkab. Ponorogo	0,4611	1,0596	2,1349	0,1549	14,6534	1,5118	0,0000	0,8706	0,0599
	Pemkab. Magetan	1,8181	0,3022	0,2496	0,0000	0,1292	0,1535	0,0000	0,0000	0,0000
	Pemkab. Ngawi	1,8492	0,0272	0,3950	0,0000	0,9238	0,0000	0,0000	0,0000	0,0170
	Pemkab. Tuban	0,3418	0,0000	0,2821	0,1486	0,0243	8,1949	0,0024	0,0629	0,0000
	Pemkab. Bojonegoro	0,8462	0,0000	8,7980	0,0550	0,0000	0,3172	0,0000	0,0000	0,1065

Sumber: BPS data diolah

Tabel 22. *LQ* pada Subsektor menurut Kab/Kota 1997

SWP	Kabupaten/Kota	3.1.	3.2.	3.3.	3.4.	3.5.	3.6.	3.7.	3.8.	3.9.
1	Pemkot. Surabaya	0,8926	0,1592	0,5639	0,4333	1,2620	1,2669	2,0952	1,8636	2,8700
	Pemkot. Mojokerto	0,4204	7,0948	0,3568	0,2658	0,7976	0,1343	0,0565	0,3915	0,4421
	Pemkab. Mojokerto	0,7629	0,3079	2,2502	5,3846	0,3082	0,9473	0,0404	0,5917	0,1711
	Pemkab. Sidoarjo	0,3526	2,3044	0,8062	3,6128	0,3110	0,5178	2,7011	1,4609	0,4163
	Pemkab. Lamongan	0,8371	2,3374	1,8412	0,0550	0,7787	1,8875	0,0964	0,0800	1,6943
	Pemkab. Gresik	0,2428	0,3155	5,4012	1,1898	4,2865	2,8298	0,0202	1,4816	0,0068
	Pemkab. Bangkalan	0,5097	2,0873	0,1944	0,0000	0,9609	0,3647	0,0000	0,4576	30,4886
2	Pemkab. Sampang	0,1764	0,8469	0,2637	0,0000	0,4711	8,3956	0,1590	0,0000	0,1042
	Pemkab. Pamekasan	1,6752	0,2593	0,6777	0,3143	0,7484	0,0000	0,0000	0,0000	1,8736
	Pemkab. Sumenep	1,7346	0,0118	0,0623	0,1021	0,0111	0,4540	0,0000	0,5277	0,2287
3	Pemkab. Banyuwangi	1,7657	0,0189	0,3477	0,3401	0,3372	0,1558	0,0013	0,2040	0,0024
4	Pemkab. Jember	1,7608	0,0660	0,1468	0,0569	2,1723	0,0953	0,0043	0,0495	0,0322
	Pemkab. Bondowoso	1,6165	0,1026	2,2956	0,0000	0,1967	0,0663	0,0000	0,0000	0,2553
	Pemkab. Situbondo	1,6712	0,0460	0,0396	0,0185	0,0558	1,1712	0,0000	0,0080	0,5018
5	Pemkot. Probolinggo	1,1625	1,1657	3,4392	0,0686	1,4787	0,5045	0,0000	0,0031	0,0028
	Pemkab. Probolinggo	1,5417	0,0871	0,1133	3,0004	0,0602	0,1062	0,0000	0,0101	0,0025
	Pemkab. Lumajang	1,7680	0,1152	0,5828	0,0447	0,4714	0,1186	0,0000	0,1059	0,0121
6	Pemkot. Malang	1,6622	0,8322	0,0297	0,0971	0,1169	0,2196	0,0000	0,2882	0,0998
	Pemkot. Pasuruan	0,2687	0,1723	3,9396	0,0380	0,0864	0,1575	0,0358	8,4914	0,0297
	Pemkab. Malang	0,8746	2,0308	0,9982	0,1967	3,5817	1,7334	0,0000	0,4106	0,6231
	Pemkab. Pasuruan	0,5039	5,6782	0,9059	0,4410	1,5093	0,3288	0,1483	0,4357	0,9109
7	Pemkot. Kediri	1,9119	0,0005	0,0057	0,0011	0,0106	0,0014	0,0000	0,0018	0,0008
	Pemkot. Blitar	0,2042	0,0634	14,2544	0,1325	0,0640	0,4872	0,0953	0,1236	0,1901
	Pemkab. Kediri	0,4661	0,2301	2,4127	10,5096	0,1221	0,0143	0,0000	0,0741	0,0328
	Pemkab. Blitar	1,6208	0,0304	0,3906	0,0698	1,0206	0,7943	0,0000	0,2401	0,6648
	Pemkab. Trenggalek	1,3954	0,6055	0,5278	0,0683	0,0000	1,2674	0,0000	0,8361	0,0890
	Pemkab. Tulungagung	0,1898	7,0745	0,0140	0,0492	0,2577	2,2464	0,0000	0,0752	0,0071
	Pemkab. Jombang	1,3062	1,1517	1,7304	0,0327	0,6623	0,0214	0,0130	0,0485	5,9977
	Pemkab. Nganjuk	1,7496	0,1950	0,6071	0,4206	0,0132	0,0115	0,0105	0,0671	0,1507
8	Pemkot. Madiun	0,7696	0,3123	0,4721	0,0635	0,1405	0,3696	0,0000	7,1139	0,0084
	Pemkab. Madiun	1,1293	0,6605	1,6024	0,2930	0,7277	2,1867	0,0533	0,1397	0,2523
	Pemkab. Pacitan	0,6163	0,4248	1,6192	0,0388	0,0000	5,6943	0,0000	0,0943	0,0658
	Pemkab. Ponorogo	0,4491	1,0055	2,1054	0,1498	14,7597	1,5475	0,0000	0,8899	0,0587
	Pemkab. Magetan	1,7515	0,3054	0,2501	0,1398	0,1304	0,1536	0,0735	0,1320	0,1308
	Pemkab. Ngawi	1,7745	0,0257	0,4011	0,3365	0,9053	0,0844	0,0000	0,0000	0,0195
9	Pemkab. Tuban	0,3766	0,0080	0,2815	0,1512	0,0244	8,2231	0,0025	0,0620	0,0000
	Pemkab. Bojonegoro	0,8546	0,0776	8,8226	0,0536	0,1330	0,3135	0,0000	0,0667	0,1147

Sumber: BPS data diolah

Tabel 23. *LQ* pada Subsektor menurut Kab/Kota 1999

SWP	Kabupaten/Kota	3.1.	3.2.	3.3.	3.4.	3.5.	3.6.	3.7.	3.8.	3.9.
1	Pemkot. Surabaya	0,8919	0,1723	0,5192	0,4971	1,0993	1,2019	2,4922	2,0591	3,0647
	Pemkot. Mojokerto	0,5256	5,8754	0,4326	0,5123	1,3625	0,0000	0,0000	0,0000	0,8300
	Pemkab. Mojokerto	0,6146	0,2522	2,4598	5,0818	0,3496	1,0676	0,0322	0,6223	0,2220
	Pemkab. Sidoarjo	0,2716	2,4967	0,9639	3,3346	0,3577	0,5805	2,4711	1,4464	0,5267
	Pemkab. Lamongan	0,7288	2,7739	1,9600	0,0588	0,8299	2,0693	0,0000	0,0000	2,0011
	Pemkab. Gresik	0,1479	0,2628	4,9922	1,5497	4,3813	2,8741	0,0222	1,3703	0,0081
	Pemkab. Bangkalan	0,3897	2,1573	0,2073	0,0000	0,9758	0,3766	0,1885	0,0000	32,6715
2	Pemkab. Sampang	0,1926	0,7734	0,2987	0,1338	0,1807	9,5320	0,0000	1,7778	0,1529
	Pemkab. Pamekasan	1,2131	0,2541	0,7416	0,3722	0,0000	2,5190	0,0000	0,9519	2,2101
	Pemkab. Sumenep	1,7445	0,0153	0,0658	0,1373	0,0000	0,5926	0,0000	0,6982	0,0000
3	Pemkab. Banyuwangi	1,7200	0,0274	0,4719	0,5028	0,4631	0,1963	0,0000	0,2784	0,0043
4	Pemkab. Jember	1,7245	0,0673	0,1854	0,0747	2,4594	0,1009	0,0000	0,0500	0,0418
	Pemkab. Bondowoso	1,5175	0,1436	2,3236	0,0149	0,2614	0,0861	0,3213	0,0942	0,4162
	Pemkab. Situbondo	1,7121	0,0617	0,0456	0,0264	0,0724	1,3929	0,0421	0,0100	0,7366
5	Pemkot. Probolinggo	1,0885	1,1047	3,0821	0,0767	1,8571	0,6900	0,0000	0,0043	0,0039
	Pemkab. Probolinggo	1,4346	0,0790	0,0997	3,4625	0,0624	0,1036	0,0000	0,0093	0,0027
	Pemkab. Lumajang	1,7038	0,1544	0,8742	0,0640	0,7115	0,1682	0,0000	0,1568	0,0197
6	Pemkot. Malang	1,6804	0,7019	0,0394	0,1250	0,1600	0,3143	0,0000	0,3690	0,1460
	Pemkot. Pasuruan	0,1960	0,1714	3,0155	0,0434	0,0930	0,1612	0,0463	8,9989	0,0000
	Pemkab. Malang	0,8834	1,7433	1,0681	0,2304	3,8605	1,6333	0,0000	0,3679	0,7405
	Pemkab. Pasuruan	0,4265	5,3884	0,7697	0,4985	1,6909	0,3448	0,1528	0,4466	1,0375
7	Pemkot. Kediri	1,9516	0,0003	0,0050	0,0010	0,0106	0,0013	0,0000	0,0015	0,0000
	Pemkot. Blitar	0,1563	0,0461	12,5119	0,1482	0,0618	0,4378	0,0000	0,0000	0,1988
	Pemkab. Kediri	0,4244	0,2637	2,7484	7,9588	0,1254	0,0161	0,0000	0,0742	0,0372
	Pemkab. Blitar	1,6249	0,0317	0,4491	0,1011	1,1519	0,8427	0,0000	0,2563	0,8137
	Pemkab. Trenggalek	1,3558	0,7032	0,7542	0,1156	0,0000	1,4504	0,0000	0,9852	0,1162
	Pemkab. Tulungagung	0,1412	7,2017	0,0186	0,0615	0,3086	2,3409	0,0000	0,0851	0,0091
	Pemkab. Jombang	1,0789	1,3529	2,1424	0,0437	0,7537	0,0254	0,0152	0,0544	8,2212
	Pemkab. Nganjuk	1,6433	0,2577	1,0326	0,6913	0,0000	0,0179	0,0000	0,1012	0,2472
8	Pemkot. Madiun	0,6629	0,1934	0,3393	0,0920	0,1610	0,4106	0,0000	7,9573	0,0103
	Pemkab. Madiun	1,0519	0,7614	1,9403	0,3642	0,9992	2,5018	0,0000	0,1618	0,4117
	Pemkab. Pacitan	0,7113	0,4808	2,0904	0,0445	0,0000	6,2484	0,0000	0,1032	0,0954
	Pemkab. Ponorogo	0,3264	0,8639	2,1405	0,1674	13,5489	1,2340	0,0000	0,7035	0,0652
	Pemkab. Magetan	1,7035	0,4460	0,3358	0,2401	0,2050	0,2167	0,0530	0,1863	0,2437
	Pemkab. Ngawi	1,6866	0,0432	0,5473	0,5248	1,1841	0,1084	0,0000	0,1480	0,0316
	Pemkab. Tuban	0,4320	0,0118	0,3850	0,2311	0,0321	10,6096	0,0000	0,0785	0,0000
9	Pemkab. Bojonegoro	0,6391	0,0813	9,0677	0,0535	0,1221	0,2866	0,0000	0,0640	0,1307

Sumber: BPS data diolah

Tabel 24. *LQ* pada Subsektor menurut Kab/Kota 2000

SWP	Kabupaten/Kota	3.1.	3.2.	3.3.	3.4.	3.5.	3.6.	3.7.	3.8.	3.9.
1	Pemkot. Surabaya	0,8914	0,1703	0,5330	0,5128	1,0065	1,2141	2,5155	2,0475	3,0814
	Pemkot. Mojokerto	0,5212	5,7210	0,4262	0,5169	1,2133	0,0000	0,3204	0,1414	0,8301
	Pemkab. Mojokerto	0,6152	0,2506	2,3544	5,0547	0,2812	1,0659	0,0373	0,6156	0,4020
	Pemkab. Sidoarjo	0,2723	2,4869	0,8862	3,3397	0,3063	0,5737	2,4941	1,4709	0,5476
	Pemkab. Lamongan	0,7700	2,7833	1,7726	0,0577	0,6615	2,0913	0,0000	0,0000	2,1713
	Pemkab. Gresik	0,1642	0,2618	4,9049	1,4334	3,6040	2,7432	0,0226	1,3501	0,0104
	Pemkab. Bangkalan	0,4046	2,2470	0,2213	0,0000	0,8518	0,3935	0,1960	0,1757	33,7497
	Pemkab. Sampang	0,2043	0,7901	0,3008	0,1379	0,1586	9,8034	0,0000	1,6957	0,1751
2	Pemkab. Pamekasan	1,2555	0,2529	0,7160	0,3703	0,0000	2,4980	0,0000	0,8908	2,3534
	Pemkab. Sumenep	1,7716	0,0158	0,0645	0,1390	0,0000	0,6137	0,0000	0,7131	0,0000
	Pemkab. Banyuwangi	1,7521	0,0281	0,4276	0,5095	0,4063	0,1945	0,0000	0,2697	0,0047
4	Pemkab. Jember	1,7327	0,0665	0,1963	0,0757	2,2902	0,0996	0,0000	0,0532	0,0436
	Pemkab. Bondowoso	1,5469	0,1460	2,1609	0,0147	0,2101	0,0878	0,3365	0,1023	0,4480
5	Pemkab. Situbondo	1,7520	0,0616	0,0414	0,0260	0,0593	1,3866	0,0454	0,0098	0,7779
	Pemkot. Probolinggo	1,1088	1,1030	2,9933	0,0770	1,5439	0,6364	0,0000	0,0044	0,0043
	Pemkab. Probolinggo	1,4569	0,0801	0,1001	3,4428	0,0507	0,1045	0,0000	0,0101	0,0039
6	Pemkab. Lumajang	1,7267	0,1579	0,8565	0,0634	0,6448	0,1640	0,0000	0,1561	0,0232
	Pemkot. Malang	1,7085	0,7163	0,0399	0,1258	0,1380	0,3209	0,0000	0,3763	0,1539
	Pemkot. Pasuruan	0,2003	0,1659	2,8413	0,0417	0,0802	0,1558	0,0443	8,8134	0,0000
	Pemkab. Malang	0,9024	1,7323	1,0383	0,2407	3,2746	1,6273	0,0000	0,3740	0,7382
7	Pemkab. Pasuruan	0,4534	5,3701	0,7131	0,4909	1,4898	0,3412	0,1504	0,4526	1,0697
	Pemkot. Kediri	1,9879	0,0003	0,0052	0,0010	0,0093	0,0014	0,0000	0,0016	0,0000
	Pemkot. Blitar	0,1467	0,0438	11,9202	0,1369	0,0509	0,4119	0,0000	0,0000	0,2010
	Pemkab. Kediri	0,3042	0,1875	1,8096	5,6894	7,2101	0,0116	0,0000	0,0541	0,0291
	Pemkab. Blitar	1,6438	0,0327	0,4648	0,1029	0,9533	0,8560	0,0000	0,2875	0,9293
	Pemkab. Trenggalek	1,3676	0,7261	0,7858	0,1118	0,1858	1,3840	0,0000	0,9695	0,1372
	Pemkab. Tulungagung	0,1564	7,3019	0,0182	0,0614	0,2539	2,3601	0,0000	0,0921	0,0104
	Pemkab. Jombang	1,1010	1,3360	2,2626	0,0415	0,6049	0,0252	0,0159	0,0553	7,9512
8	Pemkab. Nganjuk	1,6831	0,2534	0,9406	0,6578	0,0073	0,0178	0,0000	0,0986	0,2828
	Pemkot. Madiun	0,6548	0,1908	0,3302	0,0914	0,1439	0,3990	0,0000	7,9326	0,0107
	Pemkab. Madiun	1,0874	0,7513	1,7760	0,3628	0,8487	2,5418	0,0000	0,1626	0,4257
	Pemkab. Pacitan	0,7495	0,5055	2,0052	0,0465	0,0000	6,1908	0,0000	0,1128	0,1094
	Pemkab. Ponorogo	0,3208	0,8516	1,9140	0,1618	11,5324	1,2454	0,0000	0,7380	0,0695
	Pemkab. Magetan	1,7426	0,4393	0,2995	0,2286	0,1629	0,2149	0,0488	0,1892	0,2798
	Pemkab. Ngawi	1,7094	0,0419	0,5837	0,5035	1,0054	0,1052	0,0000	0,1416	0,0373
9	Pemkab. Tuban	0,4468	0,0121	0,3947	0,2435	0,0280	10,8619	0,0000	0,0813	0,0000
	Pemkab. Bojonegoro	0,6454	0,0783	8,6059	0,0514	0,1014	0,2766	0,0000	0,0608	0,1325

Sumber: BPS data diolah



Tabel 25. *B-Spec* pada antar SWP 1996

	SWP	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SWP Gerbang Kertasusila		1,05	1,19	1,15	0,84	0,87	1,11	0,80	1,22
2	SWP Madura & Kepulauan			0,21	0,19	1,12	0,80	0,23	0,64	1,38
3	SWP Banyuwangi				0,10	0,38	0,83	0,14	0,74	1,51
4	SWP Jember & Sekitarnya					0,37	0,86	0,17	0,67	1,48
5	SWP Probolinggo & Lumajang						0,68	0,21	0,63	1,42
6	SWP Malang-Pasuruan							0,76	0,63	1,43
7	SWP Kediri & Sekitarnya								0,73	1,54
8	SWP Madiun & Sekitarnya									1,38
9	SWP Tuban & Bojonegoro									

Sumber: BPS data diolah

Tabel 26. *B-Spec* pada antar SWP 1997

	SWP	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SWP Gerbang Kertasusila		1,03	1,15	1,10	0,81	0,82	1,08	0,71	1,27
2	SWP Madura & Kepulauan			0,22	0,19	1,10	0,76	0,23	0,67	1,34
3	SWP Banyuwangi				0,11	0,36	0,81	0,13	0,78	1,47
4	SWP Jember & Sekitarnya					0,35	0,83	0,15	0,71	1,44
5	SWP Probolinggo & Lumajang						0,67	0,21	0,66	1,39
6	SWP Malang-Pasuruan							0,75	0,59	1,39
7	SWP Kediri & Sekitarnya								0,76	1,50
8	SWP Madiun & Sekitarnya									1,33
9	SWP Tuban & Bojonegoro									

Sumber: BPS data diolah

Tabel 27. *B-Spec* pada antar SWP 1999

	SWP	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SWP Gerbang Kertasusila		1,06	1,18	1,16	0,80	0,84	1,20	0,78	1,13
2	SWP Madura & Kepulauan			0,25	0,25	1,15	0,86	0,28	0,82	1,30
3	SWP Banyuwangi				0,13	0,41	0,86	0,13	0,90	1,40
4	SWP Jember & Sekitarnya					0,43	0,90	0,17	0,84	1,40
5	SWP Probolinggo & Lumajang						0,73	0,33	0,79	1,28
6	SWP Malang-Pasuruan							0,86	0,67	1,34
7	SWP Kediri & Sekitarnya								0,94	1,45
8	SWP Madiun & Sekitarnya									1,29
9	SWP Tuban & Bojonegoro									

Sumber: BPS data diolah

Tabel 28. *B-Spec* pada antar SWP 2000

	SWP	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SWP Gerbang Kertasusila		1,08	1,19	1,17	0,81	0,85	1,18	0,79	1,12
2	SWP Madura & Kepulauan			0,25	0,25	1,16	0,86	0,28	0,83	1,29
3	SWP Banyuwangi				0,14	0,42	0,85	0,11	0,91	1,39
4	SWP Jember & Sekitarnya					0,44	0,89	0,15	0,85	1,40

5	SWP Probolinggo & Lumajang									0,73	0,30	0,81	1,26
6	SWP Malang-Pasuruan										0,82	0,67	1,33
7	SWP Kediri & Sekitarnya											0,92	1,43
8	SWP Madiun & Sekitarnya												1,29
9	SWP Tuban & Bojonegoro												

Sumber: BPS data diolah

Tabel 29. B-Spec pada antar kab/Kota 1996

SWP.Kab/Kota.	1.1.	1.2.	1.3.	1.4.	1.5.	1.6.	1.7.	2.1.	2.2.	2.3.	3.1.	4.1.	4.2.	4.3.	5.1.	5.2.	5.3.	6.1.	6.2.	6.3.	6.4.	7.1.	7.2.	7.3.	7.4.	7.5.	7.6.	7.7.	7.8.	8.1.	8.2.	8.3.	8.4.	8.5.	8.6.	9.1.	9.2.	
1.1. Pemkot. Surabaya		1,40	0,80	0,88	0,69	1,13	1,16	1,39	0,97	0,88	0,92	0,97	1,00	0,81	0,81	0,97	0,91	0,94	1,31	0,61	1,13	1,07	1,61	1,35	0,79	0,76	1,50	0,85	0,95	0,74	0,70	0,97	0,99	0,97	0,98	1,34	0,99	
1.2. Pemkot. Mojokerto			1,40	1,02	1,04	1,53	1,10	1,61	1,53	1,52	1,49	1,55	1,58	1,57	1,28	1,54	1,50	1,37	1,54	1,04	0,32	1,62	1,70	1,49	1,49	1,56	0,40	1,30	1,55	1,43	1,50	1,56	1,24	1,51	1,54	1,56	1,55	
1.3. Pemkab. Mojokerto				0,87	0,72	1,05	1,23	1,46	0,99	1,04	1,07	1,17	0,96	1,02	0,78	0,83	1,07	1,06	1,29	0,77	1,13	1,22	1,42	0,56	0,97	0,98	1,54	0,93	1,10	0,95	0,82	0,91	0,92	1,10	1,16	1,41	0,89	
1.4. Pemkab. Sidoarjo					0,95	1,18	1,09	1,54	1,49	1,45	1,49	1,58	1,54	1,51	1,19	1,24	1,49	1,37	1,34	0,94	0,89	1,64	1,58	1,06	1,44	1,47	1,24	1,27	1,51	1,24	1,41	1,44	1,09	1,51	1,57	1,49	1,47	
1.5. Pemkab. Lamongan						1,08	0,80	1,28	0,91	1,03	1,04	1,07	0,93	0,89	0,55	1,09	0,99	0,91	1,39	0,23	0,77	1,15	1,46	1,22	0,90	0,84	0,96	0,62	1,06	0,95	0,55	0,73	0,75	1,02	1,06	1,24	0,86	
1.6. Pemkab. Gresik							1,58	1,19	1,54	1,60	1,62	1,64	1,49	1,53	1,14	1,59	1,62	1,61	1,03	1,02	1,37	1,77	1,04	1,30	1,50	1,47	1,29	1,47	1,65	1,38	1,10	1,03	0,84	1,65	1,68	1,16	1,06	
1.7. Pemkab. Bangkalan								1,58	1,33	1,32	1,34	1,33	1,38	1,30	1,04	1,35	1,32	1,18	1,61	0,85	0,91	1,41	1,67	1,44	1,27	1,31	1,29	0,96	1,38	1,24	1,27	1,31	1,18	1,29	1,34	1,55	1,32	
2.1. Pemkab. Sampang									1,64	1,58	1,61	1,64	1,64	1,44	1,54	1,64	1,62	1,63	1,64	1,30	1,58	1,67	1,66	1,64	1,49	1,39	1,38	1,64	1,64	1,57	1,20	0,55	1,35	1,62	1,64	0,06	1,58	
2.2. Pemkab. Pamekasan										0,23	0,19	0,22	0,10	0,25	0,57	0,37	0,14	0,22	1,49	0,94	1,33	0,24	1,59	1,28	0,23	0,25	1,75	0,40	0,16	1,05	0,50	1,10	1,29	0,15	0,18	1,61	0,94	
2.3. Pemkab. Sumenep											0,11	0,15	0,28	0,16	0,70	0,35	0,13	0,17	1,59	0,94	1,34	0,19	0,93	1,48	0,15	0,21	1,70	0,61	0,16	1,00	0,56	1,18	1,34	0,15	0,18	1,53	1,05	
3.1. Pemkab. Banyuwangi												0,10	0,24	0,22	0,71	0,32	0,06	0,19	1,60	0,97	1,33	0,15	1,71	0,77	0,17	0,24	1,75	0,57	0,07	1,05	0,58	1,21	1,39	0,08	0,09	1,56	1,05	
4.1. Pemkab. Jember													0,27	0,24	0,71	0,36	0,09	0,24	1,66	0,97	1,38	0,14	1,75	1,48	0,49	0,28	1,77	0,58	0,12	1,11	0,61	1,25	1,38	0,10	0,08	1,60	1,09	
4.2. Pemkab. Bondowoso														0,28	0,52	0,38	0,21	0,28	1,42	0,99	1,38	0,28	1,50	1,24	0,24	0,45	1,81	0,43	0,21	1,11	0,49	1,09	1,27	0,25	0,24	1,61	0,84	
4.3. Pemkab. Situbondo															0,69	0,36	0,22	0,21	1,66	0,85	1,39	0,26	1,68	1,49	0,11	0,07	1,57	0,60	0,25	1,07	0,43	1,04	1,04	1,27	0,22	0,25	1,41	1,06
5.1. Pemkot. Probolinggo																0,75	0,66	0,58	1,23	0,58	1,01	0,81	1,28	1,17	0,61	0,65	1,46	0,33	0,73	0,96	0,49	0,99	0,89	0,68	0,72	1,51	0,66	
5.2. Pemkab. Probolinggo																	0,34	0,34	1,65	1,03	1,39	0,40	1,74	1,13	0,35	0,36	1,76	0,60	0,33	1,10	0,64	1,25	1,45	0,34	0,38	1,60	1,09	
5.3. Pemkab. Lumajang																		0,20	1,57	0,95	1,33	0,16	1,68	1,40	0,17	0,23	1,73	0,51	0,08	0,58	0,55	1,19	1,37	0,07	0,08	1,58	1,03	
6.1. Pemkot. Malang																			1,59	0,84	1,22	0,27	1,72	1,44	0,19	0,26	1,57	0,45	0,25	1,00	0,62	1,23	1,25	0,17	0,26	1,58	1,07	
6.2. Pemkot. Pasuruan																				1,46	1,47	1,70	1,26	1,37	1,59	1,61	1,72	1,45	1,63	0,62	1,46	1,48	1,26	1,61	1,65	1,63	1,19	
6.3. Pemkab. Malang																					0,76	1,11	1,56	1,31	0,83	0,80	1,04	0,70	1,01	0,90	0,60	0,82	0,67	0,99	1,02	1,25	0,94	
6.4. Pemkab. Pasuruan																						1,49	1,60	1,29	1,30	1,36	0,61	1,08	1,36	1,24	1,26	1,32	1,01	1,36	1,39	1,53	1,31	
7.1. Pemkot. Kediri																								1,79	1,51	0,28	0,31	1,81	0,64	0,12	1,16	0,68	1,28	1,52	0,12	0,09	1,65	1,13
7.2. Pemkot. Blitar																									1,49	1,64	1,63	1,70	1,56	1,71	1,64	1,50	1,51	1,43	1,71	1,73	1,66	0,67
7.3. Pemkab. Kediri																										1,44	1,45	1,74	1,25	1,39	1,39	1,31	1,32	1,19	1,43	1,46	1,58	1,23
7.4. Pemkab. Blitar																											0,11	1,63	0,55	0,23	1,00	0,43	1,08	1,24	0,21	0,19	1,45	1,02
7.5. Pemkab. Trenggalek																											1,56	0,57	0,25	1,03	0,37	0,97	1,21	0,25	0,26	1,37	1,00	
7.6. Pemkab. Tulungagung																												1,55	1,80	1,65	1,36	1,38	1,28	1,71	1,79	1,36	1,81	
7.7. Pemkab. Jombang																													0,56	1,03	0,45	1,08	1,07	0,54	0,56	1,60	0,91	
7.8. Pemkab. Nganjuk																													1,10	0,60	1,21	1,43	0,09	0,08	1,59	1,04		
8.1. Pemkot. Madiun																														1,01	1,15	1,20	1,04	1,10	1,52	1,26		
8.2. Pemkab. Madiun																															0,66	0,99	0,62	0,60	1,17	0,87		
8.3. Pemkab. Pacitan																																1,04	1,22	1,23	0,53	1,03		
8.4. Pemkab. Ponorogo																																	1,40	1,43	1,29	1,20		
8.5. Pemkab. Magetan																																		0,08	1,59	1,07		
8.6. Pemkab. Ngawi																																				1,61	1,08	
9.1. Pemkab. Tuban																																					1,55	
9.2. Pemkab. Bojonegoro																																						

Sumber: BPS data diolah

Tabel 30. B-Spec pada antar kab/Kota 1997

SWP.Kab/Kota.	1.1.	1.2.	1.3.	1.4.	1.5.	1.6.	1.7.	2.1.	2.2.	2.3.	3.1.	4.1.	4.2.	4.3.	5.1.	5.2.	5.3.	6.1.	6.2.	6.3.	6.4.	7.1.	7.2.	7.3.	7.4.	7.5.	7.6.	7.7.	7.8.	8.1.	8.2.	8.3.	8.4.	8.5.	8.6.	9.1.	9.2.		
1.1. Pemkot. Surabaya		1,32	0,77	0,87	0,68	1,10	1,16	1,47	0,85	0,88	0,91	0,95	0,95	0,81	0,81	0,96	0,92	0,93	1,32	0,60	1,10	1,07	1,57	1,35	0,76	0,61	1,50	0,84	0,91	0,77	0,63	1,00	1,00	0,93	0,92	1,31	0,94		
1.2. Pemkot. Mojokerto			1,33	1,01	0,98	1,50	1,01	1,57	1,39	1,45	1,42	1,46	1,47	1,50	1,23	1,48	1,43	1,31	1,55	0,98	0,27	1,56	1,66	1,43	1,40	1,31	0,40	1,24	1,44	1,37	1,27	1,39	1,19	1,40	1,43	1,52	1,46		
1.3. Pemkab. Mojokerto				0,87	0,71	1,02	1,23	1,53	1,02	1,02	1,05	1,13	0,90	1,00	0,77	0,81	1,06	1,04	1,30	0,75	1,11	1,20	1,38	0,59	0,94	0,81	1,54	0,91	1,03	0,92	0,71	0,91	0,94	1,04	1,08	1,37	0,85		
1.4. Pemkab. Sidoarjo					0,95	1,14	1,05	1,49	1,44	1,44	1,48	1,56	1,49	1,50	1,20	1,24	1,49	1,37	1,35	0,95	0,88	1,63	1,54	1,07	1,42	1,23	1,24	1,28	1,46	1,23	1,24	1,34	1,09	1,46	1,51	1,47	1,44		
1.5. Pemkab. Lamongan						1,07	0,88	1,23	0,91	1,01	1,02	1,03	0,87	0,87	0,56	1,07	0,98	0,90	1,42	0,23	0,77	1,12	1,43	1,23	0,85	0,69	0,97	0,61	0,99	0,99	0,40	0,72	0,78	0,97	1,02	1,20	0,82		
1.6. Pemkab. Gresik							1,49	1,17	1,55	1,57	1,59	1,59	1,44	1,51	1,12	1,56	1,59	1,58	1,01	1,01	1,34	1,74	1,03	1,27	1,46	1,26	1,29	1,44	1,58	1,34	1,00	0,95	0,82	1,59	1,60	1,15	1,03		
1.7. Pemkab. Bangkalan								1,54	1,31	1,32	1,37	1,37	1,40	1,37	1,11	1,41	1,36	1,22	1,57	0,87	0,86	1,47	1,66	1,43	1,27	1,19	1,31	1,01	1,39	1,25	1,19	1,28	1,14	1,33	1,38	1,50	1,35		
2.1. Pemkab. Sampang									1,71	1,72	1,74	1,75	1,74	1,58	1,51	1,76	1,72	1,60	1,71	1,27	1,52	1,81	1,66	1,73	1,61	1,43	1,22	1,59	1,74	1,65	1,22	0,63	1,31	1,68	1,74	0,24	1,70		
2.2. Pemkab. Pamekasan										0,22	0,16	0,18	0,20	0,22	0,62	0,32	0,13	0,19	1,60	0,89	1,25	0,25	1,67	1,35	0,20	0,42	1,73	0,42	0,10	1,08	0,62	1,22	1,35	0,15	0,13	1,55	1,00		
2.3. Pemkab. Sumenep											0,11	0,15	0,28	0,15	0,68	0,35	0,13	0,16	1,60	0,92	1,32	0,19	0,92	1,48	0,16	0,36	1,70	0,60	0,15	1,03	0,69	1,24	1,35	0,11	0,15	1,49	1,02		
3.1. Pemkab. Banyuwangi												0,09	0,25	0,21	0,69	0,31	0,05	0,18	1,61	0,95	1,32	0,15	1,68	0,77	0,18	0,43	1,74	0,56	0,08	1,08	0,68	1,27	1,40	0,07	0,04	1,52	1,01		
4.1. Pemkab. Jember													0,26	0,22	0,66	0,33	0,08	0,21	1,66	0,93	1,34	0,16	1,72	1,46	0,48	0,48	1,75	0,56	0,12	1,13	0,72	1,30	1,37	0,10	0,07	1,56	1,04		
4.2. Pemkab. Bondowoso														0,28	0,48	0,34	0,20	0,27	1,42	0,92	1,32	0,31	1,49	1,22	0,23	0,63	1,76	0,40	0,21	1,10	0,59	1,14	1,25	0,24	0,24	1,56	0,81		
4.3. Pemkab. Situbondo															0,67	0,35	0,21	0,20	1,67	0,83	1,38	0,25	1,67	1,49	0,13	0,30	1,57	0,60	0,23	1,11	0,57	1,12	1,29	0,20	0,22	1,38	1,03		
5.1. Pemkot. Probolinggo																0,72	0,65	0,57	1,25	0,58	1,01	0,78	1,28	1,18	0,59	0,51	1,47	0,32	0,67	1,00	0,37	0,99	0,93	0,66	0,67	1,47	0,63		
5.2. Pemkab. Probolinggo																	0,33	0,33	1,66	1,01	1,37	0,39	1,72	1,14	0,34	0,48	1,75	0,59	0,31	1,13	0,73	1,30	1,46	0,32	0,31	1,55	1,05		
5.3. Pemkab. Lumajang																			0,19	1,58	0,93	1,32	0,15	1,66	1,40	0,19	0,42	1,73	0,51	0,07	0,60	0,67	1,23	1,38	0,07	0,06	1,54	0,98	
6.1. Pemkot. Malang																				1,60	0,82	1,21	0,26	1,70	1,44	0,21	0,33	1,58	0,45	0,20	1,04	0,62	1,21	1,27	0,13	0,22	1,54	1,02	
6.2. Pemkot. Pasuruan																					1,48	1,48	1,72	1,26	1,39	1,60	1,47	1,72	1,47	1,60	0,60	1,44	1,45	1,28	1,60	1,64	1,64	1,21	
6.3. Pemkab. Malang																						0,76	1,08	1,53	1,31	0,78	0,60	1,06	0,69	0,94	0,94	0,44	0,82	0,70	0,93	0,96	1,22	0,89	
6.4. Pemkab. Pasuruan																							1,47	1,56	1,30	1,25	1,16	0,63	1,08	1,30	1,22	1,08	1,21	1,03	1,30	1,33	1,48	1,27	
7.1. Pemkot. Kediri																								1,78	1,51	0,30	0,54	1,80	0,63	0,17	1,19	0,82	1,35	1,53	0,17	0,14	1,60	1,11	
7.2. Pemkot. Blitar																									1,47	1,61	1,60	1,68	1,55	1,67	1,62	1,45	1,48	1,41	1,67	1,70	1,64	0,69	
7.3. Pemkab. Kediri																										1,44	1,39	1,73	1,25	1,35	1,39	1,23	1,27	1,21	1,41	1,42	1,54	1,20	
7.4. Pemkab. Blitar																											0,30	1,62	0,52	0,23	1,03	0,55	1,14	1,24	0,21	0,19	1,41	0,97	
7.5. Pemkab. Trenggalek																												1,43	0,44	0,42	0,89	0,38	0,96	0,99	0,40	0,47	1,32	0,95	
7.6. Pemkab. Tulungagung																												1,55	1,74	1,65	1,24	1,28	1,29	1,69	1,76	1,36	1,64		
7.7. Pemkab. Jombang																														0,51	1,06	0,46	1,07	1,10	0,52	0,55	1,56	0,87	
7.8. Pemkab. Nganjuk																															1,09	0,66	1,23	1,39	0,07	0,08	1,54	1,00	
8.1. Pemkot. Madiun																																0,98	1,16	1,21	1,05	1,12	1,49	1,21	
8.2. Pemkab. Madiun																																	0,66	0,86	0,65	0,69	1,13	0,83	
8.3. Pemkab. Pacitan																																		0,95	1,22	1,28	0,49	1,08	
8.4. Pemkab. Ponorogo																																				1,37	1,41	1,26	1,19
8.5. Pemkab. Magetan																																					0,10	1,52	1,01
8.6. Pemkab. Ngawi																																						1,54	1,03





